

BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

Balai POM di Batam

Tahun 2025

Jl. Hang Jebat, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa,
Kota Batam, Kepulauan Riau
Email : bpom_batam@pom.go.id
Telp : (0778)761543

KATA PENGANTAR



Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
Kepala Balai POM di Batam

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Batam dalam pengawasan obat dan makanan selama tahun 2025, yang meliputi kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium, layanan sertifikasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Laporan ini juga menyajikan capaian kinerja, analisis permasalahan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.

Sebagai wilayah perbatasan dengan dinamika perdagangan yang tinggi, pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Batam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari aspek peredaran produk ilegal, perkembangan perdagangan digital, maupun keterbatasan sumber daya. Namun demikian, melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Balai POM di Batam terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan guna memastikan perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam penyajian maupun kelengkapan data. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Balai POM di Batam serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selama tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan ke depan.

Batam, Maret 2026

Kepala Balai POM di Batam

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI BATAM

Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H.

Tim Penyusun





Koordinator	Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
Ketua	Rendra Ricahya, S.T., M.M.
Sekretaris	Arif Pratama, ST
Anggota	Radhia Anissa, S.E., M.Ak. Dwi Yusriana, A.Md.Ak. Wike Ramayuli, S.Kom Aisyah Nur Hidayati, A.Md.Si. Paniyati, S.Farm, Apt Annisya Harfan, S.Farm, Apt Septi Eka Putri, S.Farm Celsy Pratami Alni, S.TP Ricko Hartanto, S.Farm.,Apt. Feby Setiawan, S.T.P., M.Sc Miranda, S.T.P. Heru Kristianto, S.T. Veni Tripuspitawati Hasan, S.H David Indra Pratama, S.H., M.H Muhammad Indrawan Prasetya, S.H Novandi Pratama, SH Devita Nirmalasari, S.TP Melisa Purnamasari, S.Farm, Apt Achmad Fatoni, S.Si Tri Murni Andayani, S.T.P Amdani, S.Farm, Apt Sofianingtias Frihantining Hidayati, S.Si Putu Sumahandriyani, S.K.M. Riky Murtiadi S.Ds

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum Institusi 1
1.2 Tugas pokok dan fungsi 2
1.3 Visi dan Misi UPT BPOM 4
1.4 Budaya organisasi 5
1.5 Tantangan dan isu strategis 6
BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 10
2.1. Lingkungan Eksternal 10
2.1.1. Data Umum Wilayah Kerja 11
2.1.2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota 16
2.2. Lingkungan Internal 20
BAB III
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 43
3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat 43
3.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat 43
3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam 52
3.1.3 Sampling dan Pengujian Produk Terapetik dan NAPZA 53
3.2 Pengawasan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya) 54
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 56
3.3.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam 56
3.3.2 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam 59
3.3.3 Sampling dan Pengujian Produk Obat Kuasi 61
3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 62
3.4.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Suplemen Kesehatan 62
3.4.2 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan 63
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik 65
3.5.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik 65
3.5.2 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik 67
3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 69
3.6.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Produk Pangan 69
3.6.2 Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan 73
3.6.3 Pengujian Produk Pangan, Mikrobiologi dan Bahan Berbahaya 74
3.6.4 IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan 76
3.6.5 Data kasus keracunan 77
3.6.6 Desa yang diintervensi keamanan pangan 79

3.6.7 Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan (SAPA SEKOLAH) 81
3.6.8 Pasar pangan aman berbasis komunitas 82
3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan 83
3.8 Pemantauan Iklan dan Label 85
3.8.1 Pemantauan Iklan 85
3.8.2 Pemantauan Label/ Penandaan 86
3.9 Penyidikan Kasus/Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 86
3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 88
BAB IV
MASALAH 95
BAB V
KESIMPULAN 100
BAB VI
SARAN 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai POM di Batam	3
Gambar 2	Peta Provinsi Kepulauan Riau	11
Gambar 3	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	20
Gambar 4	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	20
Gambar 5	Komposisi SDM Balai POM di Batam	24
Gambar 6	Peta Jabatan Balai POM di Batam	25
Gambar 7	Diagram penguji dan sampel tiap laboratorium	27
Gambar 8	Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Balai POM di Batam	45
Gambar 9	Pengawasan Sarana PBF Balai POM di Batam	46
Gambar 10	Pengawasan Sarana Apotek Balai POM di Batam	47
Gambar 11	Pengawasan Sarana Toko Obat Balai POM di Batam	48
Gambar 12	Pengawasan Sarana IFK Balai POM di Batam	49
Gambar 13	Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Balai POM di Batam	50
Gambar 14	Pengawasan Sarana Puskesmas Balai POM di Batam	51
Gambar 15	Pengawasan Sarana Klinik Balai POM di Batam	52
Gambar 16	Hasil Pengujian Produk Terapetik/Obat dan NAPPZA	54
Gambar 17	Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Balai POM di Batam	57

Gambar 18	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Balai POM di Batam	58
Gambar 19	Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam	60
Gambar 20	Hasil Pengujian Produk Obat Kuasi	61
Gambar 21	Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Balai POM di Batam	63
Gambar 22	Hasil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan	64
Gambar 23	Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Balai POM di Batam Balai POM di Batam	66
Gambar 24	Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Balai POM di Batam	67
Gambar 25	Hasil Pengujian Produk Kosmetik	68
Gambar 26	Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD Balai POM di Batam	71
Gambar 27	Pengawasan Sarana Produksi Pangan IRTP Balai POM di Batam	72
Gambar 28	Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Balai POM di Batam	73
Gambar 29	Hasil Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan	74
Gambar 30	Data Kasus Keracunan Tahun 2025	79
Gambar 31	Jumlah Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan Balai POM di Batam per Gender	90
Gambar 32	Jumlah Layanan Informasi Balai POM di Batam per Komoditi	91
Gambar 33	Profesi Konsumen Penerima Layanan Informasi Balai POM di Batam	92
Gambar 34	Sarana Mendapatkan Informasi Balai POM di Batam	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pola Transportasi dan Waktu Tempuh Wilayah Kerja	12
Tabel 2	Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan Berdasarkan	17
Tabel 3	Kendaraan Operasional	22
Tabel 4	Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan per Gender	90
Tabel 5	Jumlah Layanan Informasi per Komoditi	91
Tabel 6	Profesi Konsumen Penerima Layanan Informasi	92
Tabel 7	Sarana Mendapatkan Layanan Informasi	93

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A	Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	105
Tabel 1B	Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	106
Tabel 1C	Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan *Rapid Test Kit* Balai POM di Batam Tahun 2025	107
Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium Balai POM di Batam Tahun 2025	108
Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium Balai POM di Batam Tahun 2025	110
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	111
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	112
Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	113
Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	114
Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	115
Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	116
Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Balai POM di Batam Tahun 2025	119
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam Balai POM di Batam Tahun 2025	120
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik Balai POM di Batam Tahun 2025	121
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	122
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Balai POM di Batam Tahun 2025	123
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam Balai POM di Batam Tahun 2025	124
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Balai POM di Batam Tahun 2025	125
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan Balai POM di Batam Tahun 2025	126
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Balai POM di Batam Tahun 2025	128

Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	129
Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Balai POM di Batam Tahun 2025	130
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Balai POM di Batam Tahun 2025	131
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Balai POM di Batam Tahun 2025	133
Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan Balai POM di Batam Tahun 2025	135
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik Balai POM di Batam Tahun 2025	136
Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	138
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Balai POM di Batam Tahun 2025	141
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Balai POM di Batam Tahun 2025	143
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	144
Tabel 8A	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	145
Tabel 8B	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	146
Tabel 9	Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	148
Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	149
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	150
Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	151
Tabel 12B	Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown* Balai POM di Batam Tahun 2025	152
Tabel 12C	Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Balai POM di Batam Tahun 2025	153
Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	154
Tabel 14	Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	155

Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai POM di Batam Tahun 2025	157
Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat Balai POM di Batam Tahun 2025	163
Tabel 15C	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial Balai POM di Batam Tahun 2025	166
Tabel 15D	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial Balai POM di Batam Tahun 2025	169
Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	170
Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2025	171
Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Batam Tahun 2025	172
Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi Balai POM di Batam Tahun 2025	173
Tabel 18	Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan Balai POM di Batam Tahun 2025	174
Tabel 19A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan Balai POM di Batam Tahun 2025	175
Tabel 19B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia Balai POM di Batam Tahun 2025	176
Tabel 19C	Frekuensi Kasus Keracunan Balai POM di Batam Tahun 2025	177
Tabel 19D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) Balai POM di Batam Tahun 2025	180
Tabel 20	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	181
Tabel 21A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Balai POM di Batam Tahun 2025	182
Tabel 21B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Balai POM di Batam Tahun 2025	183
Tabel 21C	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Batam Tahun 2025	184
Tabel 22A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Batam Tahun 2025	185
Tabel 22B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Batam Tahun 2025	187

Tabel 23A	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam Balai POM di Batam Tahun 2025	188
Tabel 23B	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik Balai POM di Batam Tahun 2025	189
Tabel 23C	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan Balai POM di Batam Tahun 2025	191
Tabel 24	Keterjangkauan Pengawasan Balai POM di Batam Tahun 2025	192
Tabel 25	Jumlah Penduduk Balai POM di Batam Tahun 2025	193
Tabel 26	Sarana dan Prasarana Balai POM di Batam Tahun 2025	198
Tabel 27	Sumber Daya Manusia (SDM) Balai POM di Batam Tahun 2025	199
Tabel 28	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Balai POM di Batam Tahun 2025	200
Tabel 29	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji Balai POM di Batam Tahun 2025	201
Tabel 30	Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi Balai POM di Batam Tahun 2025	202
Tabel 31A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Batam Tahun 2025	206
Tabel 31B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas Balai POM di Batam Tahun 2025	211
Tabel 32	Serfikasi/Akreditasi Balai POM di Batam Tahun 2025	212
Tabel 33A	Kerja Sama Balai POM di Batam Tahun 2025	214
Tabel 33B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi Balai POM di Batam Tahun 2025	215
Tabel 34	Pengadaan Barang/Jasa Balai POM di Batam Tahun 2025	220
Tabel 35	Laporan Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2025	221
Tabel 36	Laporan Penerimaan PNBP Balai POM di Batam Tahun 2025	222
Tabel 37	Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen Balai POM di Batam Tahun 2025	223
Tabel 38	Data Produk Obat dan Makanan Beredar Tahun 2025	224

DAFTAR ISTILAH

ABH	Air Batam Hilir	**OBA**	Obat Bahan Alam
ABK	Analisis Beban Kerja	**OBAS-KK**	Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik
AKK	Angka Kapang Khamir	**OOT**	Obat-obat Tertentu
ALT	Angka Lempeng Total	**OSS**	*Online Single Submission*
ASN	Aparatur Sipil Negara	**PBF**	Pedagang Besar Farmasi
BMN	Barang Milik Negara	**PIRT**	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
BNN	Badan Narkotika Nasional	**PJAS**	Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah
BP Batam	Badan Pengusahaan Batam	**PK**	Penetapan Kadar
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan	**PKK**	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
CAPA	*Corrective and Preventive Action*	**PKS**	Perjanjian Kerja Sama
CDOB	Cara Distribusi Obat yang Baik	**PLN**	Perusahaan Listrik Negara
Cek KLIK	Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa	**PNBP**	Penerimaan Negara Bukan Pajak
CJS	*Criminal Justice System*	**PNS**	Pegawai Negeri Sipil
CPKB	Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik	**POLRI**	Kepolisian Negara Republik Indonesia
CPOB	Cara Pembuatan Obat yang Baik	**POM**	Pengawas Obat dan Makanan
CPOBAB	Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik	**PPABK**	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
CPPB-IRT	Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga	**PPID**	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
CPPOB	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	**PPNS**	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
DAK	Dana Alokasi Khusus	**PPPK**	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
FTZ	*Free Trade Zone* (Kawasan Perdagangan Bebas)	**PSP**	Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku
GKPD	Gerakan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan	**PUG**	Pengarusutamaan Gender
GLP	*Good Laboratory Practice*	**RO**	Rincian Output
IFK	Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota	**SAKA POM**	Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan
IFP	Instalasi Farmasi Pemerintah	**SAPA SEKOLAH**	Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	**SD**	Sekolah Dasar
IP CPPOB	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	**SDM**	Sumber Daya Manusia
IRTP	Industri Rumah Tangga Pangan	**SIPT**	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu
ISO / IEC	*International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission*	**SKE**	Surat Keterangan Ekspor
ITKP	Indeks Tata Kelola Pengadaan	**SKI**	Surat Keterangan Impor
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	**SKL**	Standar Kinerja Laboratorium
KLB KP	Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	**SMA**	Sekolah Menengah Atas
KONAPPZA	Laboratorium Obat dan NAPZA	**SMK**	Sekolah Menengah Kejuruan
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	**SMKPO**	Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan
KPID	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	**SMP**	Sekolah Menengah Pertama
KVA	*Kilovolt Ampere*	**SNI**	Standar Nasional Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat	**SPIMKer**	Sistem Pelaporan Informasi Manajemen Keracunan
MA	Madrasah Aliyah	**SPP-IRT**	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
MBG	Makan Bergizi Gratis / Makanan Bergizi Gratis	**TIE**	Tanpa Izin Edar
MD	Makanan Dalam (Izin Edar BPOM RI)	**TMK**	Tidak Memenuhi Ketentuan
MDMA	Methylenedioxymethamphetamine	**TMS**	Tidak Memenuhi Syarat
MI	Madrasah Ibtidaiyah	**TNI**	Tentara Nasional Indonesia
MoU	*Memorandum of Understanding* (Kesepakatan Bersama)	**UKOT**	Usaha Kecil Obat Tradisional
MPN	*Most Probable Number*	**ULPK**	Unit Layanan Pengaduan Konsumen
MS	Memenuhi Syarat	**UMKM**	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
MTS	Madrasah Tsanawiyah	**UPT**	Unit Pelaksana Teknis
NAPZA	Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya	**UTD**	Unit Transfusi Darah
NUP	Nomor Urut Pencatatan / Pendaftaran	**WBK**	Wilayah Bebas dari Korupsi

HIGHLIGHT 2025

Balai POM di Batam



JANUARI 2025



Pengawasan Uji Coba MBG Batam

06 Januari 2025

Pada tanggal 06 – 13 Januari 2025, Kepala Balai POM di Batam menghadiri rangkaian kegiatan uji coba program MBG di Kota Batam. Kegiatan diawali dengan kehadiran Kepala Balai POM di Batam pada acara uji coba program MBG di SDN 010 Bengkong Kota Batam. Sehari setelahnya, Kepala Balai POM di Batam turut mengikuti rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Kota Batam yang membahas mekanisme pelaksanaan serta peran dan fungsi berbagai pihak dalam menyukseskan program tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2025 bertempat di SMPN 30 Bengkong, petugas Balai POM di Batam melakukan sampling dan pengujian untuk memastikan keamanan pangan yang diberikan kepada para siswa. Diharapkan melalui kegiatan ini, keamanan dan mutu pangan dalam program MBG dapat terjamin serta memberikan manfaat optimal bagi para siswa.

Pelantikan Dewan SAKA POM Batam

12 Januari 2025

Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) Kwarcab Batam telah melakukan pelantikan terhadap 14 anggota Dewan SAKA POM kwarcab Batam bertempat di Aula Balai POM di Batam.



KIE BPOM Batam HUT ke-24

19 Januari 2025



Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Badan Pengawas Obat dan Makanan yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2025, BPOM di Batam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “Cek Produkmu Bersama BPOM di Batam”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan sebelum dikonsumsi.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) dalam memilih produk. Selain itu, petugas juga memberikan informasi terkait ciri-ciri produk yang aman serta cara menghindari produk ilegal dan berisiko bagi kesehatan. Kegiatan KIE ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam memilih serta menggunakan produk obat dan makanan, sehingga dapat melindungi diri dan keluarga dari risiko kesehatan.



Konsultasi Publik RKPD Batam 2026

22 Januari 2025

Balai POM di Batam menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Batam Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Pemerintah Kota Batam. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk membahas rencana kerja pembangunan daerah serta menghimpun berbagai masukan dari instansi lintas sektor

Melalui forum ini, Balai POM di Batam turut memberikan dukungan dan masukan terkait aspek pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan konsultasi publik ini, perencanaan pembangunan daerah dapat tersusun secara lebih komprehensif, sinergis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Batam



Sinergi Balai POM dan Polda Kepri

23 Januari 2025

Batam (23/01/2025), bertempat di kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dilaksanakan pembahasan perjanjian kerja sama antara Balai POM di Batam dan Polda Kepri. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung pengawasan serta penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

Dalam pembahasan tersebut, kedua belah pihak saling memaparkan lingkup kegiatan yang memerlukan dukungan dan perkuatan dari masing-masing pihak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Diharapkan melalui kerja sama ini, koordinasi antar instansi semakin optimal sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat



Sinergi Balai POM dan Bea Cukai Batam

07 Januari 2025

Pada tanggal 07 Januari 2024, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam bersama PPNS Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan audiensi dengan Kepala Bea Cukai Batam di kantor Bea Cukai Batam, Batu Ampar, Kota Batam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan pada pintu-pintu masuk wilayah kerja masing-masing. Selain itu, juga dibahas dukungan terhadap peningkatan ekspor produk UMKM melalui pengawasan oleh petugas Bea Cukai. Diharapkan melalui kegiatan ini, koordinasi antar instansi semakin optimal sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendukung perlindungan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.







Balai POM di Batam ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai bentuk komitmen, Balai POM di Batam hadir dalam rangkaian kegiatan terkait program tersebut. Senin (06/01/2025) Kepala Balai POM di Batam hadir pada acara uji coba program MBG di SDN 010 Bengkong Kota Batam. Sehari setelahnya (07/01/2025) Kepala Balai POM di Batam turut hadir dalam rapat koordinasi terkait program tersebut di Dinas Kesehatan Kota Batam.

Rapat membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan serta peran dan fungsi berbagai lembaga terkait untuk menyukseskan program tersebut. Tidak hanya berhenti disitu, pada tanggal 13 Januari 2025 bertempat di SMPN 30 Bengkong, petugas Balai POM di Batam juga melakukan sampling dan pengujian untuk memastikan keamanan pangan yang diberikan kepada para siswa

Batam - Selasa (14/01/2025) Balai POM di Batam memenuhi undangan dari SMA Kartini Batam untuk memberikan informasi dan edukasi kepada siswa dalam rangkaian Proyek Penguatan Profil Pancasila Bidang Kewirausahaan yang mengambil topik "Merancang Produk Aroma Terapi untuk Mendukung Kesehatan Mental". Kegiatan KIE di sekolah seperti ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para siswa tentang bagaimana memproduksi dan mengedarkan produk yang dihasilkan sesuai dengan peraturan sebagai bekal para siswa yang ingin menjadi wirausaha dibidang obat dan makanan, sehingga dapat menciptakan dan mengedarkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Batam, (7/1/2024) – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam mengadakan audiensi dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam di kantor pengadilan setempat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemitraan dalam sistem peradilan pidana guna meningkatkan penegakan hukum di bidang obat dan makanan, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat terkait keamanan, khasiat, dan mutu produk. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya sinergi dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional

FEBRUARI 2025



Batam (12/02/2025) Dukung UMKM Berdaya Saing, Balai POM di Batam Berikan Pengetahuan terkait Perizinan Pangan Olahan. Balai POM di Batam hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Al Ahmadi *Entrepreneurship Centre* (AEC), sebuah lembaga training kewirausahaan (entrepreneurship) di Batam dan juga *soft skill* untuk manajemen bisnis yang sebelumnya bernama Batam Pos *Entrepreneur School*. Sosialisasi bertema “Penyiapan Izin BPOM untuk Usaha” dilaksanakan di Istana Jamur, Batam Center, Kota Batam dan diikuti oleh 25 orang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan yang ada di Kota Batam.



Batam (18/02/2025) – Balai POM Batam menerima kunjungan dari Sekolah Cahaya Bangsa pada Selasa (18/02/2025). Pada kegiatan ini dilakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 61 siswa-siswi SMP Cahaya Bangsa. Dengan materi pembahasan tentang 5 Kunci Keamanan Pangan yang disampaikan oleh Muhammad Nurhisyam Kurnadi dan Rizki Indriyani, dimana pada penyampaian materi juga dilakukan simulasi bagaimana untuk melakukan pengecekan produk dengan menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, Cek Kedaluwarsa), serta materi terkait Stunting yang disampaikan oleh Ana Fitri, yang diikuti dengan antusias.



Batam (24/02/2025), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Ahli Gizi dari SPPG Sei Beduk Batam menyambangi Balai POM di Batam, untuk berdiskusi dan membahas kemanan pangan seiring dengan dimulainya proses produksi dan penyediaan makanan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh dapur produksi SPPG Sei Beduk Kota Batam. Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui Kolaborasi ini diharapkan setiap SPPG dibawah naungan BGN dapat menyediakan pangan bergizi seimbang dan aman demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, hal ini seiring dengan Motto BPOM yaitu Badan POM Mendunia yang Menjulang, Membumi dan Mengakar untuk Indonesia Emas 2045.



Dalam rangka membangun kesadaran tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau mengenai pentingnya farmakovigilans dalam pemantauan keamanan obat beredar, Balai POM di Batam menggelar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans Kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis Di Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) pada Kamis (27/2/2025) secara *hybrid*. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan tenaga kesehatan dari 45 Saryankes meliputi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kepulauan Riau. Dengan dilaksanakannya KIE ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan komitmen tenaga kesehatan mengenai pentingnya pelaporan farmakovigilans untuk mencapai tujuan jaminan keselamatan pasien (*patient safety*) sebagai salah satu upaya dalam pengawasan keamanan obat serta dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan di wilayah yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat yang beredar di Indonesia.

Batam - Kamis (27/02/25) Bertempat di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Balai POM di Batam menghadiri Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kota Batam. Kegiatan ini digelar dalam rangka Menyelaraskan visi misi Kepala Daerah terpilih, Pemerintah Kota Batam melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam.





Batam-(13/02/25), Kepala Balai POM di Batam, menghadiri acara *Launching* **"Dunia Kopi" dan Pencanangan Kelurahan Bersinar di Kelurahan Muka Kuning,** kegiatan peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom di Kelurahan Muka Kuning, Kota Batam. Dengan tema “Produktif, Berakhlak, Bersinar” Program ini membuka peluang bagi masyarakat rentan penyalahgunaan narkotika untuk meningkatkan produktivitas melalui wirausaha, “Peresmian Dunia Kopi Kampung Madani Bersinar ini merupakan kelanjutan dari pencanangan Kelurahan Muka Kuning sebagai Kelurahan Bersinar pada Juli 2024 silam,” ungkap Kepala BNN RI.



Pada tanggal 11 – 18 Februari 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam telah melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2025 dalam rangka memutus mata rantai pasok peredaran kosmetik viral yang tidak sesuai ketentuan serta berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan daya saing nasional. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh UPT Badan POM dengan sasaran pemeriksaan berupa industri kosmetik, importir kosmetik, badan usaha pemilik notifikasi, pemilik merk kosmetik, klinik kecantikan, dan agen/*reseller* kosmetik.



Tanjungpinang (17/02/25) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kemenkum Kepri) menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan enam orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Notaris yang bertempat di Aula Ismail Salih Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kepala Balai POM di Batam Musthofa Anwari, S.Si., Apt turut hadir pada kegiatan pelantikan tersebut. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik S.H, M.Si, pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melantik 6 PPNS dan 1 Notaris Pengganti, termasuk 1 orang PPNS dari kantor Balai POM di Batam.

Batam - BPOM di Batam mengadakan rapat awal untuk peninjauan ulang Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2024 yang akan disusun sebagai SPP Tahun 2025 pada hari Jumat (14/02/2025). Seluruh petugas pelayanan publik BPOM di Batam berpartisipasi mengikuti kegiatan ini yang bertempat di ruang pertemuan BPOM di Batam. Upaya ini merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan dengan meninjau ulang standar yang ada dengan perkembangan terkini guna memenuhi kebutuhan masyarakat.





Batam-(13/02/25) Bertempat di ruang rapat Kantor Balai POM di Batam diselenggarakan kegiatan simbolis pemusnahan arsip yang dihadiri oleh Kepala Balai POM di Batam, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Arsiparis dan Pengelola Arsip Balai POM di Batam. Kegiatan pemusnahan arsip ini juga diikuti oleh 15 UPT BPOM secara daring yang secara simbolis juga melakukan pemusnahan arsipnya di TW 1 2025 dengan total arsip yang dimusnahkan sebanyak 15.003 berkas arsip.

MARET 2025



Batam (03/03/2025) – Balai POM di Batam bersama Satgas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok serta pengawasan obat dan makanan menjelang Ramadan 1446 H di Kota Batam. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Melalui kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan serta pemantauan terhadap distribusi pangan dan produk lainnya guna mengantisipasi potensi pelanggaran. Upaya ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.



Batam (06/03/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan pengawasan pangan dalam rangka Ramadan melalui program "Pangan Aman, Ramadan Tenang". Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan produk pangan yang beredar di masyarakat guna memastikan keamanan dan mutu pangan selama bulan Ramadan. Selain pengawasan, Balai POM di Batam juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya memilih dan menyediakan pangan yang aman. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perlindungan masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.



Batam (10/03/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam membangun kolaborasi antar lembaga pengawas. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi peningkatan pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.



Batam (17/03/2025) – Balai POM di Batam bersama Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM Kwartir Daerah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan sosial melalui penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kota Batam. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus penguatan peran kader pramuka dalam edukasi keamanan pangan. Melalui kegiatan ini, Balai POM di Batam hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPOM dan gerakan pramuka dalam mendukung program kesehatan masyarakat.

Batam (27/03/2025) – Kepala Balai POM di Batam bersama jajaran melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Batam dalam rangka penguatan dukungan terhadap Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Batam menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di Kota Batam. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program dan meningkatkan perlindungan masyarakat.



APRIL 2025



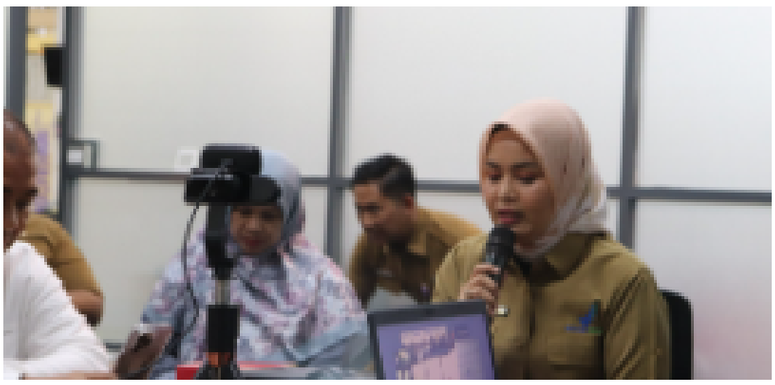
Batam (02/04/2025) – Balai POM di Batam meningkatkan kapasitas tenaga kefarmasian melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Kefarmasian Apotek dan Toko Obat Tingkat Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelayanan kefarmasian berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman terkait pengelolaan obat, pelayanan kepada pasien, serta kepatuhan terhadap regulasi. Peningkatan kapasitas ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas layanan kefarmasian kepada masyarakat.



Batam (10/04/2025) – Kepala Balai POM di Jambi, Musthofa Anwari, S.Si., Apt secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Kepala Balai POM di Batam, Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H pada kegiatan serah terima jabatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Balai POM di Batam. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan pusat dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, serta dilaksanakan secara *hybrid*. Dalam sambutannya, Ully Mandasari menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan penuh integritas dan kolaborasi. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja Balai POM di Batam dalam memastikan obat dan makanan yang beredar di wilayah Kepulauan Riau tetap aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.



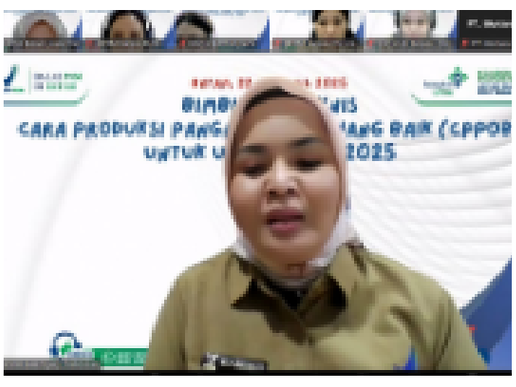
Batam (22/04/2025) – Balai POM di Batam menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui kegiatan pembinaan di Kota Batam. Penekanan ini menjadi bagian dari strategi penguatan sektor UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. Dalam kegiatan tersebut, Balai POM di Batam mendorong peningkatan mutu produk, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan aspek keamanan pangan secara konsisten. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM di wilayah Kepulauan Riau.



Batam (23/04/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan langkah strategis dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran nasional dengan memastikan pelaksanaan program prioritas tetap berjalan optimal. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen menjaga kinerja organisasi di tengah penyesuaian kebijakan fiskal. Melalui penataan ulang perencanaan dan optimalisasi sumber daya, Balai POM di Batam tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.



Batam (23/04/2025) – Balai POM di Batam menyelenggarakan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 di UPT BKN Batam sebagai bagian dari proses penguatan sumber daya manusia. Kegiatan ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem berbasis komputer. Pelaksanaan seleksi ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik serta kinerja pengawasan obat dan makanan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.



Batam (25/04/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku usaha pangan olahan di Kepulauan Riau sebagai bentuk nyata pendampingan UMKM. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha dibekali pemahaman teknis serta aspek regulasi yang harus dipenuhi dalam proses produksi. Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong UMKM menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan mampu bersaing di pasar.



Batam (25/04/2025) – Balai POM di Batam menerima kunjungan edukasi dari siswa SMP IT Imam Syafi'i Batam sebagai bagian dari upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat sejak dini. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan peran dan fungsi BPOM dalam melindungi masyarakat. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai cara memilih produk yang aman, membaca label, serta mengenali produk ilegal. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih sadar dan cerdas dalam memilih produk konsumsi.



Batam (28/04/2025) – Balai POM di Batam memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan audiensi di Kota Batam. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Dalam audiensi tersebut, dibahas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, termasuk pencegahan maladministrasi dan penguatan akuntabilitas. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.



Batam (28/04/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim dan Kader Keamanan Pangan dalam rangka Gerakan Keamanan Pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengawasan pangan secara mandiri di tingkat komunitas. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan pangan, termasuk identifikasi potensi risiko serta langkah-langkah pencegahan. Pembentukan dan penguatan kader ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan pangan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

MEI 2025



Natuna (02/05/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan peninjauan instalasi farmasi pada puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Natuna sebagai bagian dari penguatan pengawasan sarana pelayanan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan tata kelola obat berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap penyimpanan, distribusi, serta pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kefarmasian serta menjamin keamanan dan ketersediaan obat bagi masyarakat di wilayah perbatasan



Batam (05/05/2025) – Balai POM di Batam menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dalam Forum Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Batam. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan aspek pengawasan obat dan makanan terintegrasi dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, Balai POM di Batam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang sehat, aman, dan berdaya saing. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan obat dan makanan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan



Batam (05/05/2025) – Balai POM di Batam mengikuti desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam membangun institusi yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan evaluasi, Balai POM di Batam memaparkan berbagai inovasi, capaian kinerja, serta langkah perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan. Keikutsertaan ini mencerminkan optimisme dalam meraih predikat WBK sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan



Batam (06/05/2025) – Balai POM di Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah strategis dalam memperkuat integritas organisasi menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penguatan pemahaman terkait pencegahan korupsi serta internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai. Upaya ini diharapkan mampu mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan



Batam (07/05/2025) – Balai POM di Batam menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang diikuti oleh 16 sekolah di Kota Batam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembudayaan konsumsi pangan yang aman di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman terkait pemilihan pangan yang aman, pengolahan yang higienis, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi yang sehat di kalangan siswa

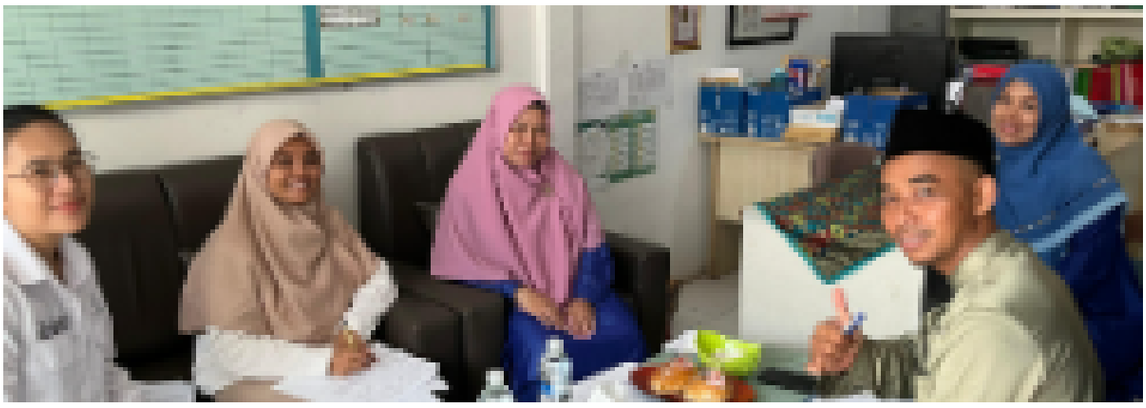


Batam (08/05/2025) – Balai POM di Batam bersama lintas sektor melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada petugas dan pedagang di Pasar Summerland Batu Besar dalam rangka mewujudkan pasar aman. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan di pasar tradisional. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman terkait praktik penanganan pangan yang baik. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan sehat.



Batam (14/05/2025) – Balai POM di Batam menggelar Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk membentuk kader sebagai penggerak budaya keamanan pangan di sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemberdayaan komunitas sekolah guna memperkuat pengawasan pangan secara mandiri. Para kader dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi risiko, melakukan edukasi, serta mendukung pengawasan jajanan, sehingga diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan berkelanjutan

JUNI 2025



Batam (13/06/2025) - Balai POM di Batam memastikan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah berjalan efektif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bentuk pengawasan aktif sekaligus penguatan komitmen seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Melalui evaluasi yang sistematis, Balai POM di Batam dapat mengidentifikasi capaian serta perbaikan yang diperlukan, sehingga pembinaan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut hingga implementasi nyata di lapangan



Batam (18/06/2025) - Balai POM di Batam terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha melalui program pendampingan UMK pangan olahan tahun 2025 sebagai langkah konkret meningkatkan daya saing produk lokal. Fasilitasi yang dilakukan memastikan pelaku usaha memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan, tidak hanya dari sisi administratif tetapi juga teknis dan berkelanjutan. Melalui pendampingan ini, Balai POM di Batam mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menerapkan prinsip keamanan pangan sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas



Batam (13/06/2025) - Balai POM di Batam menegaskan bahwa pembudayaan keamanan pangan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan praktik yang konsisten dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Melalui sinergi yang kuat, Balai POM di Batam mendorong terbentuknya ekosistem sekolah yang mendukung perilaku konsumsi pangan yang aman sebagai investasi jangka panjang bagi generasi yang sehat



Batam (12/06/2025) - Balai POM di Batam melaksanakan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan sebagai langkah strategis menuju sekolah pangan aman. Kegiatan ini memastikan kader yang telah dibentuk mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengedukasi dan mengawasi praktik keamanan pangan di lingkungan sekolah. Dengan penguatan kapasitas kader, Balai POM di Batam mendorong keberlanjutan program secara mandiri dan berdaya guna



Batam (20/06/2025) – Balai POM di Batam memperkuat perlindungan masyarakat melalui sinergi dengan Polda Kepri dalam momentum Hari Bhayangkara ke-79. Kegiatan KIE ini meningkatkan kesadaran tentang keamanan obat dan makanan serta memperluas edukasi ke masyarakat. Kolaborasi ini menegaskan peran BPOM tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam penyediaan informasi yang akurat dan penguatan sistem pengawasan yang responsif bagi kesehatan masyarakat

JULI 2025



Batam (08/07/2025) - Balai POM di Batam menggalang komitmen bersama melalui koordinasi dengan Kelurahan Sambau dalam mewujudkan keamanan pangan di tingkat komunitas. Kegiatan ini menegaskan pendekatan kolaboratif sebagai kunci dalam membangun kesadaran dan praktik keamanan pangan secara berkelanjutan. Dengan melibatkan pemerintah kelurahan, Balai POM di Batam memperluas jangkauan pembinaan hingga ke lapisan masyarakat paling dekat.



Karimun (11/07/2025) - Balai POM di Batam memastikan pengawasan obat berjalan hingga ke wilayah kepulauan dengan melaksanakan pemeriksaan di Tanjung Batu, Kabupaten Karimun. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjangkau wilayah terpencil guna memastikan obat yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Kehadiran langsung di lapangan menjadi bukti bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh tanpa batas wilayah



Batam (11/07/2025) – Balai POM di Batam menunjukkan komitmen pemberantasan narkoba dengan turut serta dalam pemusnahan barang bukti bersama aparat penegak hukum. Keterlibatan ini menegaskan peran aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

AGUSTGUS 2025



Batam (01/08/2025) – Balai POM di Batam telah melaksanakan In House Training (IHT) pada 29 Juli sampai 1 Agustus 2025 dengan tema “Penetapan Kadar Aflatoksin dalam Sediaan Obat Tradisional Sediaan padat secara Kromatografi cair Kinerja Tinggi Detektor Fluoresen”. Kegiatan dibuka oleh kepala Balai POM di Batam, Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H. dan diikuti oleh 4 orang peserta penguji dari Balai POM di Batam. Kegiatan pelatihan menghadirkan narasumber Attin Rachmawati, S.Si., M.Si. dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) Badan POM



Batam (04/08/2025) - Balai POM di Batam memastikan komitmen pelaksanaan program Sapa Sekolah melalui monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) di SMAN 16. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembinaan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut hingga implementasi nyata di lingkungan sekolah. Dengan pengawasan berkelanjutan, Balai POM di Batam mendorong konsistensi penerapan keamanan pangan



Batam (09/08/2025) - Balai POM di Batam mendorong peran Tim Penggerak PKK Kelurahan Tiban Baru sebagai kader keamanan pangan di Kota Batam. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas agen perubahan di masyarakat. Dengan penguatan kapasitas kader, Balai POM di Batam memastikan keberlanjutan pembudayaan pangan aman di tingkat keluarga dan komunitas









Batam (21/08/2025) – Balai POM di Batam menerima kunjungan Tim Penilaian Internal (TPI) selama 19–21 Agustus 2025 untuk verifikasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Kegiatan ini merupakan tahap penting penilaian akhir oleh Inspektorat BPOM RI guna memastikan penerapan reformasi birokrasi, tata kelola bersih, dan peningkatan layanan publik. TPI meninjau fasilitas, mewawancarai pegawai dan pemangku kepentingan, serta memverifikasi dokumen inovasi dan pencegahan korupsi. Melalui evaluasi ini, Balai POM di Batam menargetkan predikat WBK dan menegaskan komitmen terhadap pelayanan profesional, bersih, serta bebas KKN.

Batam (27/08/2025) - Balai POM di Batam memastikan komitmen sekolah dalam menerapkan keamanan pangan melalui sertifikasi sekolah dalam Program Sapa Sekolah. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan telah mencapai tahap implementasi nyata di lingkungan pendidikan. Sertifikasi menjadi indikator bahwa standar keamanan pangan telah diterapkan secara konsisten

Batam (28/08/2025) - Balai POM di Batam melaksanakan sampling obat dan makanan di Kabupaten Karimun dan Kota Batam sebagai bagian dari pengawasan rutin yang menyeluruh. Kegiatan ini memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Pengawasan ini menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat hingga ke seluruh wilayah kerja.

Batam (29/08/2025) - Balai POM di Batam berkomitmen menjaga mutu hasil uji laboratorium melalui pelaksanaan audit surveilen ke-2 ISO 17025:2017. Kegiatan ini memastikan sistem manajemen mutu laboratorium berjalan sesuai standar internasional. Komitmen ini memperkuat keandalan hasil pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengawasan obat dan makanan.

SEPTEMBER 2025



Batam (10/09/2025) – Balai POM di Batam mengawal keamanan pangan dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Batam sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam situasi strategis nasional. Pengawasan yang dilakukan memastikan seluruh pangan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan mutu. Kegiatan ini menegaskan profesionalisme dan kesiapan Balai POM di Batam dalam menjalankan tugas pengawasan pada kegiatan berskala tinggi



Batam (10/09/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan koordinasi operasi gabungan pengawasan barang konsumsi di KPBPB Batam sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan lintas sektor. Kegiatan ini memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku serta mencegah potensi pelanggaran. Sinergi ini memperkuat efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan



Batam (18/09/2025) – Balai POM di Batam melaksanakan pemusnahan limbah B3 berupa reagensia kedaluwarsa dan alat gelas pecah sebagai bentuk kepatuhan terhadap pengelolaan limbah berbahaya. Kegiatan ini memastikan limbah dikelola sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan. Langkah ini menegaskan komitmen terhadap praktik laboratorium yang aman dan bertanggung jawab





Batam (18/09/2025) – Balai POM di Batam bersama Direktorat OTSKKOS Badan POM melaksanakan desk layanan notifikasi kosmetik dengan pelaku usaha sebagai upaya percepatan pelayanan. Kegiatan ini memberikan pendampingan langsung sehingga proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. Langkah ini menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik

Batam (24/09/2025) – Balai POM di Batam menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penggunaan kosmetik yang aman serta pencegahan obat bahan alam berbahaya. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen



Batam (29/09/2025) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan pelantikan pejabat struktural sebagai langkah strategis memperkuat kinerja organisasi dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM di Batam, Ully Mandasari, S.Farm., Apt, M.H, turut mendampingi pelantikan pejabat struktural baru di lingkungan BPOM Batam. Adapun pejabat yang dilantik adalah Rendra Ricahya, S.T., M.M. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, menggantikan Larasti Setyaningtyas, S.Farm., Apt

OKTOBER 2025



Batam (04/10/2025) – Balai POM di Batam bersinergi dengan WHDI dalam mewujudkan keamanan pangan, obat, dan kosmetik melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas. Kegiatan ini memperluas jangkauan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Sinergi ini memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi



Batam (06/10/2025) – Balai POM di Batam berkomitmen mendukung program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dukungan ini menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi pondasi penting dalam keberhasilan program gizi. Peran aktif Balai POM di Batam memastikan pangan yang dikonsumsi memenuhi standar keamanan dan mutu

Batam (14/10/2025) – Balai POM di Batam mewujudkan nilai kesetaraan melalui edukasi keamanan pangan, obat, dan kosmetik bagi komunitas disabilitas. Kegiatan ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses informasi yang setara. Pendekatan inklusif ini memperkuat perlindungan masyarakat secara menyeluruh.







Batam (15/10/2025) – Balai POM di Batam mengedukasi keamanan pangan sejak dini bersama Taman Belajar Gembala Baik sebagai langkah membangun kesadaran sejak usia anak. Kegiatan ini menanamkan pemahaman dasar tentang pentingnya memilih pangan yang aman. Edukasi dini menjadi fondasi dalam membentuk perilaku konsumsi yang sehat

Tanjungpinang (20/10/2025) – Balai POM di Batam memperkuat sinergi melalui audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam mendukung penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Kegiatan ini meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Sinergi ini menjadi kunci dalam penanganan pelanggaran secara terpadu



Batam (31/10/2025) – Balai POM di Batam memberikan rekomendasi dalam upaya menuju Batam bebas stunting sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan menegaskan pentingnya keamanan pangan dalam mendukung pemenuhan gizi. Peran ini memperkuat posisi Balai POM di Batam dalam upaya percepatan penurunan stunting

NOVEMBER 2025



Batam (05/11/2025) - Balai POM di Batam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menegaskan bahwa pengawasan pangan memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas. Sinergi yang dibangun memperkuat efektivitas intervensi dalam upaya penurunan stunting



Dabo Singkep (05/11/2025) - Balai POM di Batam memberikan bimbingan teknis perizinan dan pengelolaan obat di Kabupaten Lingga sebagai langkah konkret meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kefarmasian. Kegiatan ini memastikan pengelolaan obat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menjamin keamanan, mutu, dan khasiat. Pembinaan ini memperluas jangkauan pengawasan hingga ke wilayah kepulauan



Batam (18/11/2025) - Balai POM di Batam meningkatkan kapasitas siswa SMKN 4 Batam dalam analisis pengujian pangan melalui kegiatan edukasi dan praktik langsung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memahami pentingnya keamanan pangan. Pembinaan ini memperluas dampak edukasi hingga ke dunia pendidikan vokasi





Batam (25/11/2025) - Balai POM di Batam melaksanakan monitoring dan evaluasi program GKPD, PPABK, dan Sapa Sekolah sebagai upaya memastikan keberlanjutan gerakan keamanan pangan. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Evaluasi ini memperkuat implementasi program di lapangan

Balai POM di Batam menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Resistensi Antimikroba (AMR) dalam rangka *World Antimicrobial Awareness Week* (WAAW) pada Selasa (20/11/2025) secara *hybrid,* bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan di Balairung Pemprov Kepri ini dibuka oleh Gubernur Ansar Ahmad yang menekankan bahwa AMR sebagai “pandemi senyap” harus ditangani bersama, karena penggunaan antimikroba yang tidak tepat telah menyebabkan banyak kematian dan menjadi tanggung jawab semua pihak



Batam, (30/11/2025) – Balai POM di Batam kembali mengedukasi masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dikemas dalam bentuk pameran di Grand Mall Batam pada 27–30 November 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berizin edar

DESEMBER 2025



Batam (01/12/2025) – Balai POM di Batam bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI menyelenggarakan *Coaching* dan Desk Registrasi pada 27–28 November 2025 untuk jemput bola registrasi pangan olahan dan sertifikasi IP CPPOB. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung kemudahan dan percepatan perizinan bagi pelaku usaha pangan olahan



Semarang (05/12/2025) – Balai POM di Batam meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi Zona Integritas oleh KemenPAN-RB. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2025 di Semarang. Capaian ini menunjukkan keberhasilan penerapan reformasi birokrasi serta komitmen menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Batam (22/12/2025) — Balai POM di Batam menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Polresta Barelang sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Kegiatan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penegak hukum serta memastikan barang berbahaya tidak kembali beredar, sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi antar instansi.









Batam (03/12/2025) — Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di SMPN 53 Batam sebagai upaya membudayakan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menanamkan kesadaran sejak dini kepada siswa untuk memilih pangan yang aman. Edukasi ini memperkuat pembentukan perilaku konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab

Natuna (05/12/2025) — Balai POM di Batam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Natuna dalam intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini memastikan pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu pada periode peningkatan konsumsi masyarakat. Sinergi ini memperkuat kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat



Batam (08/12/2025) — Balai POM di Batam menggelar *capacity building* bertema “Bersinergi dalam Harmoni, Berkinerja dengan Loyalitas” untuk memperkuat kompetensi, kekompakan, dan nilai ASN BerAKHLAK guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini didukung Dharma Wanita Persatuan dan diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan publik melalui SDM yang adaptif, solid, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan masyarakat

Tanjungpinang (11/12/2025) — Balai POM di Batam meraih penghargaan Badan Publik Informatif tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi yang transparan dan mudah diakses, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.





Batam (17/12/2025) — Balai POM di Batam hadir dalam rapat koordinasi Satgas Pangan Polda Kepri menjelang Hari Raya Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri sebagai bentuk kesiapsiagaan pengawasan. Kegiatan ini memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dalam mengantisipasi peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Sinergi ini memperkuat perlindungan masyarakat pada periode rawan

Batam (12/12/2025) — Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam menyelenggarakan kegiatan Pemusnahan Reagensia/Media Kedaluwarsa, Alat Tulis Kantor (ATK) Usang, serta Limbah Reagen Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang bertempat di PT. Desa Air Cargo Batam, Telaga Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau.



Batam (18/12/2025) — Kepala Balai POM di Batam memberikan penghargaan kepada petugas pelayanan publik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi. Kegiatan ini mendorong peningkatan motivasi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penghargaan ini memperkuat budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan

ASPEK POSITIF BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN 2025

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Batam telah menerima penghargaan/ apresiasi sebagai aspek positif yang berasal dari Badan POM maupun lintas sektor lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek Positif / Penghargaan
1	Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Instansi Vertikal Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
3	Pegawai Berprestasi Tahun 2025 a.n. Shinta Putri Wisuda, S.Farm., Apt
4	BPOM Heroes Terbaik I serta Kenaikan Pangkat Luar Biasa Periode Oktober 2025 a.n. Shinta Putri Wisuda, S.Farm., Apt
5	Pengelolaan BMN terbaik 1 tingkat satker di wilayah kerja KPKNL Batam Tahun 2025
6	Balai Terbaik 3 Pada Kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan oleh Direktur Cegah Tangkal Badan POM RI
7	Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus dan September Tahun Anggaran 2025 oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Riau
8	Penghargaan UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat
9	Penghargaan UMKM Binaan Balai POM di Batam sebagai UMKM Inovasi Terbaik pada ajang "Inovasi UMKM: Produk Aman dan Berkelanjutan”
10	Apresiasi atas Peran Aktif dan Kerja Sama Strategis dalam Mendorong Transformasi Mutu dan Keamanan Produk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau
11	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
12	Terbaik Ke-6 Unit Pelaksana Teknis Dengan Nilai Pengawasan Kearsipan 91,91 Kategori AA (Sangat Memuaskan) di Lingkungan Badan POM Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN











BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Institusi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara kelembagaan, BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pembentukan dan penyelenggaraan organisasi UPT BPOM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, UPT BPOM terdiri atas Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM yang diklasifikasikan berdasarkan beban kerja dan cakupan wilayah pengawasan.

Dalam struktur tersebut, Balai POM di Batam memiliki peran strategis mengingat wilayah kerjanya berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik geografis kepulauan serta berbatasan langsung dengan negara lain. Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah ini memiliki dinamika peredaran obat dan makanan yang tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi tersebut menempatkan Balai POM di Batam pada posisi yang krusial dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, sebaran wilayah kerja yang terdiri dari pulau-pulau dengan aksesibilitas yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan, yang memerlukan strategi yang adaptif, dukungan sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Secara kedudukan, Balai POM di Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Dalam pelaksanaan tugasnya, pembinaan teknis dilakukan oleh Deputi terkait, sedangkan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Batam dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

Dengan posisi strategis tersebut, Balai POM di Batam tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pengawasan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat serta penguatan daya saing produk obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan ekonomi strategis.

Balai POM di Batam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja yang meliputi Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan wilayah kerja Loka POM di Tanjungpinang yang berada di bawah koordinasi Balai POM di Batam. Pembagian wilayah kerja tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah pengawasan masing-masing UPT.

Wilayah kerja Balai POM di Batam memiliki karakteristik yang unik karena mencakup kawasan perbatasan negara, wilayah kepulauan, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta didukung pelabuhan laut dan bandar udara internasional menjadikan wilayah kerja Balai POM di Batam memiliki mobilitas orang dan barang yang tinggi. Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengawasan obat dan makanan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko sebagaimana diuraikan pada subbab Tantangan dan Isu Strategis.

1.2 Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Batam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk serta sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian laboratorium terhadap obat dan makanan;
- Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, serta pengaduan masyarakat;

- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengawasan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Pendukung

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai POM di Batam didukung oleh unsur organisasi sebagai berikut:

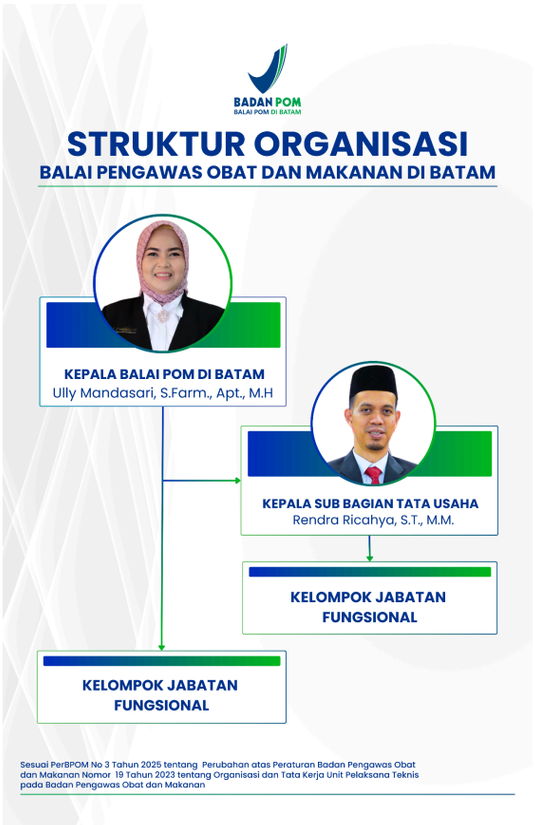
1. Subbagian Tata Usaha

   Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, program dan anggaran, keuangan, barang milik negara, teknologi informasi dan komunikasi, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, persuratan, serta kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan pengawasan menyeluruh (*end-to-end control*), mulai dari pengawasan *pre-market*, post-market, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, hingga penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

1.3 Visi dan Misi UPT BPOM

Sebagai unit pelaksana teknis dari Badan POM, Visi dan Misi Balai POM di Batam sejalan dengan Visi dan Misi Badan POM yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Visi Badan POM yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan tersebut menjadi landasan bagi Balai POM di Batam dalam menyusun program, kegiatan, serta indikator kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan strategis BPOM.

1.4 Budaya organisasi

Budaya Organisasi Balai POM Di Batam sebagaimana Budaya Organisasi Badan POM, merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, Budaya Organisasi diseimbangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

a. **Profesional**
   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi;
b. **Integritas**
   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
c. **Kredibilitas**
   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
d. **Kerjasama Tim**
   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
e. **Inovatif**
   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini
f. **Responsif/Cepat Tanggap**
   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Internalisasi budaya organisasi tersebut menjadi fondasi dalam membangun organisasi yang profesional, berintegritas, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima guna mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

1.5 Tantangan dan isu strategis

Balai POM di Batam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja yang meliputi Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan wilayah kerja Loka POM di Tanjungpinang. Meskipun demikian, secara geografis dan ekonomi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan yang erat melalui aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas penduduk sehingga memberikan pengaruh terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota dengan luas wilayah sekitar 252.601 km², dimana sekitar 95% merupakan wilayah perairan dan sekitar 5% berupa daratan. Wilayah ini terdiri atas 2.408 pulau serta berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Karakteristik tersebut menjadikan wilayah kerja Balai POM di Batam memiliki kompleksitas pengawasan yang tinggi sehingga memerlukan strategi pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko.

Selain sebagai wilayah perbatasan negara, wilayah kerja Balai POM di Batam juga mencakup Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Keberadaan kawasan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan

industri, namun pada saat yang sama meningkatkan potensi masuk dan beredarnya obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

Karakteristik KPBPB juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Tingginya arus pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif tanpa menghambat kelancaran arus logistik dan perdagangan. Selain itu, perbedaan mekanisme lalu lintas barang antara kawasan FTZ dan daerah pabean lainnya memerlukan penguatan koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan sinkronisasi tata laksana pengawasan bersama BP Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait agar pengawasan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Karakteristik wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Sebaran wilayah yang luas, keterbatasan akses transportasi, ketergantungan pada moda transportasi laut dan udara, serta kondisi cuaca yang memengaruhi konektivitas antarwilayah berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. Kondisi tersebut memerlukan strategi pengawasan yang adaptif, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah kerja secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital telah mengubah pola distribusi obat dan makanan. Pemanfaatan marketplace, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya memperluas jalur distribusi produk, termasuk produk yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri. Kondisi ini meningkatkan risiko peredaran produk ilegal, produk tanpa izin edar, produk palsu, dan produk yang tidak memenuhi ketentuan melalui media daring sehingga diperlukan penguatan pengawasan siber, fungsi intelijen, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan yang lebih cepat, efektif, dan responsif.

Dari sisi objek pengawasan, Balai POM di Batam memiliki cakupan pengawasan yang luas yang meliputi sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian, serta berbagai objek pengawasan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kerja. Karakteristik wilayah menunjukkan bahwa aktivitas distribusi lebih dominan dibandingkan kegiatan produksi sehingga meningkatkan potensi masuknya produk dari luar daerah maupun luar negeri. Selain itu, tingginya jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya industri rumah tangga pangan, memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, posisi strategis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan internasional dan jalur perdagangan dunia juga meningkatkan kerentanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu (OOT). Kondisi tersebut menuntut penguatan fungsi intelijen, penindakan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan laboratorium yang andal guna mendukung pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

Balai POM di Batam juga memiliki peran strategis sebagai laboratorium pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau yang telah terakreditasi sesuai standar ISO/IEC 17025. Meningkatnya kompleksitas pengawasan, kebutuhan pengujian laboratorium, perkembangan teknologi analisis, serta tuntutan pelayanan publik memerlukan penguatan kapasitas laboratorium melalui modernisasi peralatan, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode pengujian, serta penguatan peran laboratorium dalam mendukung regionalisasi laboratorium BPOM.

Selain itu, efektivitas pengawasan tidak dapat diwujudkan hanya oleh Balai POM di Batam. Diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, BP Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI, Polri, BNN, Kejaksaan, instansi pelabuhan dan bandar udara, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis tersebut, Balai POM di Batam menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan obat dan makanan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta wilayah perbatasan internasional.
2. Penguatan pengawasan terhadap lalu lintas pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan di kawasan FTZ melalui harmonisasi kebijakan dan sinergi lintas sektor.
3. Peningkatan keterjangkauan pengawasan pada wilayah kepulauan, pulau terluar, dan wilayah dengan aksesibilitas terbatas melalui pengawasan berbasis risiko.
4. Penguatan pengawasan perdagangan digital, media sosial, dan cross-border e-commerce untuk mencegah peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
5. Penguatan pencegahan dan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu (OOT), melalui peningkatan fungsi intelijen, laboratorium, dan koordinasi lintas sektor.
6. Penguatan pengawasan berbasis risiko terhadap sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian, serta produk yang beredar di masyarakat.
7. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, serta penguatan kolaborasi pentahelix dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

8. Penguatan kapasitas laboratorium pengujian melalui modernisasi peralatan, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode pengujian, serta dukungan terhadap regionalisasi laboratorium BPOM.
9. Penguatan kapasitas organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, transformasi digital, pemanfaatan data, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko-risiko baru di bidang obat dan makanan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Balai POM di Batam guna mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif, efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat, aman, dan berdaya saing.

BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN







BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

Pengawasan obat dan makanan merupakan fungsi strategis pemerintah yang memiliki lingkup luas dan kompleks, karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat serta memiliki sensitivitas publik yang tinggi. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, melainkan harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis mulai dari hulu hingga hilir, mencakup aspek bahan baku, proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga produk siap dikonsumsi.

Sejalan dengan dinamika globalisasi dan kebijakan perdagangan terbuka, sistem pengawasan dituntut untuk mampu menjangkau seluruh rantai distribusi, mulai dari *entry point* hingga peredaran di pasar. Perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat global maupun nasional, memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat, tepat, dan berbasis risiko dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk ilegal, substandar, dan palsu.

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*/FTZ), memberikan tantangan yang spesifik dan lebih kompleks dalam pelaksanaan pengawasan. Posisi Batam sebagai pintu gerbang internasional dengan arus lalu lintas barang yang sangat tinggi, serta adanya kemudahan fiskal dalam sistem FTZ, meningkatkan potensi masuknya produk dari luar negeri secara masif. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, berpotensi menjadi celah bagi masuk dan beredarnya produk obat dan makanan ilegal, tidak memenuhi syarat (TMS), maupun barang palsu.

Selain itu, perkembangan perdagangan berbasis digital dan *e-commerce* turut memperluas jalur distribusi produk obat dan makanan yang tidak selalu melalui jalur distribusi konvensional. Hal ini menambah kompleksitas pengawasan, karena peredaran produk dapat terjadi secara cepat, masif, dan sulit dideteksi secara langsung di lapangan.

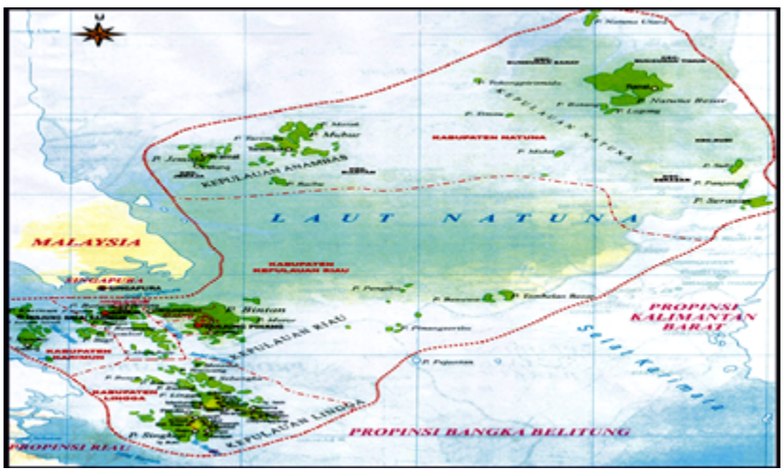
Di sisi lain, karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang didominasi oleh wilayah perairan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau dengan akses yang terbatas turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan aksesibilitas antar wilayah berdampak pada efektivitas jangkauan pengawasan serta membutuhkan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis prioritas wilayah risiko.

Secara administratif, wilayah kerja Balai POM di Batam berada dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau dengan pusat pemerintahan provinsi berkedudukan di Kota Tanjungpinang, sementara Balai POM di Batam berlokasi di Kota Batam sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kondisi ini menyebabkan adanya pemisahan antara pusat pemerintahan daerah dengan lokasi operasional pengawasan, sehingga memerlukan intensitas koordinasi lintas wilayah yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor strategis eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan meliputi tingginya arus barang lintas negara, implementasi kebijakan FTZ, perkembangan perdagangan digital, karakteristik wilayah kepulauan, serta tingginya sensitivitas publik terhadap isu keamanan produk.

Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk memperkuat pengawasan pada titik masuk (*entry point*), menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi digital, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pengawasan pada wilayah prioritas dengan tingkat risiko tinggi.

2.1.1. Data Umum Wilayah Kerja



Gambar 2. Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia dengan wilayah meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km^2, 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Wilayah kerja Balai POM di Batam meliputi Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan wilayah kerja dari Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Perjalanan dari Kantor Balai POM di Batam menuju Kabupaten atau Kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki waktu tempuh yang bervariasi. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah kerja terjauh pengawasan Kota Batam dapat ditempuh selama ± 4 jam, Kabupaten Karimun selama ± 6 jam, Kabupaten Lingga selama ± 21 jam, dan Kabupaten Kepulauan Anambas ± 24 jam. Adapun wilayah kerja terjauh dengan waktu tempuh terlama adalah Kabupaten Natuna yang dapat ditempuh hingga ± 42 jam.

Tabel 1. Pola Transportasi dan Waktu Tempuh ke Wilayah Kerja

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Dari UPT Batam ke Kabupaten/Kota			
			Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
1	Batam	Batu Ampar	27,4 Km	34 menit	Darat	1 Hari
2	Batam	Lubuk Baja	24 Km	32 menit	Darat	1 Hari
3	Batam	Bengkong	27 Km	36 menit	Darat	1 Hari
4	Batam	Batu Aji	38,2 Km	49 menit	Darat	1 Hari
5	Batam	Sagulung	32,2 Km	41 menit	Darat	1 Hari
6	Batam	Galang	70,4 Km	1 Jam 24 menit	Darat	1 Hari
7	Batam	Bulang	40,9 Km	51 menit	Darat	1 Hari
8	Batam	Sekupang	32,3 Km	42 menit	Darat	1 Hari
9	Batam	Sungai Beduk	27,8 Km	32 menit	Darat	1 Hari

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Dari UPT Batam ke Kabupaten/Kota			
			Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
10	Batam	Belakang Padang	50 Km	2 Jam	Darat	1 Hari
11	Batam	Batam Kota	19 Km	27 menit	Darat	1 Hari
12	Batam	Nongsa	13,8 Km	20 menit	Darat	1 Hari
13	Karimun	Karimun Kota	117 Km	4 Jam	Darat, Laut	3 Hari
14	Karimun	Meral	129,1 Km	4,5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
15	Karimun	Tebing	136, 5 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
16	Karimun	Kundur	146 Km	4,5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
17	Karimun	Kundur Utara	163 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
18	Karimun	Kundur Barat	157 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
19	Karimun	Moro	89 Km	3 Jam	Darat, Laut	3 Hari
20	Karimun	Durai	130 Km	6 Jam	Darat, Laut	3 Hari
21	Karimun	Buru	119 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
22	Karimun	Belat	110 Km	6 Jam	Darat, Laut	3 Hari
23	Karimun	Ungar	150 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
24	Karimun	Meral Barat	130 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
25	Karimun	Selat Mendaun	110 Km	5 Jam	Darat, Laut	3 Hari
26	Karimun	Sugie	100 Km	4 Jam 30 menit	Darat, Laut	3 Hari
27	Natuna	Bunguran Barat	545 Km	2 Jam 35 Menit	Udara, Darat dan Laut	3-5 Hari
28	Natuna	Bunguran	600 Km	4 Jam 15	Udara,	3-5 Hari

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Dari UPT Batam ke Kabupaten/Kota			
			Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
		Batubi		Menit	Darat dan Laut	
29	Natuna	Bunguran Selatan	580 Km	3 Jam 35 Menit	Udara, Darat dan Laut	3-5 Hari
30	Natuna	Bunguran Tengah	575,4 Km	3 Jam 05 Menit	Udara, Darat dan Laut	3-5 Hari
31	Natuna	Bunguran Timur	550 KM	2 Jam 40 Menit	Udara, Darat	3-5 Hari
32	Natuna	Bunguran Timur	600 Km	3 Jam 55 Menit	Udara, Darat dan Laut	3-5 Hari
33	Natuna	Bunguran Utara	595 Km	4 Jam 05 Menit	Udara, Darat dan Laut	3-5 Hari
34	Natuna	Midai	411 Km	20 Jam 25 Menit	Laut	3-5 Hari
35	Natuna	Pulau Laut	710 Km	72 jam	Laut	3-5 Hari
36	Natuna	Pulau Panjang	631 Km	34 Jam	Laut	3-5 Hari
37	Natuna	Pulau Seluan	530 Km	3 Jam 40 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
38	Natuna	Pulau Tiga	540 Km	3 Jam 50 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
39	Natuna	Pulau Tiga Barat	540,5 Km	3 Jam 50 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
40	Natuna	Serasan	650 Km	40 Jam	Laut	7 Hari

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Dari UPT Batam ke Kabupaten/Kota			
			Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
41	Natuna	Serasan Timur	660 km	45 Jam	Laut	7 Hari
42	Natuna	Suak Midai	400 Km	20 Jam	Laut	7 Hari
43	Natuna	Subi	620 Km	35 Jam	Laut	3-5 Hari
44	Anambas	Siantan	300,7 Km	3 jam 50 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
45	Anambas	Siantan Timur	370 Km	5 Jam 10 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
46	Anambas	Siantan Tengah	374,1 Km	5 Jam 45 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
47	Anambas	Siantan Utara	376 Km	5 Jam 50 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
48	Anambas	Palmatak	320 Km	4 Jam 20 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
49	Anambas	Kute Siantan	328,2 Km	4 Jam 32 Menit	Udara, Laut	3-5 Hari
50	Anambas	Jemaja	295,6 Km	2 Jam 20 Menit	Udara, Darat	3-5 Hari
51	Anambas	Jemaja Timur	305,1 Km	2 Jam 50 Menit	Udara, Darat	3-5 Hari
52	Anambas	Jemaja Barat	317 Km	3 Jam 16 Menit	Udara, Darat	3-5 Hari
53	Lingga	Singkep	250 Km	12 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
54	Lingga	Singkep Barat	260 Km	13 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
55	Lingga	Singkep Selatan	265 Km	13 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
56	Lingga	Singkep Pesisir	270 Km	14 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
57	Lingga	Lingga Daik	270 Km	14 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Dari UPT Batam ke Kabupaten/Kota			
			Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
58	Lingga	Lingga Timur	275 Km	15 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
59	Lingga	Lingga Utara	280 Km	15 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
60	Lingga	Senayang	300 Km	18 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
61	Lingga	Selayar	310 Km	18 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
62	Lingga	Kepulauan Posek	320 Km	20 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
63	Lingga	Katang Bidare	330 Km	20 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
64	Lingga	Bakung Serumpun	330 Km	20 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
65	Lingga	Temiang Pesisir	340 Km	22 Jam	Darat , Laut	4-5 Hari
66	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	96 Km	3 Jam	Darat Laut	1 Hari

2.1.2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Sasaran pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam mencakup berbagai jenis sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja, meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, serta sarana pelayanan kefarmasian dan pelayanan kesehatan. Luasnya cakupan objek pengawasan ini mencerminkan kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja yang berbentuk kepulauan.

Secara kuantitatif, jumlah sarana yang diawasi mencapai sekitar 3.473 sarana produksi dan 4.027 sarana distribusi. Komposisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga beragam dari sisi jenis sarana dan karakteristik risikonya. Dalam konteks wilayah Kepulauan Riau, struktur sarana produksi menunjukkan tidak adanya industri farmasi skala besar maupun industri bahan baku obat, sehingga profil produksi di wilayah ini lebih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah.

Dominasi tersebut terlihat dari jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mencapai 3.382 unit, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha berada

pada skala kecil dengan tingkat pemenuhan standar yang beragam. Kondisi ini memerlukan pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pembinaan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, sarana distribusi memiliki jumlah yang lebih besar dan lebih beragam, dengan dominasi pada distribusi pangan olahan yang mencapai 1.869 sarana. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran produk pangan memiliki intensitas tinggi di masyarakat dan menjadi salah satu titik kritis dalam pengawasan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Batam lebih didominasi oleh aktivitas distribusi dibandingkan produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa titik risiko utama berada pada tahapan peredaran produk (post-market), terutama pada produk pangan olahan yang memiliki keterpaparan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, tidak adanya industri farmasi skala besar memperkuat bahwa sumber risiko utama berasal dari jalur distribusi, termasuk potensi masuknya produk dari luar wilayah maupun luar negeri. Kondisi ini semakin kompleks dengan karakteristik wilayah kepulauan yang menyebabkan sebaran sarana pengawasan tidak merata dan sulit dijangkau secara simultan.

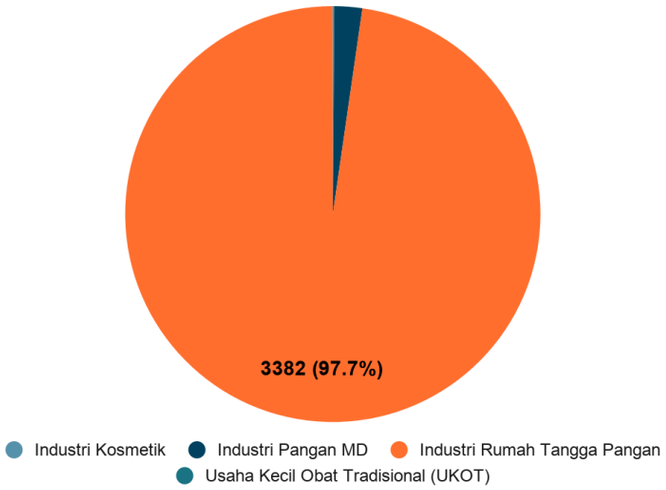
Dengan jumlah sasaran yang besar, beragam, dan tersebar, pengawasan tidak dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, Balai POM di Batam menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based approach), dengan memprioritaskan pada sarana dan komoditas berisiko tinggi, khususnya distribusi pangan olahan dan pelaku usaha skala kecil.

Tabel 2. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan

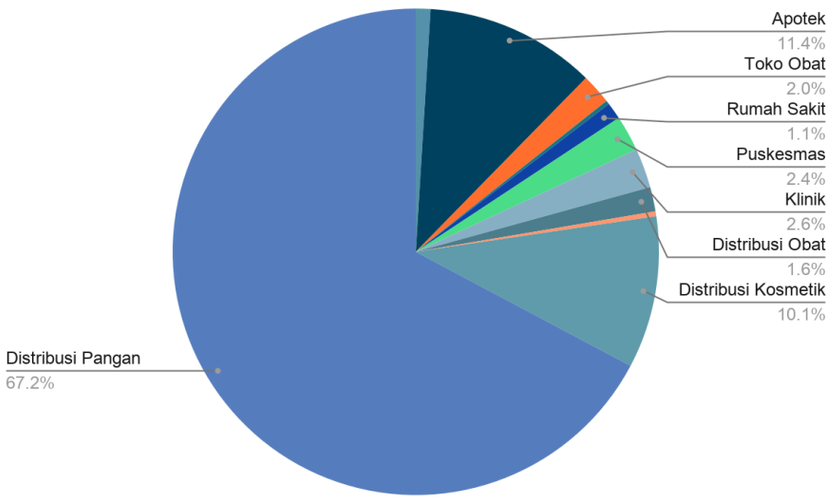
No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana						Total
		Kota Batam	Kab. Karimun	Kab. Lingga	Kab. Kep. Anambas	Kab. Natuna	Kota Tanjung Pinang	
1	Jumlah industri farmasi	0	0	0	0	0	-	0
2	Jumlah industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/ Unit Pengelola Darah	3	1	0	1	1	0	6
3	Jumlah industri OBA	0	0	0	0	0	-	0

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana						Total
		Kota Batam	Kab. Karimun	Kab. Lingga	Kab. Kep. Anambas	Kab. Natuna	Kota Tanjung Pinang	
4	Jumlah industri ekstrak bahan alam	0	0	0	0	0	-	0
5	Jumlah usaha kecil obat tradisional	1	0	0	0	0	-	1
6	Jumlah usaha mikro obat tradisional	0	0	0	0	0	-	0
7	Jumlah industri farmasi yang memproduksi kuasi	0	0	0	0	0	-	0
8	Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0	-	0
9	Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0	-	0
10	Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0	-	0
11	Jumlah industri kosmetik	5	0	0	0	0	-	5
12	Jumlah industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0	0	-	0
13	Jumlah industri pangan	63	11	0	1	1	-	76
14	Jumlah industri rumah tangga pangan	2464	525	187	48	158	-	3382
15	Jumlah pedagang besar farmasi	29	1	0	0	0	-	30

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana						Total
		Kota Batam	Kab. Karimun	Kab. Lingga	Kab. Kep. Anambas	Kab. Natuna	Kota Tanjung Pinang	
16	Jumlah apotek	267	37	14	14	14	-	345
17	Jumlah toko obat	30	32	1	0	5		68
18	Jumlah instansi farmasi pemerintah	2	1	1	1	1	1	7
19	Jumlah rumah sakit	21	3	2	3	2		31
20	Jumlah puskesmas	107	50	48	49	14	-	268
21	Jumlah klinik	164	5	0	0	1	-	170
22	Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam	349	80	19	10	22	-	480
23	Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan	394	81	22	9	18	-	524
24	Jumlah fasilitas distribusi kosmetik	183	34	2	17	15	-	251
25	Jumlah klinik kecantikan	56	8	3	2	1	-	70
26	Jumlah sarana peredaran pangan	1537	94	75	43	120	-	1869
27	Jumlah desa	64	54	84	54	77	-	333
28	Jumlah sekolah							
	- Jumlah Sekolah	500	150	90	80	100	120	1040
	- Jumlah Murid	200.000	45.000	18.000	15.000	20.000	45.000	343.000
29	Jumlah Pasar	18	14	8	6	7	9	62
30	Jumlah Dapur SPPG	135	30	5	3	12	-	185



Gambar 3. Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Gambar 4. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

2.2. Lingkungan Internal

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam didukung oleh berbagai komponen internal yang mencakup aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, serta dukungan operasional lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fungsi administratif, pemeriksaan dan penyidikan, pelayanan publik, serta pengujian laboratorium.

1. Gedung

Dari sisi sarana, Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor dengan kondisi yang berbeda, di mana gedung utama dalam kondisi baik dan memadai, sementara gedung pendukung dalam kondisi rusak ringan dan memerlukan optimalisasi. Ketersediaan lahan tambahan memberikan peluang pengembangan sarana di masa mendatang. Kedua gedung kantor, yaitu gedung kantor NUP 2 dengan lokasi di Jl.

Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa - Kota Batam dan gedung kantor NUP 8 Lokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam.

- Gedung kantor NUP 2 Balai POM di Batam memiliki kondisi baik dengan luas tanah 3.117 m^2 dan luas bangunan 4.364 m^2, dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019 dan Penetapan Lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam dengan Nomor PL 28.27050421.C1 tanggal 04 Juni 2008.
- Gedung kantor NUP 8 Balai POM di Batam memiliki kondisi rusak ringan dengan luas tanah 3000 m^2 dan luas gedung 180 m^2 yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertifikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam dan Penetapan Lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam dengan Nomor PL 215050395 tanggal 15 September 2015.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan seluas 2598.71 m^2 dengan Penetapan Lahan Nomor 215050395 tanggal 15 September 2015 dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

2. Rumah Dinas

Balai POM di Batam belum memiliki rumah dinas sendiri. Rumah yang ditempati Kepala Balai POM di Batam saat ini adalah rumah tinggal di Perumahan Bukit Citra Lestari Blok G No. 2 dengan status sewa. Namun demikian, belum tersedianya rumah dinas serta keterbatasan kendaraan operasional, terutama yang telah berusia lama atau dalam kondisi rusak, menjadi salah satu kendala dalam mendukung mobilitas pengawasan di wilayah kepulauan.

3. Sumber Air

Sumber Air Balai POM di Batam berasal dari ABH yaitu Air Batam Hilir dengan rentang jumlah pemakaian 100-200 m3. Balai POM di Batam memiliki Reservoir Air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan gangguan massal dalam penyediaan air bersih.

4. Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 197 KVA dan 4,4 KVA untuk penerangan jalan di gedung kantor. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 250 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

5. Sarana Komunikasi

Dari sisi utilitas dan komunikasi, kondisi relatif memadai dan telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik dan komunikasi kelembagaan. Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (bpom.batam), Youtube dan Facebook (Balai POM di Batam).

6. Alat Angkutan Bermotor

Balai POM di Batam memiliki alat angkutan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendukung tugas & fungsi, sebagai berikut:

Tabel 3. Kendaraan Operasional

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Kondisi
1	3020102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI GC415V-APV DLX	2009	Rusak Berat
2	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA TGN40R-GKMDKD 21	2009	Baik
3	3020102003	3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI APV GC415V SDX Automatic	2010	Baik
4	3020102003	4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T	2013	Rusak Berat
5	3020102003	5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota All New Kijang Innova 2.0	2016	Baik

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Kondisi
			Kebawah)	Q M/T		
6	3020104001	3	Sepeda Motor	Yamaha Freego 125standar d 2023	2023	Baik
7	3020104001	4	Sepeda Motor	Yamaha Free GO 125cc (Biru)	2024	Baik
8	3020105018	1	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	ISUZU NHR 55 CO E2-1	2013	Baik
9	3020105018	2	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Gran Max 1.5 STD, AC dan PS S402RP PMRFJJ	2017	Baik
10	3020105113	1	Kendaraan Unit Penyelidikan dan Penyidikan	Isuzu / NLR 71TL (Incinerator)	2018	Baik
11	3020105113	2	Kendaraan Unit Penyelidikan dan Penyidikan	ISUZU / NMR71TSD	2018	Baik

7. Sumber Daya Manusia

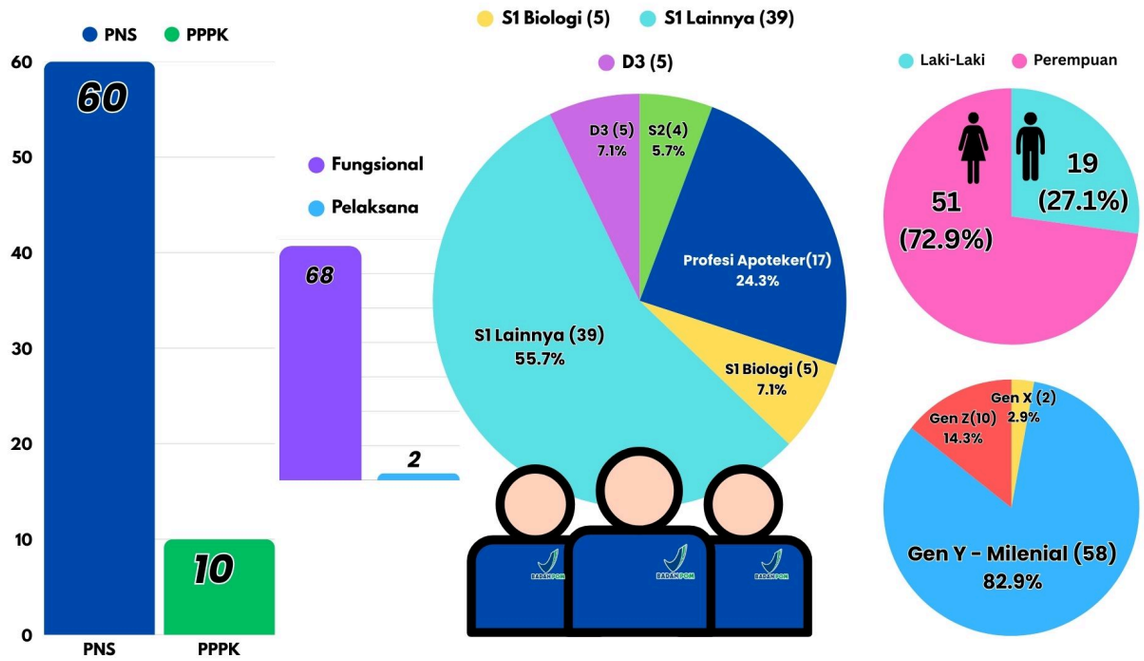
Selain dukungan sarana dan prasarana, efektivitas pelaksanaan tugas Balai POM di Batam juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia. Secara umum, komposisi pegawai didominasi oleh tenaga teknis dan fungsional yang mendukung pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta pengujian laboratorium.

Dari sisi kuantitas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal organisasi, sehingga terdapat kesenjangan antara beban kerja dan kapasitas SDM. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, termasuk melalui penentuan prioritas kegiatan serta optimalisasi peran pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Di sisi lain, komposisi SDM yang didominasi oleh usia produktif memberikan peluang dalam penguatan kapasitas organisasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi

informasi, pengembangan inovasi, serta adaptasi terhadap dinamika pengawasan yang terus berkembang.

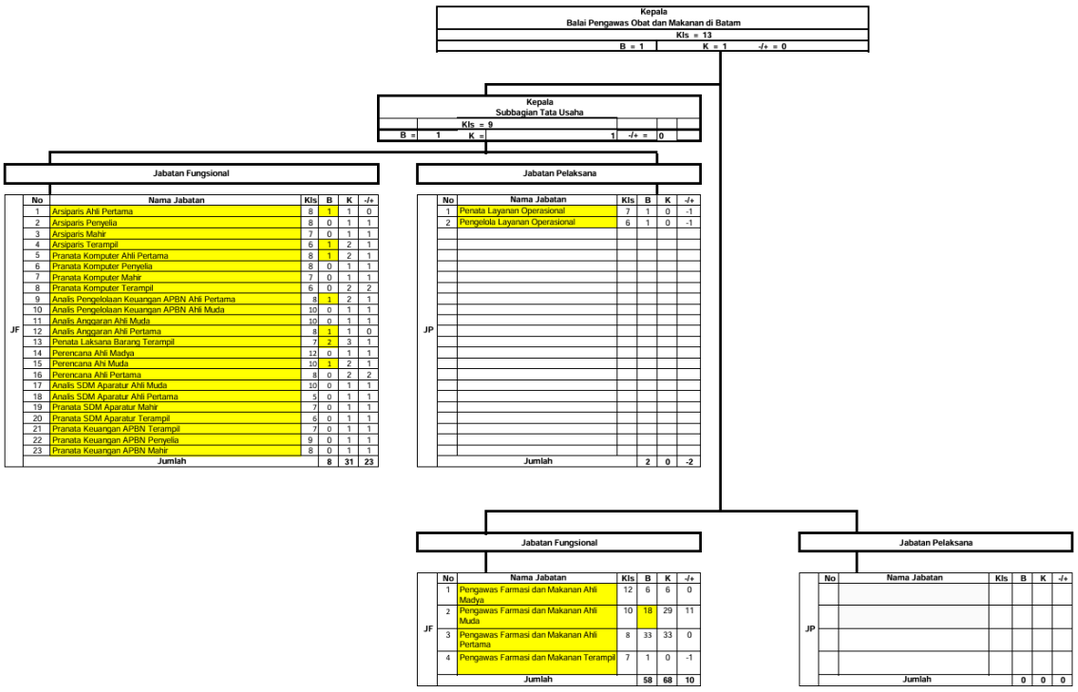
Data Terpilah Jumlah pegawai Balai POM di Batam per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 70 pegawai yang terdiri dari 60 (enam puluh) PNS dan 10 (sepuluh) PPPK. Dari 70 pegawai jumlah laki-laki sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai dan perempuan sebanyak 51 (lima puluh satu) pegawai yang didominasi oleh generasi Y (milenial) sebanyak 58 (lima puluh delapan) pegawai, generasi Z sebanyak 10 (sepuluh) pegawai gen X sebanyak 2 (dua) pegawai, dengan rincian menduduki jabatan struktural sebanyak 2 (dua) pegawai , Pejabat Fungsional sebanyak 68 (enam puluh delapan) pegawai , dan Pelaksana sebanyak 2 (dua) pegawai. Berikut profil pegawai dan daftar pegawai Balai POM di Batam



Gambar 5. Komposisi SDM Balai POM di Batam

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Sarjana Lainnya menempati porsi terbesar yaitu 55,71 % sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan D3 hanya 7,14 %. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja dapat dilihat pada Tabel 28.

Terkait kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dapat dilihat pada infografis berikut:



	No	Nama Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF	1	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
	2	Arsiparis Penyelia	8	0	1	1
	3	Arsiparis Mahir	7	0	1	1
	4	Arsiparis Terampil	6	1	2	1
	5	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	2	1
	6	Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	1
	7	Pranata Komputer Mahir	7	0	1	1
	8	Pranata Komputer Terampil	6	0	2	2
	9	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	2	1
	10	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	1	1
	11	Analis Anggaran Ahli Muda	10	0	1	1
	12	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	1	1	0
	13	Penata Laksana Barang Terampil	7	2	3	1
	14	Perencana Ahli Madya	12	0	1	1
	15	Perencana Ahli Muda	10	1	2	1
	16	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	2
	17	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	0	1	1
	18	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	9	0	1	1
	19	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	1
	20	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	1
	21	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	1
	22	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	1	1
	23	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	1
		Jumlah		8	31	23

	No	Nama Jabatan	Kls	B	K	-/+
JP	1	Penata Layanan Operasional	7	1	0	-1
	2	Pengelola Layanan Operasional	6	1	0	-1
		Jumlah		2	0	-2

	No	Nama Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF	1	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	6	6	0
	2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	18	29	11
	3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	33	33	0
	4	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	7	1	0	-1
		Jumlah		58	68	10

	No	Nama Jabatan	Kls	B	K	-/+
JP						
		Jumlah		0	0	0

Gambar 6. Peta Jabatan Balai POM di Batam

Berdasarkan Peta Jabatan tersebut dapat terlihat dari total ABK 101 pegawai, dengan jumlah pegawai per-Desember 2025 adalah 70 pegawai, didapatkan GAP sebesar 31 pegawai sehingga pemenuhan jumlah SDM di Balai POM di Batam baru terpenuhi sebesar 69,30% saja.

8. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan berbasis ilmiah, peran laboratorium menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kualitas dan kredibilitas hasil pengawasan. Sejak tahun 2022, Badan POM telah menerapkan kebijakan regionalisasi laboratorium, di mana Balai Besar/Balai POM serta Loka POM dikelompokkan dalam beberapa region berdasarkan kedekatan geografis dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Balai POM di Batam tergabung dalam Regional Medan, bersama dengan beberapa unit kerja lain di wilayah Sumatera. Dalam skema ini, Balai POM di Batam tidak hanya melaksanakan pengujian untuk kebutuhan internal wilayah kerja, tetapi juga menerima penugasan pengujian regional sesuai dengan pembagian komoditas dan kapasitas laboratorium. Penugasan tersebut antara lain meliputi pengujian obat untuk kelas terapi tertentu serta pengujian cemaran pada komoditas pangan olahan.

Implementasi regionalisasi laboratorium memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan beban kerja pengujian. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan sampel dari wilayah lain di luar wilayah kerja Balai POM di Batam, di samping tetap

dilaksanakannya pengujian rutin, pengujian investigasi, serta pengujian sampel dari pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik.

Secara umum, kapasitas pengujian laboratorium Balai POM di Batam didukung oleh beberapa kelompok laboratorium dengan karakteristik beban kerja yang berbeda. Laboratorium Obat dan NAPZA (KONAPPZA) didukung oleh 5 orang tenaga penguji dengan total pengujian mencapai 739 sampel dan 1.542 parameter uji dalam satu tahun, dengan rata-rata kemampuan kerja sebesar 148 sampel per orang atau setara 308 parameter per orang.

Laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik (OBAS-KK) memiliki 9 orang tenaga penguji dengan total pengujian sebanyak 762 sampel, yang berasal dari kombinasi sampel rutin, regional, investigasi, serta sampel dari pihak ketiga. Rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji pada kelompok ini mencapai 85 sampel per orang atau 358 parameter per orang dalam satu tahun.

Sementara itu, Laboratorium Pangan dan Air didukung oleh 5 orang tenaga penguji dengan jumlah pengujian sebanyak 239 sampel dan 880 parameter uji, dengan rata-rata kemampuan kerja sebesar 48 sampel per orang dan 176 parameter per orang. Adapun Laboratorium Mikrobiologi memiliki 4 orang tenaga penguji dengan total pengujian mencapai 865 sampel dan 3.743 parameter, dengan rata-rata kemampuan kerja sebesar 173 sampel per orang atau 748 parameter per orang, yang merupakan beban parameter tertinggi dibandingkan laboratorium lainnya.

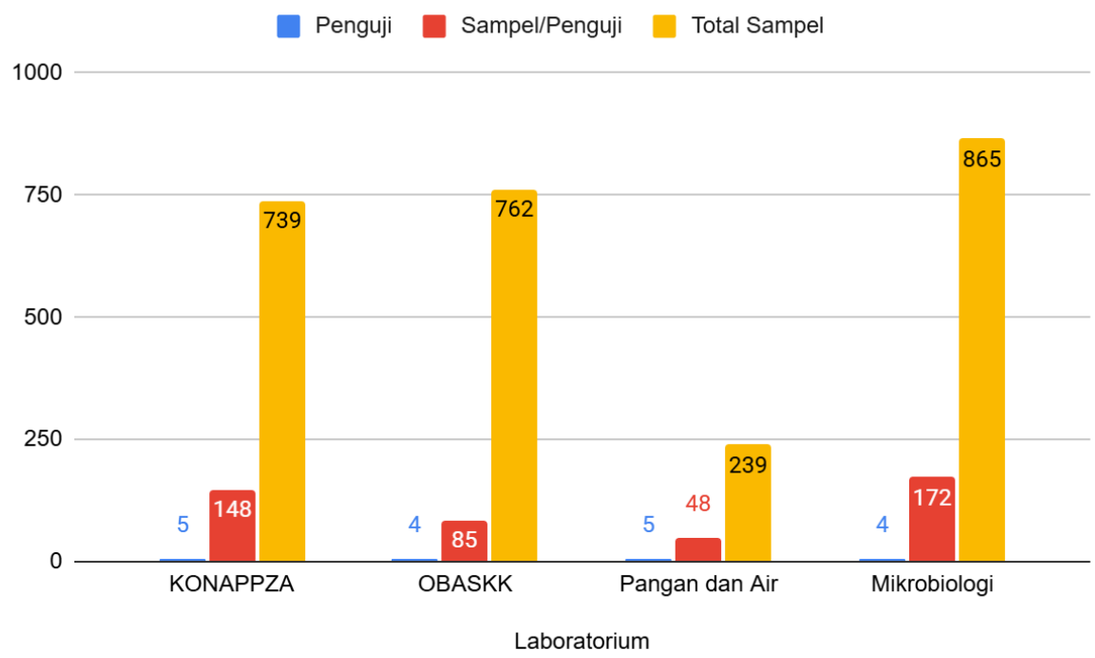
Data tersebut menunjukkan bahwa beban kerja laboratorium tidak hanya tinggi dari sisi jumlah sampel, tetapi juga dari kompleksitas parameter pengujian, terutama pada laboratorium mikrobiologi yang memiliki karakteristik pengujian dengan variasi parameter yang lebih luas.

Berdasarkan profil kemampuan kerja tenaga penguji tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kondisi strategis sebagai berikut:

- Tingginya beban kerja laboratorium, terutama akibat penugasan regionalisasi yang menambah volume pengujian di luar beban kerja rutin;
- Ketimpangan beban kerja antar laboratorium, khususnya pada laboratorium mikrobiologi yang memiliki beban parameter paling tinggi;
- Keterbatasan jumlah tenaga penguji, yang belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas sampel;
- Meningkatnya tuntutan kualitas dan kecepatan layanan pengujian, baik untuk kepentingan pengawasan maupun pelayanan publik;
- Peran laboratorium sebagai *bottleneck* kritis dalam keseluruhan siklus pengawasan (pre-market dan post-market).

Kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa:

- diperlukan optimalisasi manajemen beban kerja laboratorium, termasuk dalam penentuan prioritas pengujian berbasis risiko;
- perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga penguji, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis;
- diperlukan pengembangan sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis teknologi, untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kualitas hasil pengujian;
- perlu adanya dukungan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, termasuk peralatan dan bahan uji;
- diperlukan sinkronisasi yang kuat dalam sistem regionalisasi, agar distribusi beban kerja antar unit lebih seimbang.



Gambar 7. Diagram penguji dan sampel tiap laboratorium

9. Uji Profisiensi Dan Uji Banding Antar Laboratorium

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi ISO 17025:2017, Balai POM di Batam secara konsisten menjaga mutu dan keandalan hasil pengujian melalui partisipasi aktif dalam uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang bertujuan memastikan bahwa hasil pengujian yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, presisi, dan konsistensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PPPOMN dengan total 11 parameter uji yang diikuti oleh seluruh laboratorium, dengan hasil yang menunjukkan kinerja laboratorium dalam kategori memuaskan hingga

linier. Selain itu, Balai POM di Batam juga berpartisipasi dalam uji banding antar laboratorium yang diselenggarakan oleh beberapa Balai Besar POM lainnya, yang diikuti oleh laboratorium OBAS-KK dan KONAPZA, dengan hasil yang juga menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Partisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding ini tidak hanya menjadi indikator pemenuhan standar mutu laboratorium, tetapi juga menjadi sarana evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pengujian. Hasil yang konsisten menunjukkan bahwa sistem mutu laboratorium Balai POM di Batam telah berjalan dengan baik dan mampu menjaga kepercayaan terhadap hasil pengujian yang dihasilkan.

Keikutsertaan Balai POM di Batam dalam uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium memberikan jaminan bahwa hasil pengujian yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan secara akurat. Konsistensi hasil yang memuaskan juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja laboratorium. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas laboratorium, serta mendukung keseragaman standar hasil pengujian dalam sistem regionalisasi laboratorium.Data Uji Profisiensi dan uji banding antar laboratorium yang diikuti oleh Laboratorium Balai POM di Batam secara lengkap tersaji pada Tabel 30.

10. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Ketersediaan dan kondisi peralatan laboratorium merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan pengujian yang akurat dan andal. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 302 Tahun 2023, Balai POM di Batam termasuk dalam kategori UPT BPOM Kelompok 3 dalam standar kemampuan laboratorium.

Pada tahun 2025, hasil penilaian Standar Kinerja Laboratorium (SKL) menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan peralatan laboratorium Balai POM di Batam mencapai 84,2%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum peralatan laboratorium telah memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu ditingkatkan.

Secara lebih rinci, pemenuhan peralatan untuk pengujian kimia mencapai sekitar 77,7%, dengan sebagian kecil peralatan mengalami kerusakan ringan maupun berat. Kondisi serupa juga terjadi pada peralatan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, di mana masih terdapat peralatan yang belum optimal karena mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan atau penggantian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kapasitas peralatan telah memadai, namun keberlanjutan fungsi peralatan menjadi faktor penting yang perlu

mendapat perhatian, khususnya dalam mendukung peningkatan beban kerja pengujian yang terus meningkat.

Kondisi pemenuhan peralatan laboratorium yang relatif memadai namun belum optimal menunjukkan bahwa keberlangsungan operasional laboratorium sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan keandalan peralatan yang digunakan. Adanya peralatan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, berpotensi menghambat kelancaran proses pengujian, terutama di tengah peningkatan beban kerja laboratorium. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui pemeliharaan yang berkelanjutan serta peremajaan peralatan, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pengujian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Data peralatan yang dimiliki oleh BPOM di Batam dapat dilihat pada tabel 31A dan 31B.

11. Daftar Inventaris Kantor

Inventaris kantor merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Batam. Inventaris yang dimiliki mencakup berbagai sarana penunjang, antara lain gedung perkantoran, kendaraan operasional, peralatan laboratorium, perlengkapan kerja, sarana komunikasi, serta perangkat pengolahan data.

Secara umum, ketersediaan inventaris telah mampu mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, baik yang bersifat administratif maupun teknis. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas pengawasan serta karakteristik wilayah kerja yang menantang, kebutuhan terhadap sarana penunjang yang lebih optimal menjadi semakin penting.

Beberapa komponen inventaris, khususnya kendaraan operasional dan peralatan tertentu, menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian dalam hal pemeliharaan maupun penggantian. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama dalam menjangkau wilayah kerja yang luas dan berbasis kepulauan.

Ketersediaan inventaris kantor secara umum telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Batam, namun masih diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Kondisi beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan maupun penggantian menunjukkan adanya kebutuhan penguatan manajemen aset secara lebih terstruktur. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan sarana tertentu dapat berdampak pada efektivitas mobilitas pengawasan serta kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, pengelolaan inventaris yang baik serta perencanaan kebutuhan sarana prasarana yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara rinci dipaparkan pada Tabel 26.

12. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

Balai POM di Batam pada tahun 2025 telah memiliki berbagai sertifikasi dan akreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi serta pemenuhan standar yang berlaku. Sertifikasi dan akreditasi tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penerapan sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa Balai POM di Batam telah memiliki mekanisme kerja yang terstandar dalam menjamin konsistensi proses dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, akreditasi ISO/IEC 17025:2017 menegaskan kompetensi laboratorium pengujian dalam menghasilkan data yang valid, andal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengawasan.

Selain itu, penerapan ISO 45001:2018 menunjukkan bahwa Balai POM di Batam telah mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh pegawai. Penerapan ISO 37001:2016 juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan, sebagai bagian dari upaya penguatan integritas organisasi.

Secara keseluruhan, sertifikasi dan akreditasi yang dimiliki tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan terhadap standar formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, baik dari sisi pelayanan publik, pengawasan, maupun pengelolaan internal. Implementasi berbagai sistem manajemen tersebut mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efektif, transparan, dan terukur.

Dengan demikian, keberadaan sertifikasi dan akreditasi ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kredibilitas Balai POM di Batam sebagai institusi pengawas obat dan makanan yang profesional dan berintegritas.

Data lengkap terkait sertifikasi dan akreditasi yang dimiliki Balai POM di Batam disajikan pada Tabel 32.

13. Kerjasama berupa kesepakatan bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui skema Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini menjadi instrumen strategis dalam memperluas

jangkauan pengawasan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah kerja yang memiliki karakteristik khusus.

Kerja sama yang dilaksanakan mencakup berbagai sektor, antara lain lembaga penyiaran, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga mencakup kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pertukaran data dan informasi, serta penguatan regulasi dan koordinasi kebijakan.

Kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada pengawasan isi siaran yang berkaitan dengan publikasi, promosi, dan iklan obat serta makanan. Melalui kerja sama ini, dilakukan koordinasi pengawasan isi siaran, pertukaran data dan temuan, serta pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sinergi ini mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap konten publikasi dan iklan, serta mendukung perlindungan masyarakat dari informasi yang tidak sesuai ketentuan.

Di sisi lain, kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada upaya pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Kolaborasi ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan, serta penguatan jejaring pengawasan terpadu. Kerja sama ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan peredaran obat ilegal di wilayah Kepulauan Riau.

Balai POM di Batam juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Melalui tim ini, dilakukan penguatan koordinasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat, serta pengembangan jejaring pengawasan terpadu di tingkat provinsi. Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan secara terintegrasi.

Selain itu, kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, seperti Pemerintah Kabupaten Lingga, difokuskan pada pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemantauan, evaluasi, pemberian arahan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan yang lebih dekat dengan masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di daerah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan tidak hanya dilakukan secara sektoral, tetapi melalui kolaborasi lintas sektor

yang terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat kompleksitas pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik sebagai wilayah perbatasan dan kawasan perdagangan internasional.

Dengan demikian, kerja sama yang terjalin memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas jangkauan intervensi, serta memperkuat perlindungan masyarakat. Ke depan, penguatan sinergi lintas sektor akan terus menjadi salah satu strategi utama dalam menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis.

Data lengkap terkait kerja sama yang dilaksanakan Balai POM di Batam disajikan pada Tabel 33A.

14. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam memperoleh berbagai penghargaan dan rekognisi sebagai bentuk pengakuan atas kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik. Penghargaan tersebut mencerminkan capaian kinerja yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

Capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Predikat ini menunjukkan komitmen organisasi dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta sistem pengendalian internal yang efektif. Selain itu, penghargaan dalam keterbukaan informasi publik menegaskan bahwa Balai POM di Batam telah mampu mengelola informasi secara transparan dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat.

Pengakuan terhadap kinerja individu dan organisasi juga tercermin dari penghargaan pegawai berprestasi serta capaian dalam ajang internal BPOM, seperti BPOM Heroes dan kategori kinerja teknis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Di bidang pengelolaan sumber daya, penghargaan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta capaian nilai IKPA yang optimal menunjukkan bahwa Balai POM di Batam telah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan.

Selain itu, penghargaan pada sektor pelayanan publik, termasuk kategori pelayanan prima, menunjukkan bahwa Balai POM di Batam terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dalam inovasi dan pengembangan UMKM, yang mencerminkan peran aktif organisasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing produk lokal.

Secara keseluruhan, berbagai penghargaan yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Batam telah diakui secara luas, baik dari aspek tata kelola, pelayanan publik, pengawasan teknis, maupun pengelolaan sumber daya. Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan demikian, capaian penghargaan dan rekognisi ini memperkuat posisi Balai POM di Batam sebagai unit kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu beradaptasi dalam menghadapi dinamika pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks.

15. Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Pengadaan dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pengadaan barang dan jasa kontraktual dengan nilai di atas Rp50.000.000,- dilaksanakan sebanyak 18 paket kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing sebanyak 17 paket, sedangkan 1 paket dilakukan melalui pengadaan langsung. Pelaksanaan pengadaan ini melibatkan 12 penyedia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Kota Batam, Karimun, Banten, DKI Jakarta, dan Pekanbaru. Hal ini menunjukkan keterbukaan akses pasar serta kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan.

Dari sisi pelaksanaan, seluruh kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan (100%), dengan periode kontrak yang berjalan dari 31 Desember 2024 hingga 31 Desember 2025. Realisasi nilai pengadaan barang dan jasa kontraktual mencapai Rp6.239.930.395,-, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung operasional organisasi.

Kinerja pengadaan juga tercermin dari capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang memperoleh nilai 100 dari target 95 berdasarkan penilaian Biro Umum Badan POM.

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan di Balai POM di Batam telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara strategis, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pengawasan, memperkuat sarana dan prasarana, serta mendukung percepatan kinerja organisasi. Selain itu, keterlibatan penyedia dari berbagai wilayah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekosistem pengadaan nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Balai POM di Batam tahun 2025 tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan kinerja pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tabel Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada Tabel 34.

16. Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Balai POM di Batam mengelola anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total pagu sebesar Rp21.814.332.000,-. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan anggaran, Balai POM di Batam memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 pada bulan Agustus dan September tahun 2025 dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran telah berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi struktur anggaran, alokasi terbesar terdapat pada belanja barang yang digunakan untuk mendukung operasional pengawasan, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal yang berperan dalam penguatan sarana dan prasarana. Komposisi ini mencerminkan fokus organisasi dalam memastikan keberlangsungan layanan serta peningkatan kapasitas pengawasan di wilayah kerja.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp17.617.374.429,- atau sebesar 80,76% dari total pagu. Secara rinci, realisasi belanja pegawai mencapai 99,97% yang menunjukkan stabilitas dalam pemenuhan hak pegawai. Sementara itu, realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing mencapai 68,97% dan 91,30% dari total pagu yang tersedia, mencerminkan tingkat serapan yang cukup baik dalam mendukung kegiatan operasional dan penguatan infrastruktur.

Jika dilihat dari sumber anggaran, realisasi penggunaan anggaran Rupiah Murni mencapai Rp16.754.271.762,- atau sebesar 82,17% dari pagu yang tersedia, sedangkan realisasi PNBP mencapai Rp863.102.667,- atau sebesar 60,58%. Perbedaan tingkat realisasi ini dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan anggaran, dimana PNBP lebih bergantung pada kebutuhan layanan dan permintaan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan adanya kebijakan pemblokiran pagu sebesar Rp4.195.123.000,-. Namun demikian, apabila dihitung berdasarkan pagu efektif, tingkat realisasi anggaran mencapai 99,99%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah optimal sesuai dengan kapasitas dan ruang fiskal yang tersedia.

Secara strategis, pengelolaan anggaran tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai POM di Batam telah mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja organisasi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan program pengawasan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran Balai POM di Batam tidak hanya mencerminkan tingkat serapan, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya negara. Tabel Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel 35.

17. Laporan Penerimaan PNBP

Pada tahun anggaran 2025, Balai POM di Batam berhasil mengelola dan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari layanan pengawasan obat dan makanan serta penerimaan lainnya secara akuntabel dan transparan. Sumber PNBP meliputi pendapatan dari jasa pengawasan obat dan makanan, penjualan peralatan dan mesin, serta penerimaan kembali belanja dari tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.639.231.128,- atau sebesar 147,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.111.210.000,-. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam pemanfaatan potensi penerimaan negara, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan layanan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, penerimaan PNBP mengalami peningkatan sebesar 11,78%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kegiatan lelang Barang Milik Negara (BMN) serta peningkatan layanan jasa pengawasan, khususnya pada pengujian sampel pihak ketiga yang mengalami

penambahan parameter uji, termasuk pengujian MDMA yang mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

Kontribusi terbesar terhadap PNBP berasal dari jasa pengawasan obat dan makanan yang mencapai Rp1.576.473.296,-, yang terdiri dari layanan sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa peran laboratorium Balai POM di Batam semakin strategis dalam mendukung layanan publik berbasis pengujian yang berkualitas dan terpercaya.

Selain itu, terdapat pula penerimaan dari hasil penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang BMN, serta penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang dari tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan ini mencerminkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, termasuk dalam proses penatausahaan dan pengembalian kelebihan pembayaran.

Secara strategis, capaian PNBP yang melampaui target menunjukkan bahwa Balai POM di Batam tidak hanya berperan sebagai unit pengawasan, tetapi juga sebagai unit layanan yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Optimalisasi PNBP ini sekaligus menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta penguatan fungsi laboratorium dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.

Dengan demikian, pengelolaan PNBP di Balai POM di Batam tahun 2025 mencerminkan kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan, akuntabilitas, dan kontribusi strategis terhadap negara. Tabel Laporan Penerimaan PNBP dapat dilihat pada Tabel 36.

18. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian integral dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Implementasi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai bentuk komitmen operasional, Balai POM di Batam telah menetapkan Rencana Kegiatan Sub Kelompok Kerja PUG Tahun 2025–2026 melalui Surat Keputusan Kepala Balai. Dokumen ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan telah mempertimbangkan perspektif gender secara sistematis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Implementasi PUG di Balai POM di Batam dilakukan melalui pendekatan responsif gender yang mencakup beberapa aspek utama. Pertama, setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, baik dari

sisi pegawai sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, materi kegiatan yang inklusif, serta kebijakan dan mekanisme kerja yang adaptif.
Kedua, pengawasan tidak hanya berfokus pada objek produk atau sarana, tetapi juga memperhatikan karakteristik sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap risiko dan dampak pengawasan berdasarkan perspektif gender.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan, Balai POM di Batam memperhatikan proporsi keterlibatan peserta laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesempatan yang setara serta mendorong partisipasi aktif dari kedua kelompok.

Keempat, dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan maupun sasaran layanan, dilakukan pemetaan berbasis gender sehingga solusi yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

Kelima, pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan aspek jangkauan dan aksesibilitas, termasuk kemudahan akses bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung seperti ruang laktasi, ruang ramah anak, aksesibilitas bagi disabilitas, serta fasilitas pelayanan publik yang inklusif.

Keenam, Balai POM di Batam secara aktif mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam diskusi, pelatihan, dan pendampingan usaha, guna menciptakan keseimbangan peran dalam ekosistem pengawasan obat dan makanan.

Implementasi PUG juga terintegrasi dalam berbagai kegiatan utama yang menjadi Rincian Output (RO) Balai POM di Batam, antara lain layanan sertifikasi, kegiatan KIE, layanan informasi, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, program PJAS aman, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), serta pendampingan UMKM.

Dari sisi pelaksanaan layanan publik, Balai POM di Batam memastikan bahwa seluruh layanan terbuka untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan sertifikasi, informasi, maupun pendampingan. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat

variasi komposisi partisipasi yang dipengaruhi oleh karakteristik sektor dan peran masing-masing gender di lapangan.

Pada kegiatan KIE, akses layanan bersifat terbuka sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan sangat bergantung pada karakteristik peserta yang hadir. Sementara itu, pada layanan informasi, tidak terdapat perbedaan perlakuan, sehingga manfaat layanan dapat dirasakan secara merata.

Dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, Balai POM di Batam telah menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, antara lain ruang laktasi, ruang ramah anak, fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, serta sarana pendukung kenyamanan di ruang layanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang inklusif.

Pada program-program berbasis masyarakat seperti PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan PPABK, pendekatan gender juga telah diterapkan, meskipun dalam beberapa kegiatan masih terdapat variasi proporsi partisipasi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan peran komunitas setempat. Hal ini menjadi perhatian dalam upaya perbaikan ke depan.

Secara khusus, pada kegiatan pendampingan UMKM, terlihat adanya dinamika partisipasi gender yang cukup signifikan. Pada tahap sosialisasi keamanan pangan dan perizinan berusaha, partisipasi didominasi oleh perempuan sebesar 84,5%, sedangkan laki-laki sebesar 15,5%. Hal ini mencerminkan tingginya keterlibatan perempuan pada tahap awal peningkatan pengetahuan.

Selanjutnya, pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) CPPOB, komposisi peserta menjadi lebih seimbang dengan partisipasi perempuan sebesar 60,7% dan laki-laki sebesar 39,3%. Pada tahap lanjutan, yaitu Bimtek CPPOB tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan partisipasi laki-laki menjadi 75%, sementara perempuan sebesar 25%.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran dan peningkatan keterlibatan laki-laki dalam proses pemenuhan standar keamanan pangan. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) telah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya didominasi oleh salah satu gender.

Secara keseluruhan, implementasi PUG di Balai POM di Batam telah berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam berbagai aspek kegiatan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal pengaturan teknis, pengumpulan data terpilah yang lebih sistematis, serta peningkatan sensitivitas gender dalam setiap tahapan kegiatan.

Ke depan, implementasi PUG akan terus diperkuat melalui pengembangan kebijakan internal yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi yang lebih mendalam dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan dapat memberikan manfaat yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam nomor HK.02.02.3B.10.25.6023 tentang Rencana Kegiatan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Balai POM di Batam Tahun 2025-2026, kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang responsif gender digambarkan sebagai berikut:

1. Responsif pada kebutuhan dari masing-masing pelaksana kegiatan (pegawai) dan sasaran kegiatan (pengguna layanan publik, pelaku usaha, mitra lintas sektor, masyarakat umum, kelompok rentan dll) yang telah dipilah (dengan variabel minimal laki-laki dan perempuan). Bentuk respon dari pemenuhan kebutuhan dapat mencakup penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana, materi, kegiatan baru, kebijakan terobosan, pendampingan hukum, penangguhan, pedoman/aturan baru/revisi, peningkatan kompetensi, dll.
2. Melihat objek pengawasan tidak terbatas pada sarananya/ produknya tapi juga sumber daya manusia dan karakter demografi nya baik pada penanggung jawab sarana, pemilik usaha tersebut, konsumennya, korbannya dst, untuk kemudian digali isu gendernya.
3. Memperhatikan proporsi kepesertaan kegiatan sosialisasi, KIE, bimbingan teknis, workshop, lokakarya, pelatihan, dll (terutama yang memiliki kuota kepesertaan) dengan mempertimbangkan populasi
4. Memperhatikan persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi dari masing-masing pelaksana kegiatan (pegawai) dan sasaran kegiatan (pengguna layanan publik, pelaku usaha, mitra lintas sektor, masyarakat umum, kelompok rentan, dll) yang telah dipilah (dengan variabel minimal laki-laki dan perempuan) dan dilakukan pendekatan solusi tindak lanjut yang disesuaikan dengan persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi.
5. Memperhatikan jangkauan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

6. Mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki di berbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan yang berkaitan dengan responsif gender meliputi Rincian Output (RO) sebagai berikut:

1. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan
2. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE
3. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan
4. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan
5. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan
6. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
7. Desa Pangan Aman
8. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
9. UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar

1. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT

   Layanan publik dalam rangka sertifikasi yang dilakukan Balai POM di Batam terbuka untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. (tidak ada pembatasan). Oleh karena itu manfaat layanan sertifikasi Balai POM di Batam seharusnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun pada sisi lain komposisi gender beberapa perusahan yang terlibat didominasi laki-laki dan pihak yang mendapatkan tugas dari tempatnya bekerja untuk mengikuti kegiatan Balai POM di Batam adalah laki-laki menyebabkan partisipasi dari laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

2. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

   Pelaksanaan KIE memberikan akses yang terbuka untuk semua baik laki-laki maupun perempuan (tidak ada pembatasan), oleh karena itu manfaat KIE Balai POM di Batam seharusnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Untuk KIE yang pesertanya bukan undangan seperti kegiatan di pameran maka porsi peserta laki-laki dan perempuan tidak ada yang bisa mengendalikan karena yang diberikan KIE adalah masyarakat yang datang ke tempat pameran.

3. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT

   Akses terhadap layanan yang diberikan Balai POM di Batam terbuka baik untuk perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki kesempatan yang sama. Pelayanan Balai POM di Batam akan bermanfaat baik untuk perempuan ataupun laki-laki.

4. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

   Balai POM di Batam telah menyediakan sarana sarana khusus untuk perempuan dan kelompok rentan seperti:

   Sarana khusus di ruang layanan yaitu tempat duduk khusus perempuan dan kaum rentan, kursi roda serta tongkat;

   Sarana di ruang laktasi seperti lemari pendingin, kursi, meja, pendingin ruangan, wastafel dispenser air panas dan dingin

   Sarana di ruang ramah anak seperti: alas/karpet lantai, mainan anak, pendingin ruangan, meja, kursi dan buku bacaan.

5. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

   Balai POM di Batam telah menyediakan prasarana khusus untuk perempuan dan kelompok disabilitas antara lain: Tempat parkiran khusus perempuan dan disabilitas, Bidang miring untuk masuk ke Gedung kantor dan yang berada di dalam kantor menuju toilet, Ruang laktasi beserta sarananya seperti lemari pendingin, kursi, meja, pendingin ruangan dispenser air panas dan dingin, Ruang ramah anak seperti: alas/karpet lantai, mainan anak, pendingin ruangan.Toilet khusus disabilitas

6. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman

   Akses terhadap kegiatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Balai POM di Batam terbuka untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun belum ada pengaturan terkait gender pada pedoman pelaksanaan RO Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sehingga terdapat perbedaan proporsi laki-laki dan perempuan di setiap tahapan PJAS, pada satu tahapan kegiatan didominasi laki-laki namun pada tahapan lainnya didominasi perempuan.

7. Desa Pangan Aman

   Program Desa Pangan memiliki Komunitas dan Kader dimana salah satunya adalah Komunitas Ibu Rumah Tangga yang sudah jelas pesertanya adalah perempuan. Agar jumlah laki-laki pada kader GKPD lebih seimbang diupayakan dengan menjadikan Karang Taruna sebagai kader. Namun karena belum diatur di dalam juknis mengenai imbang gender peserta kegiatan GKPD, sehingga penunjukkan diserahkan kepada Kepala Desa dan terkadang jumlah orangnya terbatas.

8. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

   Sasaran kegiatan PPABK adalah pedagang pasar, fasilitator, pengelola pasar dan pembeli. Untuk kegiatan yang bersifat undangan, Balai POM di Batam memberikan akses kepada semua baik laki-laki dan perempuan untuk mengikuti

kegiatan (tidak ada pembatasan), namun pada beberapa tahapan dimana petugas Balai POM di Batam turun ke pasar, jika terdapat keterbatasan jumlah pada salah satu gender maka proporsi akan didominasi oleh gender yang lain.

9. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

   Program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Balai POM di Batam terbuka untuk semua pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan. (tidak ada pembatasan). Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendampingan dari Balai POM di Batam sehingga kegiatan pendampingan UMKM akan bermanfaat baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Berdasarkan data kegiatan terkait RO UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT Balai POM di Batam, terlihat adanya pergeseran tren partisipasi berdasarkan gender dari kegiatan sosialisasi hingga bimbingan teknis (Bimtek). Pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Perizinan Berusaha bagi Pelaku UMK Pangan Olahan, partisipasi peserta didominasi oleh perempuan sebesar 84,5%, sedangkan laki-laki sebesar 15,5%. Selanjutnya, pada Bimbingan Teknis CPPOB dalam pendampingan UMKM, komposisi peserta menjadi lebih seimbang, dengan perempuan 60,7% dan laki-laki 39,3%. Kemudian, pada Bimbingan Teknis CPPOB tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan pada partisipasi laki-laki, yaitu 75%, sedangkan perempuan sebesar 25%. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan pelaku usaha laki-laki dalam kegiatan pendampingan pemenuhan standar keamanan pangan, seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Batam melakukan pemilahan pelaku usaha UMKM yang memenuhi persyaratan untuk masuk ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Balai POM di Batam sebagai UMKM Dampingan Balai POM di Batam dengan tetap mempertimbangkan imbang gender.

BAB III
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN







BAB III
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

3.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat

Sampai dengan Tahun 2025, Balai POM di Batam belum memiliki sarana produksi obat yang telah memiliki izin Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pada aspek hulu produksi obat di wilayah kerja Balai POM di Batam masih sangat terbatas, sehingga fokus pengawasan lebih diarahkan pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang menjadi titik krusial dalam menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat yang beredar di masyarakat. Dengan karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang merupakan daerah perlintasan dan perdagangan, pengawasan pada aspek distribusi menjadi semakin strategis karena berpotensi menjadi jalur masuk dan beredarnya produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

Di wilayah kerja Balai POM di Batam terdapat 6 sarana Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tahun 2025, Balai POM di Batam bersama Badan POM RI Pusat telah melakukan pengawasan terhadap 1 sarana UTD di Kota Batam dalam rangka pendampingan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Kegiatan ini tidak hanya bersifat pengawasan, namun juga merupakan bentuk pembinaan dan penguatan kapasitas sarana pelayanan kesehatan agar mampu memenuhi standar mutu produksi, khususnya untuk produk berbasis darah yang memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.

Sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai POM di Batam terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah, serta sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, toko obat berizin, klinik, dan puskesmas. Penetapan sarana yang dilakukan pemeriksaan didasarkan pada pendekatan analisis risiko dan skala prioritas, dengan mempertimbangkan riwayat kepatuhan sarana, hasil pemeriksaan sebelumnya, status tindak lanjut CAPA, serta laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan agar sumber daya pengawasan yang terbatas dapat difokuskan pada sarana dengan tingkat risiko tinggi sehingga memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perlindungan masyarakat.

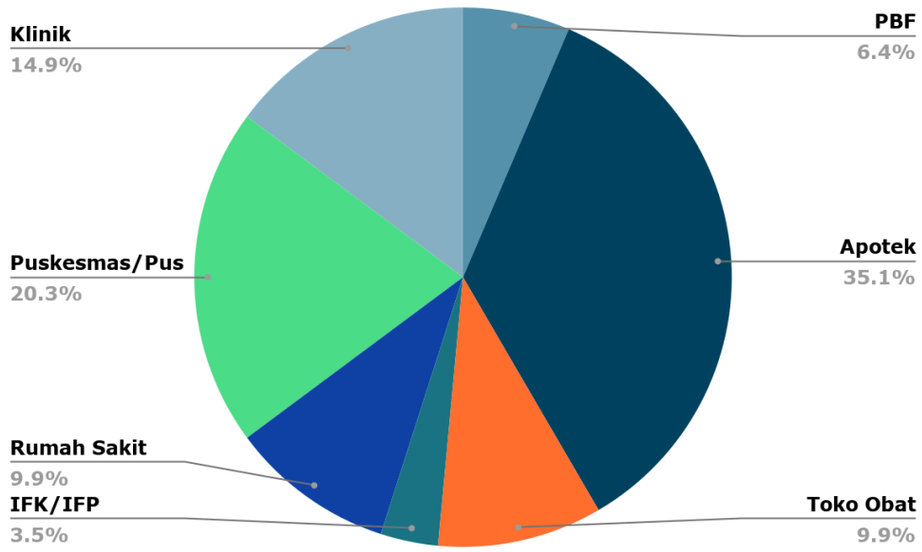
Pada tahun 2025, jumlah total sarana distribusi obat yang berada dalam pengawasan Balai POM di Batam sebanyak 833 sarana. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 202 sarana atau sebesar 24,25 % Pemeriksaan tersebut mencakup 13 sarana Pedagang Besar Farmasi, 7 Instalasi Farmasi Pemerintah, 71 apotek, 20 toko obat berizin, 20 instalasi farmasi rumah sakit atau rumah bersalin, 41

puskesmas, serta 30 klinik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 132 sarana atau 65,34 % dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 70 sarana atau 34,66 % dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Temuan ketidaksesuaian pada sarana distribusi obat secara umum menunjukkan pola yang berulang dan mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola distribusi obat. Ketidaksesuaian tersebut antara lain berupa pengadaan obat dari sumber yang tidak resmi, penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan terutama untuk obat dengan perlakuan khusus, penyaluran obat kepada pihak yang tidak berwenang dalam jumlah besar tanpa analisis kewajaran, serta dokumentasi yang tidak memadai sehingga menghambat penelusuran distribusi obat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Balai POM di Batam telah melakukan penegakan ketentuan melalui pemberian sanksi administratif berupa surat peringatan, peringatan keras, hingga penghentian sementara kegiatan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Surat tindak lanjut tersebut disampaikan kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta asosiasi profesi terkait sebagai bagian dari penguatan sinergi pengawasan lintas sektor. Selain itu, terhadap sarana yang masih memiliki status CAPA Open, dilakukan pendampingan perbaikan melalui kegiatan Desk CAPA yang dilaksanakan secara daring pada setiap akhir triwulan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kepatuhan sarana secara sistematis.

Secara strategis, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sarana telah memenuhi ketentuan, tingkat ketidakpatuhan yang masih mencapai lebih dari sepertiga dari total sarana yang diperiksa menjadi indikator bahwa penguatan pengawasan distribusi obat masih perlu ditingkatkan. Risiko terbesar dalam konteks wilayah Batam bukan berada pada produksi, melainkan pada distribusi yang menjadi jalur utama peredaran produk. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas tindak lanjut CAPA, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan bahwa obat yang beredar di masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan bermanfaat. Data rinci dapat dilihat pada tabel 7A.



Gambar 8. Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Balai POM di Batam

3.1.1.1. Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi

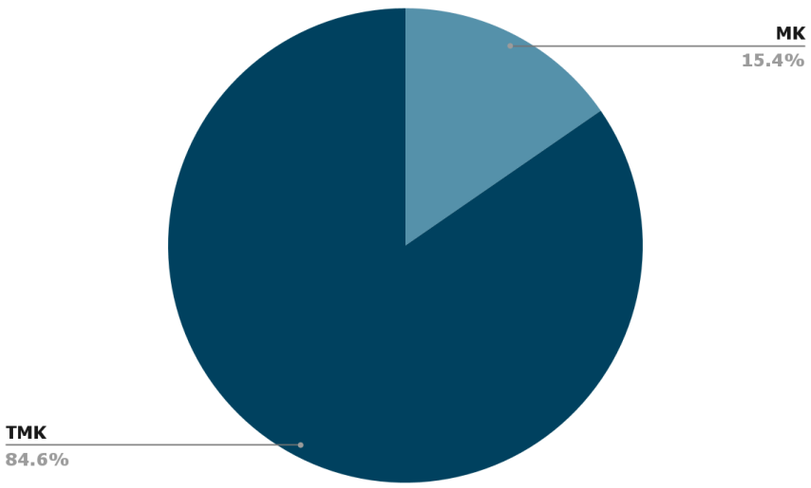
Jumlah Pedagang Besar Farmasi di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 30 sarana yang tersebar di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana atau sebesar 43,33 %. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hanya 2 sarana atau 15,38 %n yang dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 11 sarana atau 84,62 % tidak memenuhi ketentuan

Tingginya tingkat ketidaksesuaian pada sarana Pedagang Besar Farmasi menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi titik kritis dalam rantai distribusi obat. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain berupa penyaluran obat kepada sarana yang tidak memiliki kewenangan, penyaluran obat dalam jumlah besar tanpa analisis kewajaran, kelemahan dalam sistem administrasi yang menyebabkan ketidakmampuan dalam penelusuran distribusi obat, serta ketidaksesuaian pada aspek higiene dan sanitasi penyimpanan obat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan distribusi yang dapat berdampak luas terhadap keamanan obat di tingkat hilir.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan, diberikan tindak lanjut berupa pembinaan dan peringatan sebagai upaya menjaga konsistensi kepatuhan. Sementara itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan. Tindak lanjut tersebut juga disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk penguatan pengawasan terpadu.

Secara strategis, tingginya tingkat ketidakpatuhan pada PBF menjadi sinyal kuat bahwa penguatan pengawasan pada level distribusi primer harus menjadi prioritas utama. PBF memiliki peran sentral sebagai penghubung antara produsen dan sarana

pelayanan, sehingga setiap ketidaksesuaian pada level ini berpotensi berdampak sistemik terhadap seluruh rantai distribusi obat. Data rinci pada tabel 7A.



Gambar 9. Pengawasan Sarana PBF Balai POM di Batam

3.1.1.2. Pemeriksaan Apotek

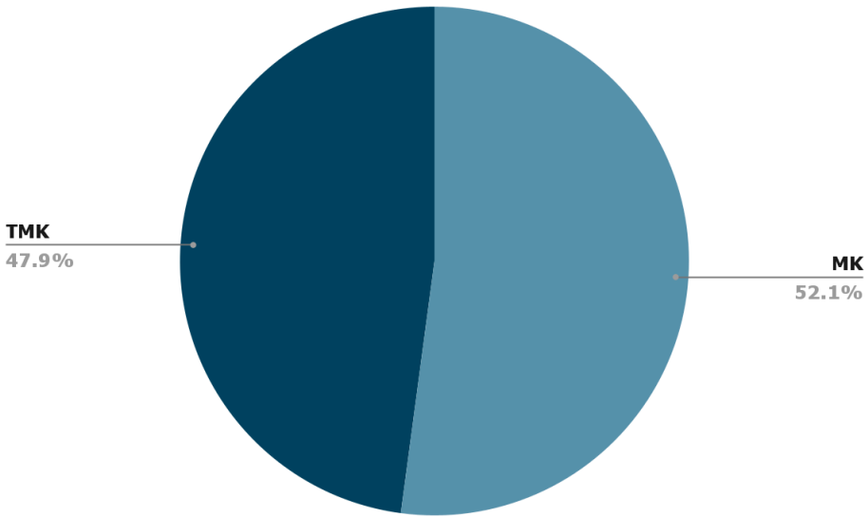
Jumlah apotek di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 345 sarana yang tersebar di lima kabupaten/kota. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 71 sarana atau sebesar 20,58 %. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 37 sarana atau 52,11 % dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 34 sarana atau 47,89 % tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana apotek antara lain meliputi perizinan operasional yang sudah tidak berlaku, pengadaan obat dari sumber yang tidak resmi, pengadaan obat dalam jumlah besar tanpa pertimbangan yang memadai, penyaluran obat kepada sarana yang tidak berizin, serta masih ditemukannya peredaran obat yang tidak memiliki izin edar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian apotek belum sepenuhnya menjalankan praktik kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan, sehingga berpotensi langsung berdampak pada masyarakat sebagai pengguna akhir.

Tindak lanjut yang diberikan terhadap sarana apotek dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian, mulai dari pembinaan dan peringatan hingga sanksi administratif berupa peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan

Secara strategis, tingkat ketidakpatuhan yang hampir mencapai setengah dari sarana yang diperiksa menunjukkan bahwa apotek masih menjadi titik rawan dalam peredaran obat. Mengingat peran apotek sebagai sarana pelayanan langsung kepada

masyarakat, maka penguatan pengawasan dan pembinaan pada sektor ini menjadi sangat penting dalam menjamin keselamatan pasien. Data rinci pada tabel 7A.



Gambar 10. Pengawasan Sarana Apotek Balai POM di Batam

3.1.1.3. Pemeriksaan Toko Obat

Jumlah toko obat di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 68 sarana yang tersebar di lima kabupaten/kota. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 sarana atau sebesar 29,41 %. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 16 sarana atau 80 % dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 4 sarana atau 20 % tidak memenuhi ketentuan.

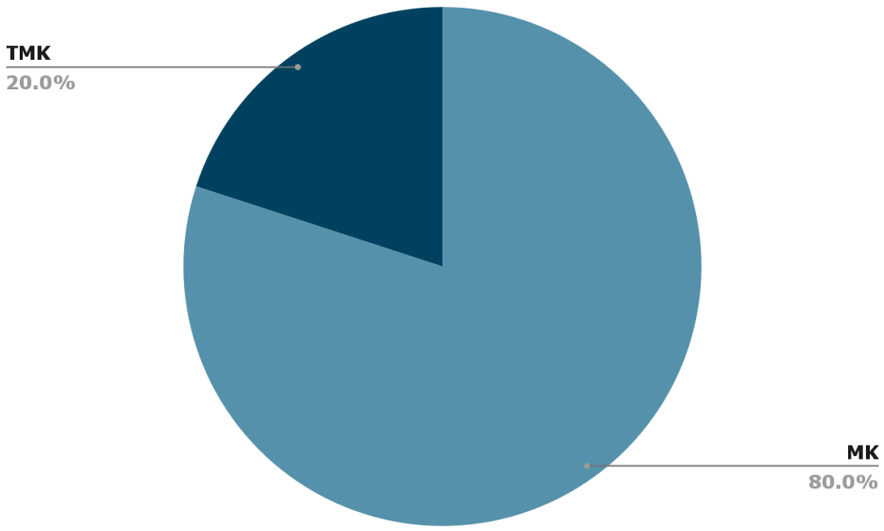
Secara umum, tingkat kepatuhan pada sarana toko obat relatif lebih baik dibandingkan dengan sarana distribusi lainnya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang perlu mendapat perhatian, antara lain terkait aspek perizinan, praktik penjualan obat keras tanpa kewenangan, serta pelanggaran terhadap persyaratan pengelolaan obat pada sarana pelayanan kefarmasian. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif tingkat kepatuhan cukup tinggi, masih terdapat celah pada aspek pemahaman regulasi dan implementasi di lapangan.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan diberikan pembinaan sebagai upaya menjaga konsistensi kepatuhan. Sementara itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif berupa peringatan. Surat tindak lanjut tersebut disampaikan kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan asosiasi profesi terkait.

Selain itu, sarana distribusi obat dengan status CAPA Open juga mendapatkan pendampingan perbaikan melalui kegiatan Desk CAPA yang dilaksanakan secara

daring pada setiap akhir triwulan, sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan berkelanjutan

Secara strategis, capaian ini menunjukkan bahwa toko obat memiliki potensi sebagai sarana dengan tingkat kepatuhan yang relatif baik, namun tetap memerlukan penguatan pengawasan terutama pada aspek kewenangan penyaluran obat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berdampak pada keselamatan masyarakat. Data rinci pada tabel 7A.



Gambar 11. Pengawasan Sarana Toko Obat Balai POM di Batam

3.1.1.4. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah yang diawasi oleh Balai POM di Batam sebanyak 7 sarana yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh sarana tersebut, yang terdiri dari 5 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, 1 Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 gudang obat perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.

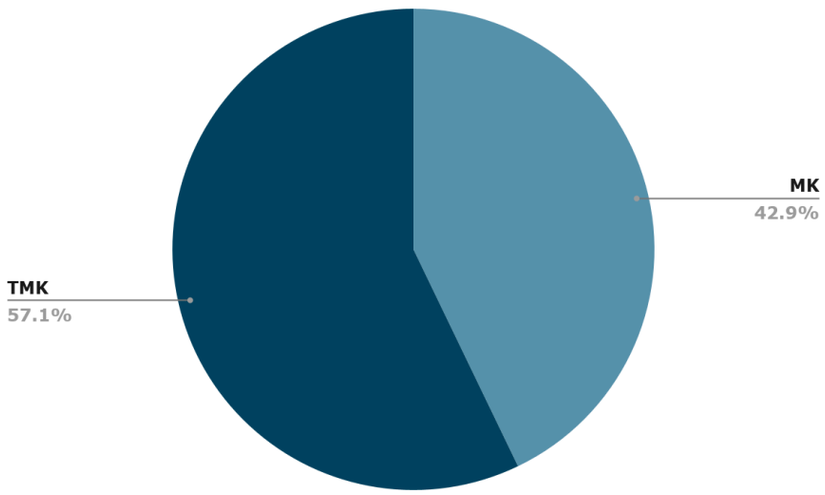
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 3 sarana atau 42,86 % dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 4 sarana atau 57,14 % tidak memenuhi ketentuan. Tingginya tingkat ketidaksesuaian pada sarana pemerintah ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan distribusi obat tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga pada sektor pemerintah.

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain meliputi pelanggaran terhadap ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), kelemahan dalam aspek administrasi terkait ketelusuran penyaluran obat, serta ketidaksesuaian pada aspek higiene dan sanitasi fasilitas gudang penyimpanan obat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas obat yang didistribusikan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut berupa peringatan sebagai bentuk pembinaan. Sementara itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras. Surat tindak lanjut tersebut juga disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk memastikan adanya perbaikan secara sistematis.

Secara strategis, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola farmasi di sektor pemerintah, khususnya dalam hal pengendalian distribusi dan penyimpanan obat. Mengingat peran Instalasi Farmasi Pemerintah sebagai penopang utama distribusi obat dalam sistem pelayanan kesehatan publik, maka peningkatan kepatuhan pada sektor ini menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Data rinci pada tabel 7A.

.



Gambar 12. Pengawasan Sarana IFK/IFP Balai POM di Batam

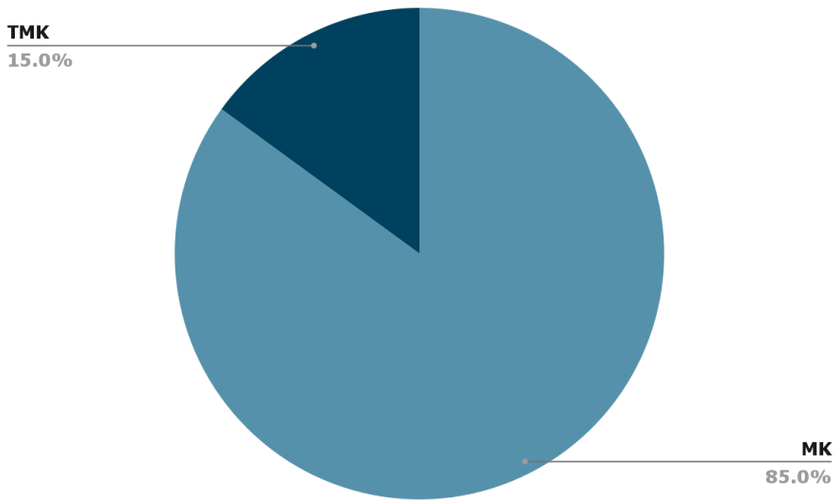
3.1.1.5. Pemeriksaan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 31 sarana yang tersebar di lima kabupaten/kota. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 sarana. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 sarana atau 85 % dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 3 sarana atau 15 % tidak memenuhi ketentuan.

Secara umum, tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan kefarmasian sudah cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang berkaitan dengan aspek pengelolaan obat, khususnya pada penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan terutama untuk obat dengan perlakuan khusus, kelemahan dalam dokumentasi pengadaan dan penyaluran obat yang tidak dapat ditelusuri, serta aspek higiene dan sanitasi pada gudang penyimpanan obat

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut berupa peringatan sebagai bagian dari pembinaan. Sementara itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras. Surat tindak lanjut tersebut juga disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan adanya perbaikan.
Selain itu, sarana distribusi obat dengan status CAPA Open tetap mendapatkan pendampingan melalui Desk CAPA yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir triwulan.

Secara strategis, capaian ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki sistem pengelolaan obat yang relatif baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengendalian internal, khususnya dalam menjaga konsistensi penerapan standar pada seluruh proses pengelolaan obat. Data rinci pada tabel 7A.



Gambar 13. Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Balai POM di Batam

3.1.1.6. Pemeriksaan Puskesmas

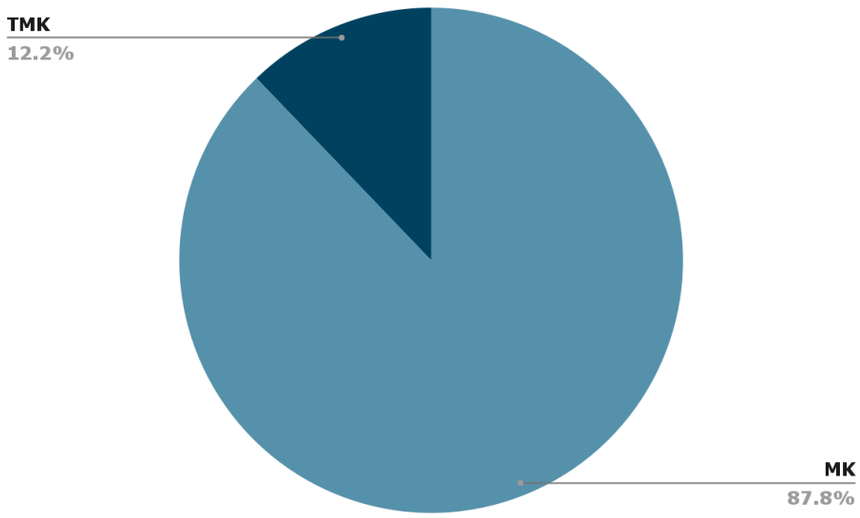
Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 268 sarana yang tersebar di lima kabupaten/kota dengan rincian 68 sarana puskesmas dan 200 sarana puskesmas pembantu . Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 41 sarana, dengan hasil sebanyak 36 sarana atau 87,80 % memenuhi ketentuan dan 5 sarana atau 12,20 % tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada puskesmas antara lain meliputi pelanggaran terhadap persyaratan pengelolaan obat dan standar pelayanan kefarmasian, seperti penyimpanan obat yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan alat monitoring suhu yang tidak memenuhi persyaratan, serta ketidaksesuaian pada dokumen administrasi terkait monitoring mutu obat dan penyaluran obat.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan diberikan pembinaan dan peringatan, sedangkan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi

administratif berupa peringatan keras. Surat tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan adanya perbaikan.Selain itu, sarana dengan status CAPA Open tetap mendapatkan pendampingan melalui Desk CAPA yang dilaksanakan secara berkala.

Secara strategis, tingkat kepatuhan puskesmas yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sistem pelayanan kefarmasian di tingkat layanan dasar sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, penguatan kapasitas teknis dan pengawasan internal masih diperlukan untuk memastikan bahwa standar pengelolaan obat dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Data rinci pada tabel 7A



Gambar 14. Pengawasan Sarana Puskesmas Balai POM di Batam

3.1.1.7. Pemeriksaan Klinik

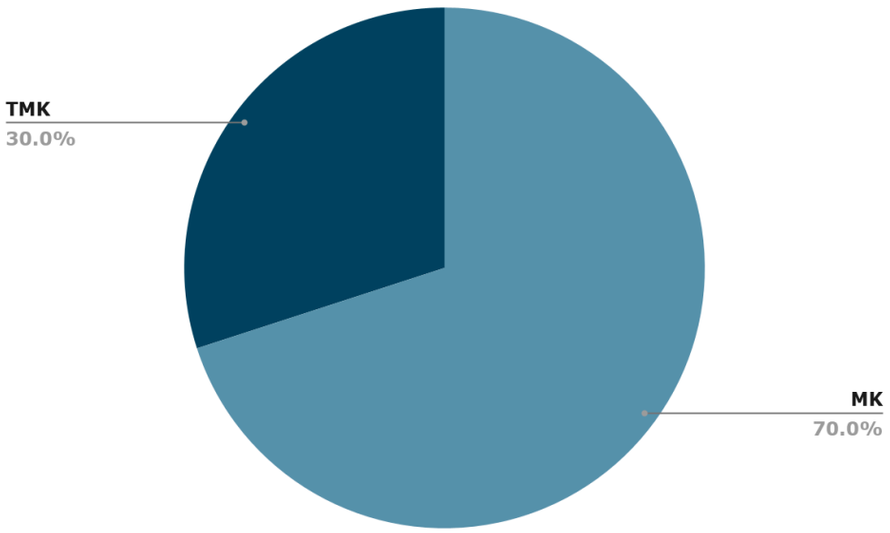
Jumlah klinik di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 170 sarana yang tersebar di lima kabupaten/kota. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 sarana klinik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 21 sarana atau 70 % memenuhi ketentuan dan 9 sarana atau 30 % tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain meliputi aspek perizinan, pelanggaran terhadap persyaratan pengelolaan obat pada sarana pelayanan kefarmasian, serta masih ditemukannya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kondisi ini menunjukkan bahwa klinik masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam pengelolaan produk yang berada di bawah pengawasan BPOM.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut berupa peringatan, sedangkan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan. Surat

tindak lanjut tersebut disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan adanya tindak lanjut yang komprehensif.Selain itu, sarana dengan status CAPA Open tetap mendapatkan pendampingan melalui Desk CAPA yang dilaksanakan setiap akhir triwulan secara daring.

Secara strategis, hasil ini menunjukkan bahwa klinik masih menjadi salah satu titik pengawasan yang perlu diperkuat, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi dan pengendalian produk yang beredar di dalam sarana. Data rinci pada tabel 7A.



Gambar 15. Pengawasan Sarana Klinik Balai POM di Batam

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam

Balai POM di Batam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan berupa surat tindak lanjut baik ke pihak internal Badan POM maupun ke pihak eksternal seperti pelaku usaha ataupun lintas sektor terkait.

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam menerbitkan 3 surat rekomendasi penghentian sementara kegiatan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi obat ke Badan POM dan 1 surat tindak lanjut hasil pengawasan ke Balai POM di Bandar Lampung, sebanyak 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penghentian Sementara Kegiatan oleh Badan POM dan 1 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Balai POM di Bandar Lampung. Selain itu Balai POM di Batam juga menerbitkan sebanyak 337 surat tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan ke sarana produksi dan distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Data rinci terdapat pada tabel 8A.

Balai POM di Batam menerima 315 laporan hasil tindakan perbaikan dari pelaku usaha atas dasar surat tindak lanjut yang telah diberikan. Surat rekomendasi kepada lintas sektor terkait juga diterbitkan sebanyak 2 surat rekomendasi yang ditindaklanjuti seluruhnya oleh lintas sektor terkait. Data rinci terdapat pada tabel 8B.

3.1.3 Sampling dan Pengujian Produk Terapetik dan NAPZA

Jumlah obat yang direncanakan untuk disampling pada tahun 2025 sebanyak 174 sampel. Dari hasil pelaksanaan sampling dan pengujian terhadap produk terapeutik dan NAPZA, dilakukan pengujian terhadap 174 sampel, dimana diperoleh hasil sebanyak 152 sampel atau 87,35 % memenuhi syarat, dan 22 sampel atau 12,64 % tidak memenuhi syarat.

Sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 1 sampel hasil uji laboratorium yang diuji di BBPOM Medan, 1 sampel hasil uji laboratorium yang diuji di BPOM Batam, serta 20 sampel yang tidak memenuhi syarat pada aspek penandaan. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek mutu produk, masih terdapat permasalahan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan label yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Selain sampel yang berasal dari kegiatan pengawasan rutin, Balai POM di Batam juga melakukan pengujian terhadap sampel regional yang berasal dari Balai Besar POM dan Loka POM di wilayah regional Medan. Dengan adanya sampel regional tersebut, jumlah sampel obat/terapeutik yang diuji di laboratorium kimia Balai POM di Batam mencapai 234 sampel, dengan hasil sebanyak 228 sampel memenuhi syarat dan 5 sampel tidak memenuhi syarat.

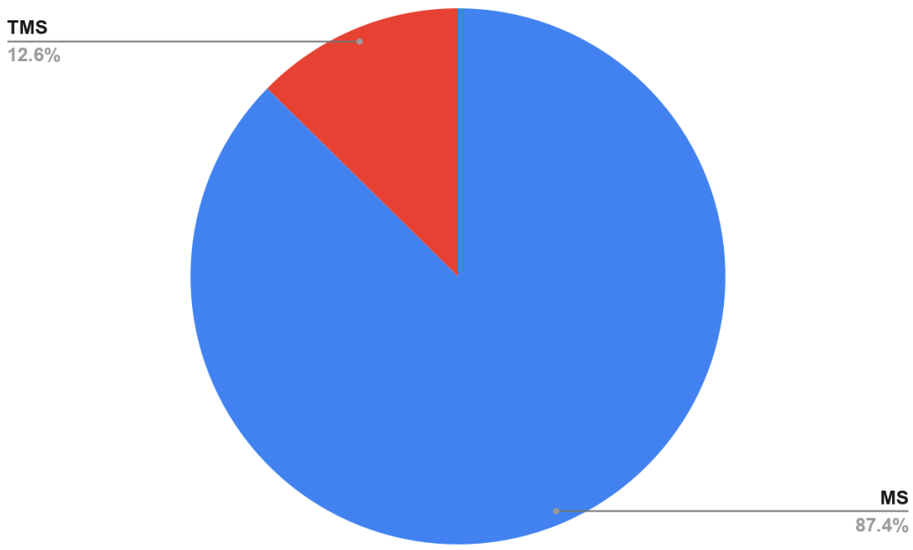
Selain itu, pengujian pada laboratorium mikrobiologi terhadap produk terapeutik dilakukan terhadap 19 sampel, dimana seluruh sampel atau 100 persen memenuhi syarat dan tidak ditemukan sampel yang tidak memenuhi ketentuan.

Seluruh hasil pengujian produk terapeutik dan NAPZA telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Untuk hasil yang tidak memenuhi syarat, dilakukan desk evaluasi bersama unit terkait, yaitu Kedeputian Bidang Penindakan melalui KMEI, Direktorat Registrasi Obat, serta Direktorat Standardisasi Obat dan P3OMN. Hasil dari desk tersebut ditindaklanjuti oleh unit terkait, dimana seluruh sampel yang tidak memenuhi syarat telah dilakukan tindak lanjut secara menyeluruh.

Dari aspek parameter pengujian, pada produk terapeutik dilakukan pengujian sebanyak 1542 parameter uji fisika dan kimia, dimana terdapat 8 parameter yang tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari 1 parameter uji disolusi, 2 parameter uji identifikasi, dan 5

parameter uji penetapan kadar. Sementara itu, pada pengujian mikrobiologi terdapat 35 parameter uji dan seluruhnya memenuhi syarat. Data rinci pada tabel 2G.

Secara strategis, hasil sampling dan pengujian ini menunjukkan bahwa secara umum mutu produk terapeutik yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Batam berada dalam kondisi yang baik. Namun demikian, masih ditemukannya sampel yang tidak memenuhi syarat, khususnya pada aspek penandaan dan beberapa parameter uji, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan produk masih perlu terus diperkuat. Pendekatan pengawasan berbasis risiko, integrasi data hasil pengujian dengan pengawasan sarana, serta percepatan tindak lanjut terhadap temuan menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.



Gambar 16. Hasil Pengujian Produk Terapetik/Obat dan NAPPZA

3.2 Pengawasan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya)

Balai POM di Batam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran NAPZA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan obat secara menyeluruh. Pengawasan ini dilakukan secara simultan dengan pengawasan obat lainnya, khususnya pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, melalui kegiatan rutin pemeriksaan sarana serta sampling dan pengujian produk.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian terhadap NAPZA tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem pengawasan obat secara komprehensif, mengingat karakteristik NAPZA yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi dan dampak signifikan terhadap kesehatan serta ketertiban masyarakat. Pengawasan NAPZA pada sarana distribusi obat dilaksanakan melalui pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi, sebagaimana telah diuraikan pada subbab 3.1.1.1.

Sementara itu, pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian dilakukan melalui pemeriksaan apotek, toko obat, instalasi farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sebagaimana dijelaskan pada subbab 3.1.1.2 sampai dengan 3.1.1.7. Dalam konteks ini, pengawasan NAPZA difokuskan pada aspek kepatuhan terhadap pengelolaan, penyimpanan, penyaluran, serta pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan, guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.

Selain pengawasan melalui pemeriksaan sarana, pengawasan mutu NAPZA juga dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian produk terapeutik dan NAPZA sebagaimana diuraikan pada subbab 3.1.2. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, sehingga aman digunakan oleh masyarakat.

Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa pengawasan NAPZA telah menjadi bagian dari sistem pengawasan obat secara menyeluruh, namun di sisi lain memerlukan penguatan pengawasan spesifik mengingat karakteristik risiko NAPZA yang lebih tinggi dibandingkan obat lainnya.

Pada tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Batam juga melaksanakan pengujian terhadap sampel pihak ketiga narkotika yang berasal dari instansi penegak hukum. Pengujian dilakukan terhadap 466 sampel pihak ketiga narkotika yang berasal dari instansi Kepolisian dan BNN, dimana terdapat 195 pelanggan yang terdiri dari 191 orang laki-laki (97,9%) dan 4 orang perempuan (2,1%). Parameter yang diuji meliputi identifikasi metamfetamin sebanyak 375 sampel, identifikasi MDMA sebanyak 53 sampel, identifikasi Cannabis sebanyak 35 sampel, identifikasi ketamin sebanyak 2 sampel, dan identifikasi Triheksifenidil sebanyak 1 sampel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Balai POM di Batam dalam sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui pengujian laboratorium yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil pengujian tersebut menjadi salah satu alat bukti ilmiah yang digunakan dalam proses peradilan
Tingginya jumlah sampel dari aparat penegak hukum menunjukkan peran strategis Balai POM dalam mendukung penegakan hukum di bidang NAPZA, sekaligus menegaskan fungsi laboratorium sebagai back-up scientific evidence dalam proses hukum

Secara keseluruhan, pengawasan NAPZA di wilayah kerja Balai POM di Batam menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah mencakup aspek preventif, pengawasan rutin, hingga dukungan terhadap penegakan hukum. Namun demikian, mengingat karakteristik wilayah Batam yang merupakan daerah perbatasan dan memiliki

mobilitas barang yang tinggi, potensi risiko peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tetap menjadi tantangan yang signifikan.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan NAPZA ke depan perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, penguatan sinergi lintas sektor khususnya dengan aparat penegak hukum, serta optimalisasi pemanfaatan data hasil pengawasan dan pengujian sebagai dasar dalam penentuan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengawasan NAPZA tidak hanya mampu mengendalikan peredaran produk, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keamanan masyarakat serta mendukung upaya nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

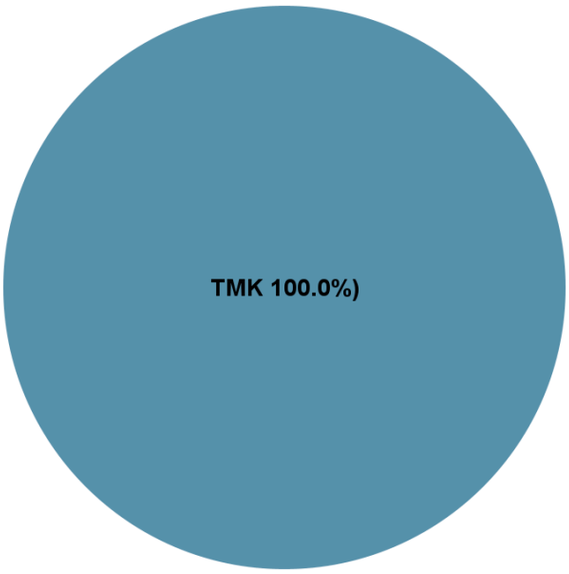
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

3.3.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam

Pada Tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat Bahan Alam sebagai bagian dari upaya menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk yang beredar di masyarakat. Sarana produksi Obat Bahan Alam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1 sarana, yaitu Usaha Kecil Obat Bahan Alam. Terhadap sarana tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil seluruhnya tidak memenuhi ketentuan (100%). Data rinci sarana pemeriksaan produksi Obat Bahan Alam pada Tabel 6B.

Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi perizinan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) yang sudah tidak berlaku, serta ketidaksesuaian pada aspek higiene dan sanitasi proses produksi, penyimpanan bahan baku, serta aspek dokumentasi administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, telah dilakukan tindak lanjut berupa sanksi administratif berupa peringatan keras. Surat tindak lanjut disampaikan kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, serta asosiasi profesi terkait untuk diketahui dan dilakukan pembinaan lebih lanjut.

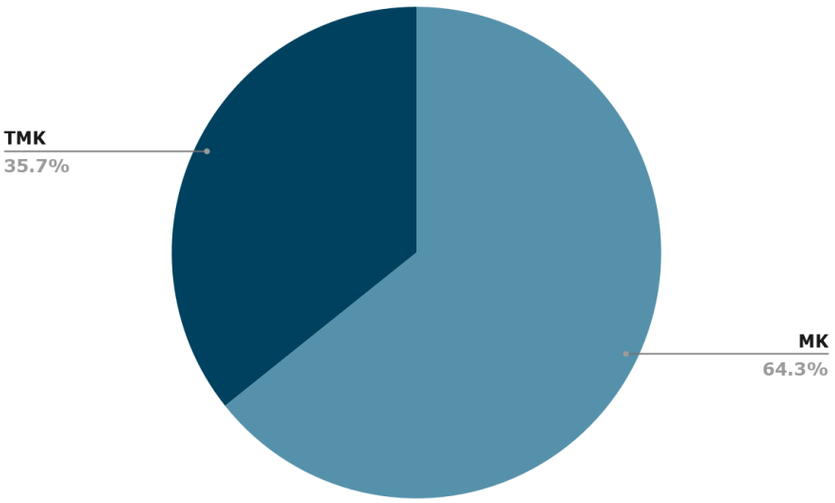
Selain itu, sarana juga mendapatkan pendampingan perbaikan melalui kegiatan Corrective and Preventive Action (CAPA) yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir triwulan melalui Desk CAPA secara daring, sebagai upaya percepatan pemenuhan ketentuan dan peningkatan kepatuhan.



Gambar 17. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam
Balai POM di Batam

Pada aspek distribusi, jumlah sarana distribusi Obat Bahan Alam yang terdata di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 480 sarana. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan target pemeriksaan yang telah ditetapkan serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Dari total sarana tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana yang terdiri dari distributor jamu, toko obat/depot jamu, dan sarana pengobatan tradisional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 9 sarana (64,3%) memenuhi ketentuan dan 5 sarana (35,7%) tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain berupa peredaran atau penjualan produk Obat Bahan Alam yang tidak memiliki izin edar. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindakan pemusnahan produk di tempat oleh pemilik sarana yang disaksikan oleh petugas Balai POM di Batam dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan. Selain itu, dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif berupa peringatan dan peringatan keras kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Surat tindak lanjut tersebut disampaikan kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat untuk diketahui dan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Data hasil pemeriksaan sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi tersaji pada Tabel 7B.



Gambar 18. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam
Balai POM di Batam

Hasil pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat Bahan Alam di wilayah kerja Balai POM di Batam Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pemenuhan persyaratan dasar Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Pada sarana produksi, kondisi tidak memenuhi ketentuan sebesar 100% menunjukkan adanya permasalahan mendasar pada kapasitas pemenuhan standar oleh pelaku usaha skala kecil. Ketidaksesuaian yang ditemukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti higiene, sanitasi, dan sistem dokumentasi yang merupakan elemen krusial dalam menjamin mutu dan keamanan produk. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam, khususnya usaha kecil, perlu dilakukan secara lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pada sisi distribusi, meskipun sebagian besar sarana telah memenuhi ketentuan, masih ditemukan 35,7% sarana yang tidak memenuhi ketentuan, terutama terkait peredaran produk tanpa izin edar. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko peredaran produk ilegal pada Obat Bahan Alam masih cukup signifikan, khususnya pada jalur distribusi tradisional.

Cakupan pemeriksaan yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada juga menunjukkan perlunya penguatan strategi pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Tindak lanjut berupa pemusnahan produk, pemberian sanksi administratif, serta koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilaksanakan sebagai bentuk penegakan regulasi. Namun demikian, upaya tersebut perlu diimbangi dengan penguatan edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar

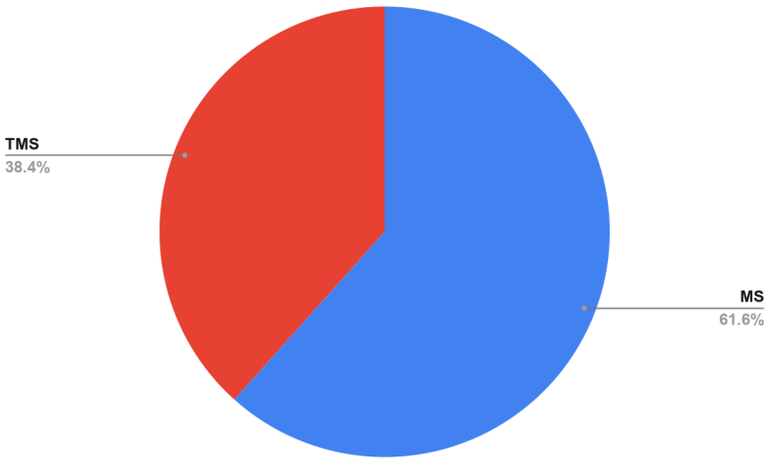
mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendampingan melalui Desk CAPA merupakan langkah strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Ke depan, efektivitas kegiatan ini perlu terus ditingkatkan melalui pemantauan yang lebih terukur terhadap implementasi tindakan perbaikan oleh pelaku usaha.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam pengawasan Obat Bahan Alam terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan sarana produksi skala kecil dan masih ditemukannya peredaran produk tanpa izin edar pada jalur distribusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, peningkatan intensitas pembinaan, serta optimalisasi pengawasan berbasis risiko guna meningkatkan perlindungan masyarakat.

3.3.2 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian terhadap produk Obat Bahan Alam yang beredar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah sampel Obat Bahan Alam yang dilakukan sampling pada Tahun 2025 sebanyak 172 sampel dengan realisasi sampling mencapai 100% dari target. Dari hasil pengujian dengan parameter uji kritis lengkap dan evaluasi penandaan label terhadap 172 sampel tersebut, diperoleh hasil sebanyak 106 sampel (61,6%) memenuhi syarat dan 66 sampel (38,4%) tidak memenuhi syarat. Hasil sampling dan pengujian produk Obat Bahan Alam menunjukkan bahwa tingkat ketidaksesuaian masih relatif tinggi, khususnya pada hasil pengujian awal yang mencapai 38,4% tidak memenuhi syarat. Meskipun secara agregat seluruh sampel menunjukkan persentase ketidaksesuaian sebesar 33%, angka ini tetap menunjukkan adanya risiko yang signifikan terhadap mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Hasil sampling dan pengujian produk Obat Bahan Alam menunjukkan bahwa tingkat ketidaksesuaian masih relatif tinggi, khususnya pada hasil pengujian awal yang mencapai 38,4% tidak memenuhi syarat. Meskipun secara agregat seluruh sampel menunjukkan persentase ketidaksesuaian sebesar 33%, angka ini tetap menunjukkan adanya risiko yang signifikan terhadap mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Data dapat dilihat pada tabel 1A.



Gambar 19. Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Selain sampel yang berasal dari kegiatan pengawasan Balai POM di Batam, dilakukan juga pengujian terhadap sampel yang berasal dari Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 53 sampel serta sampel pihak ketiga dan hasil investigasi/penyidikan sebanyak 8 sampel. Dengan demikian, total sampel Obat Bahan Alam yang diuji oleh laboratorium Balai POM di Batam pada tahun 2025 sebanyak 233 sampel.

Dari total sampel tersebut, diperoleh hasil sebanyak 157 sampel (67%) memenuhi syarat dan 76 sampel (33%) tidak memenuhi syarat. Pengujian dilakukan menggunakan parameter uji kritis sesuai pedoman sampling yang berlaku. Seluruh data hasil uji produk Obat Bahan Alam telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat, telah dilakukan tindak lanjut melalui koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Parameter uji fisika dan kimia pada produk Obat Bahan Alam berjumlah 496 parameter, dengan terdapat 22 parameter uji yang tidak memenuhi syarat, yaitu terdiri dari 1 parameter uji kadar air, 18 parameter uji waktu hancur, 1 parameter cemaran logam berat, 1 parameter kadar etanol, dan 1 parameter zat tambahan pengawet. Sementara itu, parameter uji mikrobiologi pada produk Obat Bahan Alam berjumlah 1575 parameter, dengan hasil sebanyak 1561 parameter (99,11%) memenuhi syarat dan 14 parameter (0,89%) tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari 7 parameter ALT, 2 parameter AKK, 4 parameter Angka Mungkin Enterobacteriaceae, dan 1 parameter Clostridia sp. Data dapat dilihat pada Tabel 2G.

Ketidaksesuaian yang dominan pada parameter fisika dan kimia, khususnya waktu hancur, menunjukkan bahwa permasalahan utama berada pada aspek formulasi dan proses produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengendalikan proses produksi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

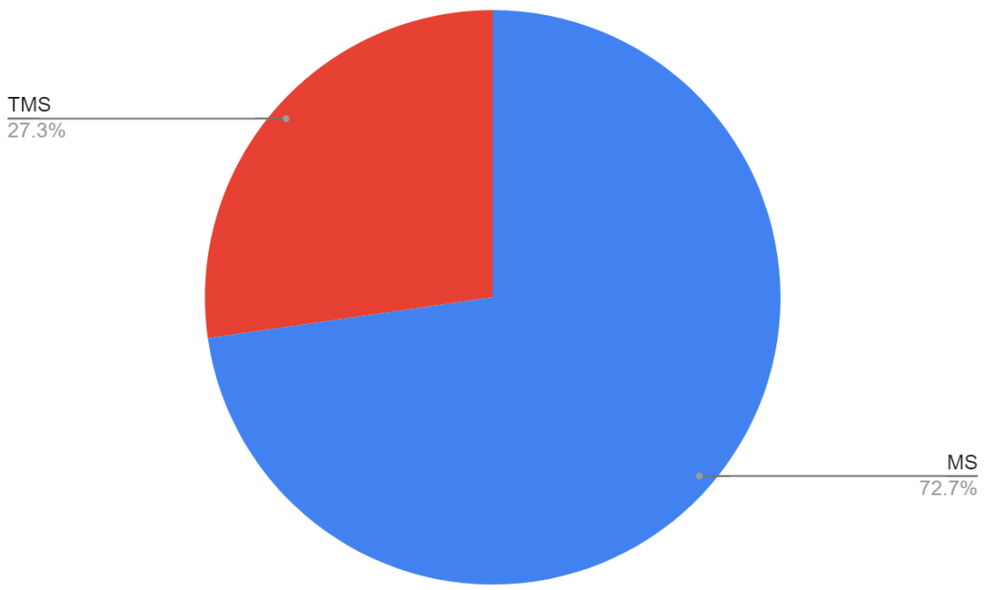
Sementara itu, meskipun tingkat ketidaksesuaian mikrobiologi relatif rendah, temuan cemaran mikrobiologi tetap menjadi perhatian karena berpotensi langsung berdampak terhadap keamanan produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian sanitasi dan higiene pada proses produksi masih perlu ditingkatkan.

Tingginya jumlah parameter uji yang tidak memenuhi syarat juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk Obat Bahan Alam perlu terus diperkuat, tidak hanya melalui penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan, tetapi juga melalui pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi standar mutu.

Koordinasi dengan Direktorat terkait dalam tindak lanjut hasil uji menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem pengawasan nasional. Namun demikian, efektivitas tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi syarat perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan peredaran produk bermasalah di masyarakat.

3.3.3 Sampling dan Pengujian Produk Obat Kuasi

Jumlah target sampel Obat Kuasi yang dilakukan sampling oleh Balai POM di Batam pada tahun 2025 sebanyak 11 sampel dengan realisasi sampling mencapai 100%. Dari hasil pengujian parameter uji kritis lengkap dan penandaan label terhadap 11 sampel tersebut, diperoleh hasil sebanyak 8 sampel (72,7%) memenuhi syarat dan 3 sampel (27,3%) tidak memenuhi syarat, data dapat dilihat pada tabel 1A.



Gambar 20. Hasil Pengujian Produk Obat Kuasi

Pengujian sampel dilakukan terhadap sampel Balai POM di Batam sebanyak 11 sampel dan sampel dari Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 3 sampel, sehingga total sampel yang diuji oleh laboratorium Balai POM di Batam sebanyak 14 sampel. Dari hasil

pengujian tersebut diperoleh hasil sebanyak 11 sampel (78,6%) memenuhi syarat dan 3 sampel (21,4%) tidak memenuhi syarat. Pengujian secara fisika dan kimia dilakukan terhadap 14 sampel dengan hasil sebanyak 13 sampel (92,9%) memenuhi syarat dan 1 sampel (7,1%) tidak memenuhi syarat. Selain itu, dilakukan pengujian mikrobiologi terhadap 14 sampel dengan hasil seluruh sampel memenuhi syarat (100%).

Seluruh hasil pengujian produk Obat Kuasi telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi sesuai ketentuan yang berlaku. Parameter uji fisika dan kimia pada produk Obat Kuasi berjumlah 29 parameter, dengan terdapat 1 parameter uji yang tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji waktu hancur. Sementara itu, parameter uji mikrobiologi berjumlah 59 parameter dan seluruhnya memenuhi syarat. Data dapat dilihat pada Tabel 2C. Parameter uji mikrobiologi pada produk kuasi berjumlah 59 parameter, dengan hasil 59 parameter memenuhi syarat. Data dapat dilihat pada Tabel 2G.

Hasil pengujian produk Obat Kuasi menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan produk relatif lebih baik dibandingkan dengan Obat Bahan Alam, dengan persentase ketidaksesuaian yang lebih rendah. Namun demikian, masih ditemukannya sampel yang tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk ini tetap perlu dilakukan secara konsisten.

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada parameter waktu hancur menunjukkan adanya permasalahan pada aspek mutu fisik produk yang berkaitan dengan proses formulasi dan produksi. Meskipun jumlahnya terbatas, hal ini tetap perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan produk. Hasil pengujian mikrobiologi yang seluruhnya memenuhi syarat menunjukkan bahwa dari aspek keamanan mikrobiologi, produk Obat Kuasi yang beredar relatif aman. Namun demikian, pengawasan tetap perlu dipertahankan untuk memastikan konsistensi mutu produk.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap Obat Kuasi menunjukkan bahwa risiko ketidaksesuaian masih ada, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis risiko serta pembinaan kepada pelaku usaha tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

3.4.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada Tahun 2025, di Provinsi Kepulauan Riau belum terdapat sarana produksi suplemen kesehatan, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan suplemen kesehatan di wilayah ini masih dipenuhi dari

produk yang berasal dari luar daerah, sehingga pengawasan lebih difokuskan pada aspek distribusi.

Jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan yang terdata di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 524 sarana. Pada Tahun 2025, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan target pemeriksaan serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Dari total sarana tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh sarana yang diperiksa atau 100% memenuhi ketentuan. Data pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan disajikan pada Tabel 7B.



Gambar 21. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Balai POM di Batam

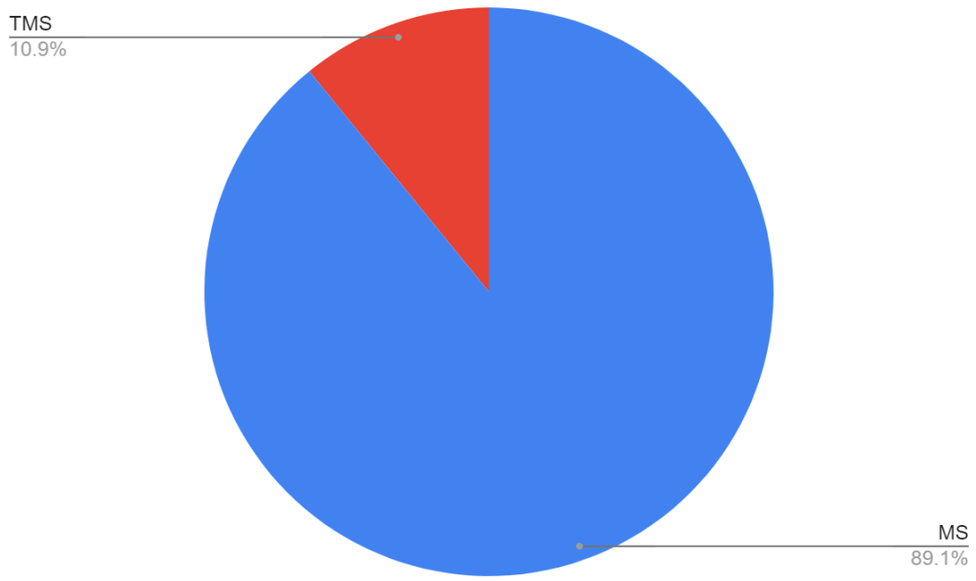
Hal ini menunjukkan bahwa pada sarana yang menjadi objek pemeriksaan, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan distribusi suplemen kesehatan tergolong baik. Namun demikian, capaian kepatuhan sebesar 100% tersebut belum dapat menggambarkan kondisi riil secara menyeluruh, mengingat cakupan pemeriksaan yang sangat terbatas dibandingkan dengan total populasi sarana distribusi yang ada. Keterbatasan jumlah sarana yang diperiksa berimplikasi pada masih adanya potensi risiko yang belum terdeteksi, khususnya terkait kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan pada sarana yang belum diperiksa.

Dengan demikian, meskipun secara hasil terlihat sangat baik, pengawasan distribusi suplemen kesehatan masih memerlukan penguatan melalui peningkatan cakupan pemeriksaan berbasis risiko agar diperoleh gambaran kepatuhan yang lebih representatif dan komprehensif.

3.4.2 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Jumlah target sampling suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam pada tahun 2025 sebanyak 46 sampel. Dari hasil pengujian dengan parameter uji kritis

lengkap dan penandaan label, diperoleh hasil 41 sampel atau 89,1% memenuhi syarat dan 5 sampel atau 10,9% tidak memenuhi syarat. Data dapat dilihat pada Tabel 1A.



Gambar 22. Hasil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Selain sampel yang berasal dari kegiatan Balai POM di Batam, dilakukan pula pengujian terhadap sampel dari Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga total sampel yang diuji mencapai 60 sampel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 53 sampel atau 88,3% memenuhi syarat dan 7 sampel atau 11,7% tidak memenuhi syarat.

Pengujian secara fisika dan kimia terhadap 60 sampel menunjukkan bahwa 54 sampel atau 90,0% memenuhi syarat dan 6 sampel atau 10,0% tidak memenuhi syarat. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain pada parameter waktu hancur serta penetapan kadar zat aktif, seperti Vitamin C. Data dapat dilihat pada Tabel 2G. Sementara itu, pengujian mikrobiologi terhadap 14 sampel menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi syarat. Data dapat dilihat pada Tabel 2D. Seluruh hasil pengujian telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan untuk hasil yang tidak memenuhi syarat telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara umum mutu dan keamanan suplemen kesehatan yang beredar relatif terkendali, yang tercermin dari tingginya persentase sampel yang memenuhi syarat. Namun demikian, masih ditemukannya sampel yang tidak memenuhi syarat pada parameter kritis menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan pengendalian mutu oleh pelaku usaha.

Ketidaksesuaian pada parameter waktu hancur dan kadar zat aktif mengindikasikan bahwa proses produksi belum sepenuhnya mampu menjamin keseragaman mutu produk, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kemanfaatan suplemen kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain, tidak ditemukannya ketidaksesuaian pada parameter mikrobiologi menunjukkan bahwa aspek keamanan produk relatif terjaga, sehingga fokus pengawasan ke depan perlu diarahkan pada penguatan aspek mutu kimia dan konsistensi formulasi produk.

Secara keseluruhan, hasil pengawasan menegaskan bahwa tantangan utama pada pengawasan suplemen kesehatan terletak pada konsistensi mutu produk, sehingga diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko serta peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk secara berkelanjutan.

3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

3.5.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik

3.5.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Jumlah sarana produksi kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 5 sarana yang terdiri dari sarana produksi kosmetik Golongan A dan Golongan B. Pada Tahun 2025, pengawasan dilakukan terhadap 2 sarana produksi kosmetik melalui pemeriksaan rutin dan audit terhadap sarana yang memiliki izin notifikasi di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 1 sarana atau 50% memenuhi ketentuan, sementara 1 sarana lainnya atau 50% tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain disebabkan oleh sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik yang sudah tidak berlaku, ketidaksesuaian pada aspek dokumentasi, serta kelemahan pada sistem mutu yang mencakup pelaksanaan pelatihan, kalibrasi alat, pengendalian lingkungan produksi, pelaksanaan uji stabilitas, dan penanganan keluhan. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian pada prosedur operasional, penandaan, dan klaim produk. Data rinci terdapat pada tabel 6D.

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan telah dilakukan pembinaan teknis sebagai upaya penguatan sistem mutu agar tetap konsisten. Sementara itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pelaporan kepada Direktorat Pengawasan Produk Kosmetik untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Balai POM di Batam juga melakukan pendampingan melalui kegiatan Desk CAPA secara berkala setiap akhir triwulan secara daring untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hasil pengawasan pada sarana produksi kosmetik menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan. Proporsi ketidaksesuaian yang mencapai 50% mencerminkan bahwa implementasi Cara Produksi Kosmetik yang Baik belum berjalan secara optimal dan belum terinternalisasi secara konsisten dalam sistem manajemen mutu pelaku usaha. Temuan terkait sertifikat yang tidak berlaku serta kelemahan pada sistem mutu menunjukkan bahwa kepatuhan masih cenderung bersifat administratif dan belum berbasis pada budaya mutu. Kondisi ini berpotensi berdampak terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik apabila tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.

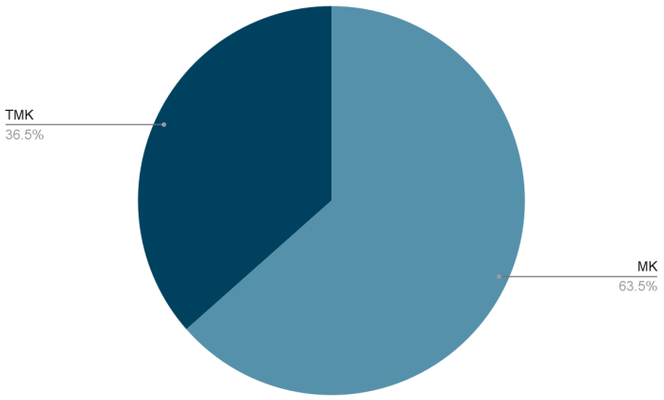


Gambar 23. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Balai POM di Batam
Balai POM di Batam

3.5.1.2 Pemeriksaaan Sarana Distribusi Kosmetik

Jumlah sarana distribusi kosmetika di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 321 sarana yang terdiri dari badan usaha pemilik notifikasi, importir atau distributor kosmetik, toko atau konter kosmetik, salon, serta klinik kecantikan. Selain itu, terdapat 29 importir kosmetik yang melakukan pemasukan produk dari berbagai negara.

Pada tahun 2025, pemeriksaan dilakukan secara selektif terhadap 66 sarana distribusi dalam rangka pengawasan dan penertiban produk ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 40 sarana atau 60,61% memenuhi ketentuan, 23 sarana atau 34,85% tidak memenuhi ketentuan, dan 3 sarana atau 4,55% tidak aktif pada saat pemeriksaan. Data pemeriksaan terdapat pada tabel 7B.



Gambar 24. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Balai POM di Batam

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain berupa peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk peringatan dan peringatan keras. Produk yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik sarana dan disaksikan oleh petugas Balai POM di Batam serta dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

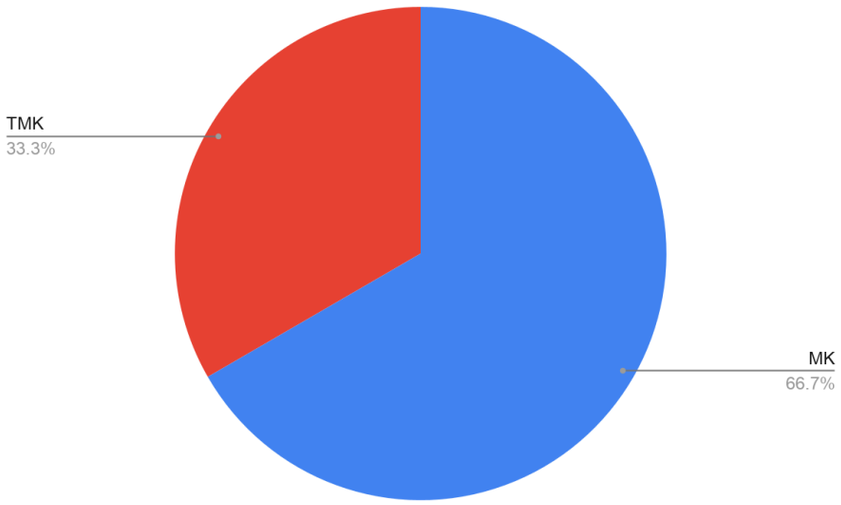
Hasil pengawasan pada sarana distribusi menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan yang signifikan di wilayah kerja Balai POM di Batam. Tingginya tingkat ketidaksesuaian mencerminkan masih adanya celah dalam rantai distribusi, khususnya pada peredaran produk tanpa izin edar.

Karakteristik Batam sebagai wilayah perbatasan dan pintu masuk produk impor menjadi faktor yang meningkatkan risiko masuknya produk kosmetik ilegal ke dalam peredaran. Keberadaan importir yang cukup banyak juga menambah kompleksitas pengawasan terhadap arus masuk produk kosmetik.

Meskipun sebagian besar sarana telah memenuhi ketentuan, proporsi pelanggaran yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sarana distribusi perlu terus diperkuat. Pendekatan pengawasan ke depan perlu diarahkan pada pengawasan berbasis risiko yang lebih tajam, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian peredaran kosmetik ilegal.

3.5.2 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam melakukan sampling terhadap 345 sampel kosmetik dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Dari hasil pengujian terhadap sampel tersebut dengan parameter uji kritis lengkap dan penandaan label, diperoleh hasil sebanyak 230 sampel atau 66,7% memenuhi syarat dan 115 sampel atau 33,3% tidak memenuhi syarat pada aspek penandaan. Data dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Data hasil uji tersaji pada tabel 1A



Gambar 25. Hasil Pengujian Produk Kosmetik

Selain sampel dari kegiatan pengawasan rutin, Balai POM di Batam juga melakukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari Loka POM di Kota Tanjungpinang serta sampel kasus dari Kepolisian, sehingga total sampel yang diuji oleh laboratorium mencapai 455 sampel. Dari total tersebut, hasil pengujian kimia menunjukkan bahwa 452 sampel atau 99,3% memenuhi syarat dan 3 sampel atau 0,7% tidak memenuhi syarat. Sementara itu, pengujian mikrobiologi terhadap 413 sampel menunjukkan bahwa 407 sampel atau 98,55% memenuhi syarat dan 6 sampel atau 1,45% tidak memenuhi syarat.

Data hasil uji rutin produk Kosmetik sudah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) kemudian untuk hasil TMS Pengujian Rutin selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak Direktorat Pengawasan Produk Kosmetik. Sebanyak 1 sampel TMS Kimia (100%) sudah ditindaklanjuti oleh pihak Direktorat Pengawasan Produk Kosmetik. Hasil Tindak Lanjut berupa Siaran pers Nomor HM.01.1.2.10.25.369 Tanggal 31 Oktober 2025 dan Public Warning melalui media Instagram Badan POM Tanggal 7 November 2025. Data hasil uji tersaji pada Tabel 3B.

Jumlah parameter uji fisika dan kimia pada sampel Kosmetik pada tahun 2025 berjumlah 2573 parameter dengan hasil 2568 parameter (99,80%) Memenuhi syarat dan 5 parameter (0.2%) yang tidak memenuhi syarat. Parameter uji yang tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji Identifikasi Merah K10, parameter uji penetapan kadar Logam Merkuri, dan parameter uji identifikasi Logam Merkuri. Data dapat dilihat pada Tabel 2E dan Tabel 3B. Parameter uji mikrobiologi pada produk Kosmetik berjumlah 1604 parameter, dengan hasil 1598 parameter (99.63%) memenuhi syarat dan 6 parameter (0.37%) hasil uji tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir. Data dapat dilihat pada Tabel 2G.

Seluruh hasil pengujian telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Produk Kosmetik, termasuk melalui publikasi peringatan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari sisi mutu dan keamanan, produk kosmetik yang beredar relatif terkendali, yang tercermin dari tingginya tingkat pemenuhan syarat pada parameter kimia dan mikrobiologi. Namun demikian, tingkat ketidaksesuaian yang cukup tinggi pada aspek penandaan menunjukkan bahwa permasalahan utama pada produk kosmetik lebih dominan terjadi pada aspek kepatuhan terhadap regulasi informasi produk.

Ketidaksesuaian pada penandaan berpotensi menimbulkan misinformasi bagi konsumen, terutama terkait klaim manfaat, komposisi, dan cara penggunaan produk. Selain itu, temuan parameter logam berat meskipun dalam jumlah terbatas tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, pola pengawasan kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Batam menunjukkan bahwa risiko terbesar tidak hanya terletak pada mutu produk, tetapi juga pada rantai distribusi dan kepatuhan terhadap ketentuan penandaan. Oleh karena itu, strategi pengawasan ke depan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan distribusi kosmetik ilegal, peningkatan kepatuhan penandaan dan klaim produk, serta penguatan pembinaan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas sistem mutu secara berkelanjutan.

3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

3.6.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Produk Pangan

Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangan olahan yang beredar, pemerintah dalam hal ini Badan POM berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan bertujuan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Pelaksanaan pengawasan ini menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa seluruh rantai pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks wilayah Batam sebagai daerah dengan mobilitas barang dan aktivitas perdagangan yang tinggi, pengawasan pangan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan berbasis risiko.

3.6.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

3.6.1.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD

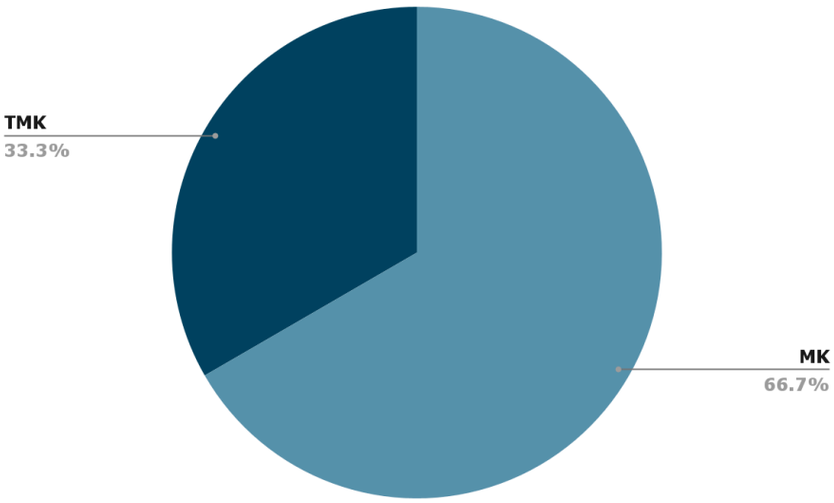
Sarana produksi pangan MD yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam sejumlah 79 sarana, yang terdiri dari 22 sarana produksi pangan yang memproduksi pangan tingkat risiko tinggi, 25 sarana pangan yang memproduksi pangan tingkat risiko sedang dan 32 sarana pangan yang memproduksi pangan tingkat risiko rendah. Di antara 25 sarana pangan yang memproduksi pangan tingkat risiko sedang tersebut, terdapat 3 sarana pangan yang memproduksi pangan fortifikasi.

Selama tahun 2025 pengawasan sarana produksi pangan meliputi pemeriksaan rutin dan audit sarana, untuk memastikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada sarana produksi pangan yang memiliki registrasi MD di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 30 sarana, dengan hasil 20 sarana (66,67%) memenuhi ketentuan dan 10 sarana (33,33%) tidak memenuhi ketentuan dalam hal CPPOB.

Ketidaksesuaian terhadap Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagian besar ditemukan pada aspek higiene, sanitasi, pengawasan mutu produk dan dokumentasi. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan (Hasil Pemeriksaan C dan D) diberikan sanksi berupa peringatan dan peringatan keras ke sarana yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Selain itu Balai POM di Batam melakukan pendampingan CAPA berupa Desk CAPA kepada sarana produksi pangan dengan status CAPA Open melalui daring.

Tingkat kepatuhan sebesar 66,67% menunjukkan bahwa implementasi CPPOB pada sarana produksi pangan MD masih belum optimal, terutama pada aspek dasar yang seharusnya menjadi fondasi sistem jaminan mutu. Masih ditemukannya 33,33% sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengindikasikan adanya gap dalam pemahaman, komitmen, maupun konsistensi penerapan standar oleh pelaku usaha. Data rinci terdapat pada tabel 6E.

Temuan dominan pada aspek higiene, sanitasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait budaya mutu dan sistem manajemen internal perusahaan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko serta pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

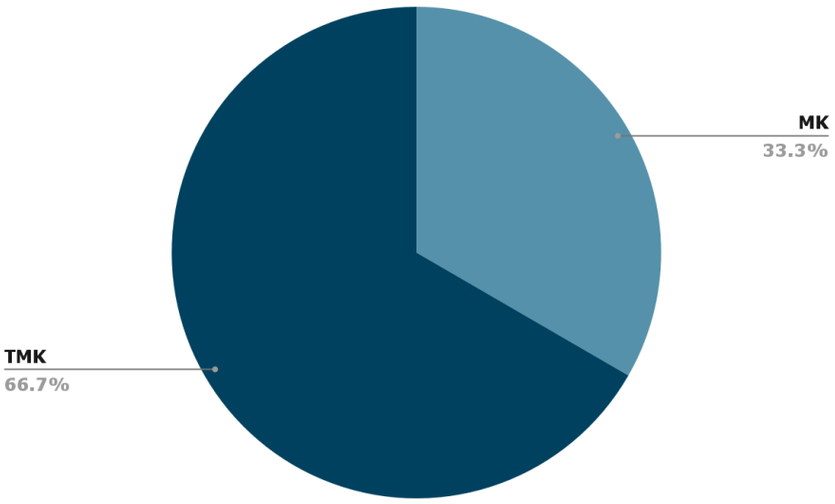


Gambar 26. Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD Balai POM di Batam

3.6.1.1.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP

Jumlah sarana produksi yang memiliki registrasi PIRT di wilayah kerja Balai POM di Batam sebanyak 3.382 sarana yang sudah dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Selama tahun 2025 diperiksa sebanyak 3 sarana, dengan hasil pemeriksaan 1 sarana (33,33%) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (66,67%) tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian pada penerapan CPPB-IRT sebagian besar terdapat pada aspek higiene, sanitasi, tidak memenuhi ketentuan label, dan tidak tertib dalam melakukan dokumentasi. Terhadap hasil pemeriksaan telah diberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti. Data dapat dilihat pada Tabel 6E.

Tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi pada sarana IRTP dibandingkan sarana MD menunjukkan bahwa pelaku usaha skala rumah tangga masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan standar keamanan pangan. Cakupan pemeriksaan yang sangat kecil dibandingkan total populasi (3.382 sarana) mengindikasikan bahwa risiko pada sektor IRTP masih sangat besar dan belum terpetakan secara komprehensif. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan IRTP melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan komunitas.



Gambar 27. Pengawasan Sarana Produksi Pangan IRTP Balai POM di Batam

3.6.1.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

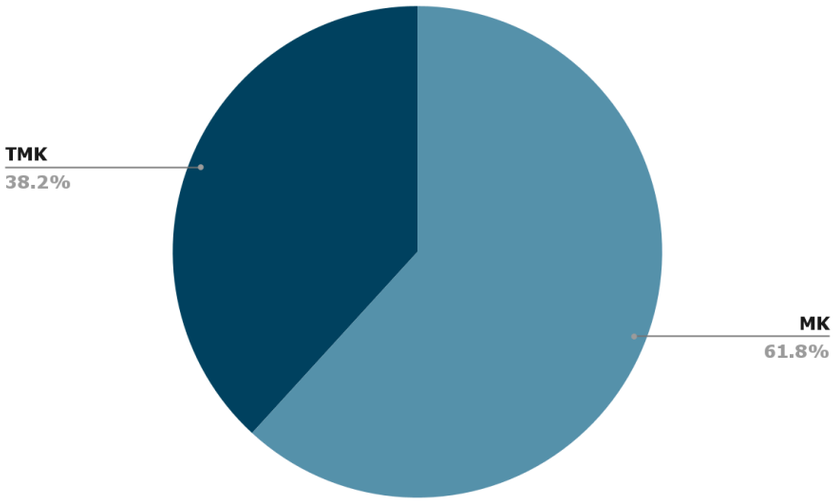
Jumlah sarana distribusi pangan yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam adalah sebanyak 1.869 sarana, yang terdiri dari importir pangan, distributor pangan, dan retail pangan. Pada wilayah kerja Balai POM di Batam terdapat 40 sarana importir pangan yang melakukan pemasukan produk pangan dari negara Malaysia, Thailand, Singapura, Cina, Korea, Vietnam dan Turki. Pada tahun 2025 sarana distribusi pangan (importir/distributor pangan, retail) yang telah diperiksa sebanyak 199 sarana dengan hasil 123 sarana (61,81%) memenuhi ketentuan dan 76 sarana (38,19%) tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana distribusi pangan sebagian besar terdapat pada cara peredaran pangan olahan yang baik, temuan produk pangan rusak, pangan tidak memiliki izin edar dan pangan kedaluwarsa.

Tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, peringatan dan Peringatan Keras sarana dengan tembusan ke Dinas Kesehatan serta Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat, dan terhadap temuan produk temuan telah dimusnahkan oleh pemilik dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan disaksikan petugas Balai POM di Batam. Selain itu Balai POM di Batam melakukan pendampingan pelaporan tindakan perbaikan berupa Desk CAPA kepada pelaku usaha distribusi pangan setiap akhir triwulan secara daring. Data rinci terdapat pada tabel 7C.

Tingkat ketidakpatuhan sebesar 38,19% pada sarana distribusi menunjukkan bahwa risiko peredaran pangan tidak memenuhi ketentuan masih cukup tinggi di hilir rantai pasok. Dominasi temuan berupa produk tanpa izin edar, produk rusak, dan kedaluwarsa mengindikasikan lemahnya pengendalian internal pelaku usaha serta belum optimalnya sistem pengawasan mandiri (*self-control*) di tingkat distribusi. Kondisi ini menjadi krusial mengingat distribusi merupakan titik terakhir sebelum produk sampai ke konsumen, sehingga kegagalan pengendalian pada tahap ini berdampak langsung terhadap risiko

kesehatan masyarakat. Besarnya jumlah sarana (1.869) dibandingkan dengan cakupan pemeriksaan (199 sarana) juga menunjukkan adanya gap pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.

Dengan karakteristik Batam sebagai wilayah perdagangan dan pintu masuk produk impor, penguatan pengawasan distribusi berbasis risiko dan intelijen menjadi kebutuhan strategis untuk menekan peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi syarat.



Gambar 28. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Balai POM di Batam

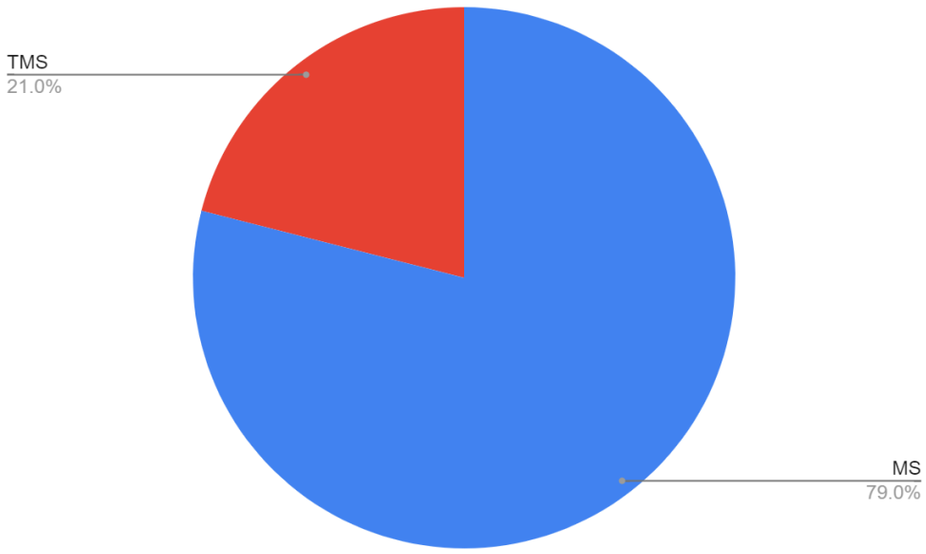
3.6.2 Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pada tahun 2025 jumlah target sampel pangan sebanyak 138 sampel dengan realisasi sampling 100% yang terdiri dari 127 sampel Pangan Olahan dan 11 sampel PIRT. Dari hasil pengujian terhadap 138 sampel dengan parameter uji kritis lengkap dan penandaan label didapatkan 109 sampel (79%) memenuhi syarat dan 29 sampel (21%) tidak memenuhi syarat. Sampel Pangan Olahan dari hasil pengujian dan penandaan label diperoleh hasil uji 99 sampel memenuhi syarat (78%) dan 28 sampel tidak memenuhi syarat (22%), sedangkan untuk sampel PIRT diperoleh hasil uji 10 sampel memenuhi syarat (90,9%) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (9,1%). Data dapat dilihat pada tabel 1A.

Persentase ketidak pemenuhan syarat sebesar 21% menunjukkan bahwa masih terdapat risiko signifikan pada produk pangan yang beredar, khususnya pada aspek penandaan dan parameter uji kritis. Lebih tingginya angka TMS pada pangan olahan dibandingkan PIRT mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terjadi pada pelaku usaha kecil, tetapi juga pada industri yang seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu yang lebih baik.

Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan berbasis komoditas dan risiko, terutama pada jenis pangan olahan yang memiliki potensi pelanggaran tinggi.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengawasan melalui sampling masih menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi ketidaksesuaian produk di peredaran, namun perlu diiringi dengan peningkatan frekuensi dan ketepatan sasaran sampling.



Gambar 29. Hasil Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan

3.6.3 Pengujian Produk Pangan, Mikrobiologi dan Bahan Berbahaya

Peran Balai POM di Batam sebagai laboratorium rujukan regional untuk uji mikotoksin menunjukkan kapasitas teknis yang strategis dalam mendukung pengawasan pangan lintas wilayah, sekaligus memperkuat posisi Batam dalam sistem pengujian nasional. Sampel regionalisasi yang diterima berasal dari Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 70 sampel, BBPOM Banda Aceh (1 sampel), BBPOM Medan (5 sampel), BBPOM Padang (1 sampel), BPOM di Payakumbuh (1 sampel), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (1 sampel), Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (1 sampel), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (1 sampel), Loka POM di Kabupaten Toba (4 sampel), dan Loka POM di Kota Tanjungbalai (5 sampel). Data Pengujian regionalisasi kimia dapat dilihat dari tabel 1D sedangkan data pengujian regionalisasi mikrobiologi dapat dilihat pada tabel 1E.

Pengujian sampel non rutin yang diterima Balai POM di Batam antara lain :

a. Sampel pihak ketiga (swasta dan instansi pemerintah) dalam rangka pelayanan publik sebanyak 13 sampel dengan hasil uji memenuhi syarat (100%)
b. Sampel Food Security sebanyak 23 sampel dengan hasil uji 17 sampel memenuhi syarat (74%) dan 6 sampel tidak memenuhi syarat (26%)
c. Sampel Inwas Ta'jil bulan Ramadhan sebanyak 101 sampel dengan hasil uji 100 sampel memenuhi syarat (99%) dan satu sampel tidak memenuhi syarat (1%)
d. Sampel investigasi/konfirmasi sebanyak 6 sampel dengan hasil uji 6 sampel tidak memenuhi syarat (100%). Tingginya tingkat ketidaksesuaian pada sampel investigasi/konfirmasi (100% TMS) menegaskan bahwa mekanisme intelijen dan

pengawasan berbasis kasus telah berjalan efektif dalam mengidentifikasi produk berisiko tinggi di peredaran.

e. Sampel kasus sebanyak 2 sampel dengan hasil uji memenuhi syarat (100%)
f. Sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 6 sampel diuji dengan parameter mikrobiologi, terdapat 2 sampel memenuhi syarat (33%) dan 4 sampel tidak memenuhi syarat (67%) untuk sampel yang diuji dengan parameter kimia sebanyak 4 sampel dengan hasil uji memenuhi syarat (100%). Temuan signifikan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ketidaksesuaian mikrobiologi sebesar 67%, menjadi sinyal kuat adanya kelemahan dalam aspek higiene dan sanitasi pada penyediaan pangan program pemerintah, yang berpotensi berdampak langsung pada kelompok rentan. Data pengujian sampel non rutin dapat dilihat pada tabel 1B

Total sampel pangan yang diterima baik rutin maupun non rutin adalah adalah 383 sampel dimana 337 sampel (88%) memenuhi syarat dan 46 sampel (12%) tidak memenuhi syarat. Meskipun secara umum tingkat pemenuhan syarat cukup tinggi (88%), keberadaan 12% sampel TMS tetap menunjukkan adanya celah risiko yang tidak dapat diabaikan, terutama karena produk pangan bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat. Data hasil pengujian produk Pangan sudah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan desk dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan beserta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Parameter uji fisika dan kimia pada produk pangan berjumlah 880 parameter dimana terdapat parameter (99%) memenuhi syarat dan parameter uji (1%) yang tidak memenuhi syarat yaitu 2 parameter PK Okratoksin, 2 parameter PK Aflatoksin Total, 1 parameter PK Cemaran Pb. Data dapat dilihat pada Tabel 2F.
Parameter uji mikrobiologi pada produk pangan dan air berjumlah 394 parameter, dimana terdapat 380 parameter (96.44%) yang memenuhi syarat dan 14 parameter (3.56%) yang tidak memenuhi syarat yaitu 8 parameter Angka Lempeng Total, 2 parameter Angka Coliform, 2 parameter MPN Coliform, 1 parameter Angka Enterobacteriaceae, 1 parameter terdeteksi Porcine. Data dapat dilihat pada Tabel 2G.

Temuan cemaran kimia seperti Okratoksin, Aflatoksin, dan logam berat (Pb) mengindikasikan adanya risiko kontaminasi dari bahan baku maupun proses produksi, yang memerlukan penguatan pengawasan hulu serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan bahan baku. Sementara itu, ketidaksesuaian mikrobiologi yang masih ditemukan menunjukkan bahwa aspek higiene sanitasi dan pengendalian proses masih menjadi titik kritis dalam rantai produksi dan distribusi pangan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pengawasan pre-market dan post-market, serta penguatan pendekatan berbasis risiko dan intelijen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan di wilayah kerja Balai POM di Batam.

3.6.4 IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan

Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan yang menyasar berbagai komunitas di 3 kelurahan di Kota Batam, salah satunya adalah komunitas IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) oleh Kader Keamanan Pangan Desa. Materi yang disampaikan difokuskan pada pemenuhan persyaratan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sehingga pelaku usaha tidak hanya memahami aspek keamanan pangan namun juga mampu memenuhi ketentuan legalitas usaha secara mandiri.

Melalui pendampingan Balai POM di Batam, sebanyak 9 komunitas IRTP di kelurahan intervensi telah memperoleh sertifikat SPP-IRT. Adapun produk pangan olahan yang didaftarkan antara lain hasil olahan ikan, hasil olahan tepung, produk olahan buah serta umbi-umbian. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendorong optimalisasi potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar.

Balai POM di Batam juga memperkuat sinergi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya dalam kegiatan pemeriksaan sarana IRTP dan sampling produk. Dukungan ini juga diwujudkan melalui partisipasi aktif sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 4 kali pelatihan pada tanggal 21 Juni, 06 September, 02 Desember, dan 11 Desember 2025, yang secara konsisten memperluas jangkauan edukasi serta memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan.

Peningkatan kapasitas pelaku usaha IRTP dalam menerapkan standar keamanan pangan akan berimplikasi pada peningkatan kualitas produk, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar. Kegiatan ini turut berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui penciptaan nilai tambah produk lokal, peningkatan produktivitas usaha, serta potensi penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM pangan.

Program penyuluhan dan pendampingan IRTP menunjukkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga pemberdayaan pelaku usaha, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Keberhasilan 9 komunitas IRTP memperoleh SPP-IRT menjadi indikator nyata bahwa intervensi berbasis komunitas efektif dalam mendorong legalitas dan peningkatan kualitas produk pangan lokal. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah total IRTP di wilayah kerja yang mencapai ribuan, cakupan intervensi ini masih relatif terbatas sehingga dampaknya belum merata secara keseluruhan.

Penguatan sinergi lintas sektor melalui DAK dan keterlibatan aktif dalam pembinaan daerah menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan dan pembinaan IRTP. Secara strategis, program ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan pangan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal, peningkatan daya saing UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

3.6.5 Data kasus keracunan

Berdasarkan data aplikasi SPIMKer Badan POM RI sepanjang tahun 2025, dilaporkan bahwa total kejadian keracunan di wilayah kerja Balai POM di Batam mencapai 77 kasus. Data kasus keracunan tersebut diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan input data sepanjang tahun 2025. Distribusi kasus didominasi oleh kategori minuman sebanyak 32 kasus, diikuti oleh kategori campuran sebesar 18 kasus, dan NAPZA sebanyak 13 kasus sesuai pada Tabel 19A.

Data pada Tabel 19B mengungkapkan bahwa kelompok usia 15-29 tahun merupakan segmen yang paling terdampak dengan total 44 kasus, disusul oleh kelompok usia 30-49 tahun sebanyak 29 kasus. Kemudian data frekuensi keracunan pada Tabel 19C menunjukkan sentralisasi kasus yang signifikan di Kota Batam, dengan total 69 insiden dari keseluruhan 77 kasus yang tercatat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi di Kepulauan Riau, Kota Batam menunjukkan kompleksitas risiko yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Natuna (4 kasus), Kabupaten Karimun (3 kasus), dan Kabupaten Lingga (1 kasus), sementara Kabupaten Kepulauan Anambas mencatatkan nihil kasus. Tingginya angka di Kota Batam dipicu oleh diversitas penyebab yang mencakup pangan (52 kasus), NAPZA (13 kasus), obat (3 kasus), dan obat bahan alam (1 kasus).

Hal ini mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk, pola konsumsi masyarakat urban, serta kemudahan akses terhadap berbagai produk komoditas berkontribusi langsung terhadap eskalasi risiko keracunan di wilayah tersebut. Meskipun angka kematian nihil, tingginya jumlah penderita yang sakit menunjukkan bahwa upaya preventif melalui edukasi publik dan optimalisasi pelaporan melalui aplikasi SPIMKer

Badan POM RI harus terus ditingkatkan untuk dapat mendeteksi kasus keracunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Data Tabel 19D khusus membahas insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Batam selama tahun 2025. Teridentifikasi 4 (empat) kasus KLB KP yang melibatkan total sebanyak 270 orang sakit (227 orang di MAN 2 Kota Batam, 17 orang di SDN 016 Sagulung Kota Batam, 11 orang di SMP 4 Tebing Kabupaten Karimun, dan 15 orang di SMPN 2 Kabupaten Karimun).

Seluruh insiden diklasifikasikan dalam status “Sudah Berakhir” dengan tidak adanya korban jiwa. Seluruh insiden tercatat terjadi di lembaga pendidikan pada waktu makan rutin dan dalam konteks Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Hal ini menjadi variabel krusial yang menunjukkan adanya titik kritis (*critical control point*) pada proses penyediaan pangan jasa boga yang melayani program pemerintah tersebut.

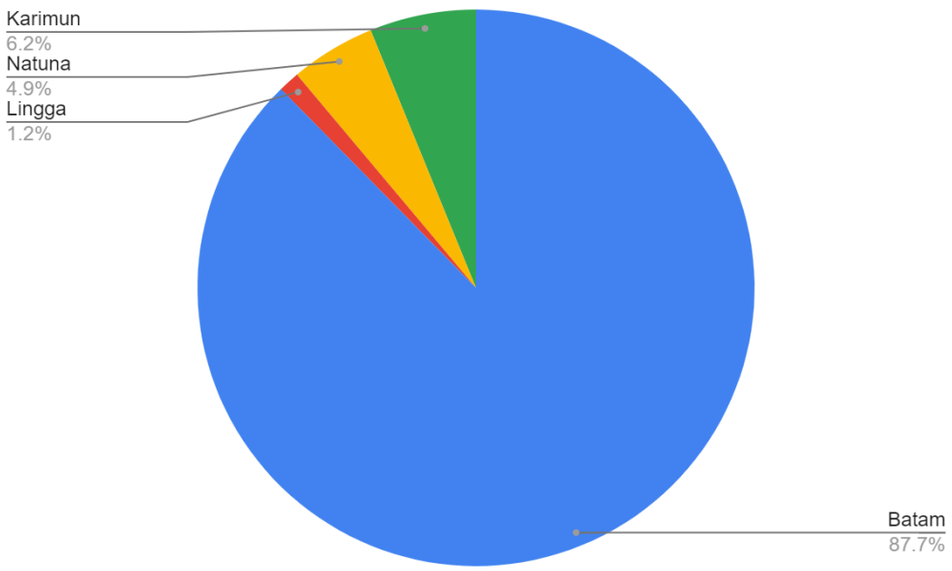
Secara umum, agen penyebab seluruh kasus tersebut dikategorikan sebagai kontaminasi mikrobiologi, meskipun hingga status KLB KP dinyatakan berakhir, agen spesifik masih berada dalam tahap belum terverifikasi akibat kesulitan mendapatkan sampel spesimen yang diuji. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam prosedur pengambilan sampel di lapangan.

Sebagai upaya preventif, diperlukan penguatan pengawasan bagi vendor jasa boga dan audit berkala terhadap rantai pasok pangan pada program MBG, sehingga keamanan pangan dapat tercapai serta mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Dominasi kasus di Kota Batam (69 dari 77 kasus) menegaskan bahwa wilayah urban dengan mobilitas tinggi memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih besar terhadap kejadian keracunan dibandingkan wilayah kepulauan lainnya.

Kelompok usia produktif (15-29 tahun) sebagai kelompok paling terdampak menunjukkan bahwa pola konsumsi cepat, aktivitas tinggi, serta paparan terhadap berbagai jenis pangan menjadi faktor risiko utama. Komposisi penyebab yang didominasi oleh pangan (52 kasus) mengindikasikan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi isu utama dibandingkan faktor lain seperti obat dan NAPZA.

Terjadinya KLB di lingkungan sekolah dalam konteks program MBG merupakan sinyal serius adanya kelemahan pada sistem pengendalian keamanan pangan massal, khususnya pada penyedia jasa boga. Kondisi ini menunjukkan bahwa titik kritis pengawasan tidak hanya berada pada produk, tetapi juga pada proses penyediaan, distribusi, dan penyajian pangan dalam skala besar.

Kendala dalam identifikasi agen spesifik akibat keterbatasan sampel menunjukkan perlunya penguatan sistem respon cepat dan tata laksana investigasi kasus di lapangan. Secara strategis, data ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan pangan harus difokuskan pada pendekatan berbasis risiko, peningkatan pengawasan pada program prioritas pemerintah, serta penguatan edukasi masyarakat untuk menekan kejadian keracunan di masa mendatang.



Gambar 30. Data Kasus Keracunan Tahun 2025

3.6.6 Desa yang diintervensi keamanan pangan

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam secara konsisten melaksanakan program yang bertujuan untuk membangun budaya keamanan pangan berbasis komunitas. Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan (GKPD) diimplementasikan pada 3 Kelurahan di Kota Batam, yaitu Kelurahan Ngenang, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Batu Besar. Dalam pelaksanaannya, program GKPD telah membentuk sebanyak 15 Kader Keamanan Desa/Kelurahan dan 75 anggota komunitas dari beberapa kelompok strategis. Selain itu, 9 komunitas IRTP yang didampingi telah mendapatkan sertifikat SPP-IRT sebagai upaya pertumbuhan UMKM pangan. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan aspek legalitas usaha, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan.

Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Program *new initiative 'Food Safety* Masuk Desa' atau Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan (GKPD) merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membudayakan praktek keamanan pangan di komunitas desa/kelurahan di seluruh

Indonesia. Untuk Tahun 2025 kegiatan GKPD ini dilaksanakan di Kota Batam. Kelurahan yang diintervensi yaitu di Kelurahan Ngenang, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Batu Besar. Balai POM di Batam melaksanakan serangkaian kegiatan ini pada bulan Januari hingga November 2025. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

Tahap I Perkuatan Kapasitas Desa/Kelurahan

1. Kegiatan Re-Orientasi Peran Pemerintah atau Advokasi Kelembagaan Kelurahan di Tingkat Kota, dilaksanakan 2 kali di Kota Batam yaitu pada awal kegiatan dan monitoring evaluasi menjelang akhir kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang lintas sektor terkait seperti Walikota Batam; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Ketua DPRD Kota Batam; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam; Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (beserta petugas yang membidangi urusan industri rumah tangga pangan, hygiene dan sanitasi rumah makan dan pasar); Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (beserta petugas yang membidangi Perizinan untuk UMKM Pangan); Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam (beserta staf yang membidangi pasar, umkm, dan perindag); Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam (mewakili jenjang SD dan SMP); Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam (beserta staf yang membidangi ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan); Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; Kantor Kementrian Agama Kota Batam (bersama staf yang membidangi madrasah dan perizinan halal); Lurah Kelurahan Batu Besar; Lurah Kelurahan Sambau; Lurah Keluraha Ngenang; Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam.
2. Kegiatan pelatihan bagi Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan (termasuk Korlap dan Fasilitator lapangan). Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan terhadap 5 orang kader dari masing-masing Kelurahan yang diintervensi, yaitu Kelurahan Ngenang, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Batu Besar. Jumlah seluruh kader sebanyak 15 orang dengan komposisi Laki-Laki sebanyak 3 orang (20%) dan perempuan sebanyak 12 orang (80%). Dimana Narasumber berasal dari Balai POM di Batam.

Tahap II Pemberdayaan Komunitas Desa/Kelurahan

1. Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan untuk 6 Komunitas di masing-masing Desa/Kelurahan terhadap komunitas Ibu Rumah Tangga/PKK, Guru/Kantin Sekolah, Pemuda/Remaja, usaha pangan desa (IRTP), PKL dan Retail. Jumlah

total komunitas yang dibimtek di setiap Kelurahan yang diintervensi adalah 20 dan 35 orang. Narasumber dalam bimtek komunitas ini berasal dari Balai POM di Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Batam dan Kader Keamanan Pangan Desa. Jumlah seluruh komunitas sebanyak 75 orang dengan komposisi Laki-Laki sebanyak 8 orang (10.67%) dan perempuan sebanyak 67 orang (89.33%).

2. Pemberdayaan komunitas desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dikoordinir oleh kepala desa dan perangkat desa yang bergabung dalam Tim Keamanan Pangan Desa dengan memberikan informasi terkait keamanan pangan untuk meningkatkan jumlah komunitas yang sadar dengan keamanan pangan desa.

Tahap III Pengawasan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa kepada komunitas/ masyarakat desa. Para Kader Keamanan Pangan meninjau dan menyuluh langsung masyarakat desa.

Pengukuran pengetahuan kader dan komunitas dilakukan melalui pre dan post test pada tahap awal dan akhir kegiatan. Hasil post test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait keamanan pangan pada kader maupun komunitas. Peran kader sebagai agen perubahan semakin optimal melalui kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat, sehingga tercipta mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesadaran kolektif serta perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu.

Pelaksanaan rencana aksi mandiri oleh masing-masing kelurahan menunjukkan adanya internalisasi program yang kuat, dimana pemerintah desa dan masyarakat mampu melanjutkan inisiatif keamanan pangan secara independen. Hal ini menjadi indikator keberhasilan program dalam menciptakan keberlanjutan dan kemandirian masyarakat dalam menjaga keamanan pangan. Program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha pangan di tingkat desa/kelurahan.

3.6.7 Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan (SAPA SEKOLAH)

Balai POM di Batam pada tahun 2025 telah melaksanakan rangkaian program SAPA Sekolah dengan membentuk 28 Kader Keamanan Pangan Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru serta komite sekolah. Sebanyak 7 sekolah telah mendapatkan

Sertifikat Sekolah yang Sudah Membudayakan Keamanan Pangan dengan skor penilaian ≥ 90. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dilakukan terhadap 7 sekolah yang terdiri 3 SD/MI, 2 SMP/MTS, dan 2 SMA/SMK/MA di Kota Batam. Bimbingan Teknis Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dilaksanakan dua kali secara luring, Pada pelaksanaan pertama total peserta 20 orang dengan rincian 6 (30%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 14 (70%) orang berjenis kelamin perempuan. Kemudian pada pelaksanaan kedua total peserta 8 orang (100%) berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa peserta bimbingan teknis didominasi oleh perempuan, oleh karena itu upaya untuk kedepannya akan diberikan himbauan kepada pihak sekolah dan lintas sektor untuk melibatkan peserta yang imbang gender. Selain itu sekolah diberikan Produk Informasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sebagai penunjang kegiatan sekolah. Data dapat dilihat pada tabel 21A dan 21B. Balai POM di Batam juga memberikan Sertifikat Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman terhadap sekolah yang telah menerapkan komitmen dan program keamanan pangan di sekolahnya. Data dapat dilihat pada Tabel 21C. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat diperlukan oleh anak sekolah untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah.

Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) kader dan siswa diukur selama kegiatan intervensi. Hasil data menunjukkan peningkatan dari ketiga aspek tersebut mendapat nilai ≥ 80 yang memberikan poin maksimal pada hasil sertifikasi masing-masing sekolah. Selain itu, peningkatan pemahaman terkait keamanan pangan juga diukur melaui post test kegiatan sosialisasi kepada komunitas sekolah baik kepada siswa, guru maupun pedagang kantin yang menampilkan trend peningkatan. Intervensi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan dan sikap, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta penguatan sistem pengawasan pangan di lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, upaya ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah, yang pada akhirnya akan mendukung optimalisasi proses belajar serta pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif.

3.6.8 Pasar pangan aman berbasis komunitas

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam melakukan intervensi pengawasan dan pemberdayaan terhadap salah satu pasar di Kota Batam yaitu Pasar Summerland Batam. Sebanyak 17 komunitas pasar mengikuti Bimbingan Teknis serta Penyuluhan yang terdiri dari 5 pengelola pasar serta 12 pedagang pasar. Terhadap pasar yang dilakukan intervensi diberikan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Pengawasan Keamanan Pangan. Adapun tahapan dari kegiatan PPABK yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dengan jumlah peserta laki-laki 7 orang (41,18%) dan peserta perempuan 10 orang (58,82%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dengan mengunggah video konten terkait keamanan pangan dengan tema aplikasi BPOM Mobile, bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, keamanan pangan pada sarana ritel, dan urutan berbelanja sesuai prinsip keamanan pangan.
3. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dengan jumlah total 45 sampel pangan olahan yang terdiri dari 38 (84,44%) sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 7 (15,56%) sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menggunakan metode Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).

Berdasarkan data diatas, pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, jumlah peserta laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Namun dapat dilakukan himbauan kepada lintas sektor terkait untuk melibatkan peserta dengan ketentuan imbang gender.

Balai POM di Batam juga melakukan inisiasi sampling dan pengujian terhadap 18 sampel produk pangan di Pasar Summerland. Hasil uji menunjukkan 13 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel TMS tediri dari 3 sampel kerupuk positif boraks dan 2 sampel ikan asin positif formalin. Pengujian dilakukan menggunakan rapid test kit dan rujukan ke laboratorium Balai POM di Batam. Surat Tindak Lanjut disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam serta Pengelola Pasar Summerland melalui surat dinas nomor PW.07.3B.07.25.3918 per tanggal 28 Juli 2025. Pada akhir tahapan program PPABK, sampel produk TMS sudah tidak diperjualbelikan kembali di pasar dan tindak lanjut terhadap pengawasan produsen dilanjutkan oleh stakeholder terkait.

Intervensi pasar meningkatkan kapasitas pelaku pasar serta kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan pangan. Sosialisasi keamanan pangan secara berkelanjutan melalui media digital merupakan bentuk transformasi strategi komunikasi publik terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan intervensi ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pemberdayaan komunitas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan pangan

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Selama tahun 2025, Balai POM di Batam melakukan evaluasi *pre-market* melalui kegiatan sertifikasi dalam rangka pemasukan dan pengeluaran produk Obat dan Makanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Riau serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka

sertifikasi atau registrasi. Total layanan sertifikasi yang diterbitkan dalam rangka ekspor impor berjumlah 5.120 layanan terdiri dari Surat Keterangan Impor (SKI) sebanyak 2.344 layanan (SKI Produk Pangan, SKI Bahan Baku Pangan, SKI Kosmetika) dan 2.776 layanan Surat Keterangan Ekspor (*Health Certificate, Certificate Free Sale, To Whom It May Concern*). Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi atau registrasi meliputi Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK, Pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA, Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Skala UMK, Pemeriksaan Sertifikasi dalam rangka Surveilan SMKPO, Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB Skala Usaha Menengah dan Besar, Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik dilakukan terhadap 59 sarana dengan hasil diterbitkannya 59 hasil pemeriksaan dan rekomendasi terhadap pemenuhan persyaratan sarana.

Berdasarkan data pengguna layanan SKI tahun 2025 yaitu dari 51 importir yang ada di Kepulauan Riau, diperoleh data proporsi penanggung jawab SKI pada 51 sarana tersebut yaitu 25 orang (49,02 %) berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang (50,98 %) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah eksportir yang mengajukan layanan SKE pada tahun 2025 sebanyak 8 sarana dengan proporsi penanggung jawab sarana 3 orang (37,50 %) berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang (62,5 %) berjenis kelamin perempuan.

Salah satu kegiatan yang berupa pertemuan dalam rangka sertifikasi yang dilakukan Balai POM di Batam adalah Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang dilakukan secara *offline* selama dua hari dan diikuti oleh 33 orang peserta dengan komposisi 18 orang (54,54%) berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang (45,45%) berjenis kelamin perempuan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peserta kegiatan masih didominasi oleh laki-laki dan belum imbang gender. Pada surat undangan kegiatan tidak dicantumkan link konfirmasi kehadiran yang berisi jenis kelamin peserta yang diundang sehingga tidak dapat dipetakan proporsinya. Sebagai tindakan perbaikan, untuk mendukung pengarusutamaan gender, maka pada setiap undangan kegiatan akan dicantumkan link konfirmasi kehadiran yang berisi jenis kelamin peserta yang akan hadir mengikuti kegiatan.

Balai POM di Batam juga melakukan pendampingan terhadap UMK produksi pangan olahan dimulai dari tahap Pemetaan, Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan UMK Pangan Olahan Target, Bimbingan Teknis terkait Pemenuhan Izin Penerapan CPPOB, Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB hingga Desk Registrasi Pangan Olahan untuk memperoleh izin edar. Pada tahun 2025, target pendampingan UMK Balai POM di Batam yaitu sebanyak 10 UMK Pangan Olahan. Hasil damri pendampingan berupa 8 sarana UMK Pangan Olahan mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan

Olahan yang Baik (IP CPPOB). Dari 8 UMK Pangan Olahan yang telah mendapatkan IP CPPOB tersebut, terdapat 3 UMK berhasil memperoleh izin edar BPOM RI MD.

Data Terpilah dari 10 sarana UMK Pangan Olahan memiliki proporsi penanggung jawab sarana yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 6 orang (60.00 %) dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 4 orang (40.00%). Dalam menetapkan sasaran pendampingan, Balai POM di Batam mendorong kesetaraan gender sehingga dapat memberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin dan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan kondisi imbang gender.

3.8 Pemantauan Iklan dan Label

Pemantauan iklan dan label merupakan bagian penting dalam pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan serta memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemantauan terhadap materi promosi yang disampaikan kepada publik serta kesesuaian informasi pada label atau penandaan produk.

3.8.1 Pemantauan Iklan

Iklan merupakan salah satu media yang memegang peranan penting dalam memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat. Pada tahun 2025, Balai POM di Batam melakukan pengawasan iklan sebanyak 536 iklan terdiri dari 74 iklan obat, 65 iklan obat bahan alam, 10 iklan obat kuasi, 32 iklan suplemen kesehatan, 233 iklan kosmetika dan 122 iklan pangan .

Dari keseluruhan iklan sebanyak 327 iklan (61,01%) memenuhi ketentuan dan 209 iklan (38,99%) tidak memenuhi ketentuan. Hasil pemantauan iklan dilaporkan kepada Badan POM melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Untuk pemantauan bersama PPID terdapat 1 iklan yang ditindaklanjuti yakni iklan obat tradisional pada media radio yang telah diberi peringatan . Data hasil pemantauan iklan dapat dilihat pada Tabel 10.

Proporsi iklan tidak memenuhi ketentuan yang mencapai 38,99% menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian informasi produk masih relatif rendah. Dominasi pelanggaran pada iklan mengindikasikan bahwa aspek promosi masih menjadi celah utama dalam penyimpangan regulasi dibandingkan aspek produksi.

Peran media sebagai sarana promosi yang masif berpotensi memperluas dampak negatif apabila tidak diawasi secara ketat, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Tindak lanjut berupa pemberian peringatan perlu diimbangi dengan strategi pembinaan dan edukasi agar pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Secara strategis, pengawasan iklan harus diperkuat dengan pendekatan digital surveillance mengingat pergeseran media promosi ke platform digital yang semakin dominan.

3.8.2 Pemantauan Label/ Penandaan

Pemantauan label/ penandaan obat dan makanan termasuk rokok, dilakukan untuk memastikan apakah produsen telah mencantumkan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat untuk setiap produk obat dan makanan yang diedarkan. Selain itu, pemantauan label/ penandaan obat dan makanan dilakukan untuk memastikan apakah label kemasan produk obat dan makanan yang beredar masih sesuai dengan label yang telah disetujui oleh Badan POM. Pemantauan label/penandaan dilakukan terhadap kemasan sampel obat dan makanan termasuk rokok yang disampling tahun 2025.

Balai POM di Batam melakukan pemantauan terhadap 1024 label/ penandaan yang terdiri dari 888 label/ penandaan obat dan makanan sesuai ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 dan 148 label rokok. Hasil Pemantauan label/ penandaan diperoleh 806 (78,72%) label/ penandaan memenuhi ketentuan dan222 (21,28 %) label/ penandaan tidak memenuhi ketentuan. Data hasil pemantauan label/ penandaan dapat dilihat pada Tabel 11.

Persentase ketidaksesuaian label sebesar 21,28% menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pemenuhan aspek informasi produk oleh pelaku usaha. Label sebagai sumber informasi utama bagi konsumen memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan, sehingga ketidaksesuaian berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian konsumen. Dibandingkan dengan pelanggaran iklan, tingkat ketidaksesuaian label relatif lebih rendah, yang menunjukkan bahwa pengawasan pre-market terhadap label telah berjalan lebih efektif. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pengawasan post-market untuk memastikan konsistensi antara label yang disetujui dengan produk yang beredar di lapangan. Secara strategis, peningkatan literasi konsumen terhadap label produk juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha melalui mekanisme kontrol sosial.

3.9 Penyidikan Kasus/Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam berhasil melaksanakan serangkaian tindakan yang signifikan dalam rangka penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dengan menyelesaikan sebanyak 4 (empat) perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan, dimana 1 (satu) perkara merupakan carry over dari tahun 2024. Dengan demikian, realisasi jumlah perkara Balai POM di Batam tahun 2025 sebanyak 4 (empat) perkara

dengan persentase kinerja sebesar 88,75% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen).

Dari keseluruhan perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (P19) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, 2 (dua) perkara telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Batam dengan kekuatan hukum tetap, dan 1 (satu) perkara carry over tahun 2024 telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri setempat dengan kekuatan hukum tetap.

Selain itu, pada tahun 2025 Balai POM di Batam telah melaporkan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) data rawan kasus yang terdiri dari komoditi kosmetika sebanyak 19 (sembilan belas) kasus, obat sebanyak 14 (empat belas) kasus, pangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus, obat bahan alam sebanyak 18 (delapan belas) kasus, dan obat kuasi sebanyak 8 (delapan) kasus.

Berdasarkan data tersebut, sumber produk yang menjadi objek pengawasan berasal dari berbagai negara, antara lain China, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea, serta produk yang berasal dari Kota Batam. Modus pengadaan atau pemasukan produk-produk yang tidak memiliki izin edar tersebut pada umumnya berasal dari pemesanan melalui marketplace, pemesanan langsung dari luar negeri, pengiriman melalui jasa ekspedisi, barang bawaan penumpang, serta pembelian secara daring melalui e-commerce.

Distribusi produk tanpa izin edar tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, sementara untuk penjualan secara daring memiliki jangkauan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran telah bergeser dari pola konvensional menuju pola digital lintas wilayah.

Dalam rangka penguatan penegakan hukum, Balai POM di Batam terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan melalui kerja sama dan sinergi lintas sektor dengan Criminal Justice System (CJS) serta instansi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait. Sinergi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan misi peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Tingkat penyelesaian perkara sebesar 88,75% menunjukkan kinerja penegakan hukum yang relatif optimal, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai penyelesaian 100% terutama pada aspek percepatan proses hukum.

Dominasi temuan pada komoditi pangan dan kosmetika mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pelanggaran, baik dari sisi permintaan pasar maupun kemudahan distribusi. Modus operandi yang didominasi oleh kanal digital seperti marketplace dan e-commerce menunjukkan adanya pergeseran signifikan pola kejahatan dari konvensional menjadi berbasis digital, sehingga memerlukan penguatan strategi pengawasan siber (cyber surveillance).

Keterlibatan lintas negara dalam sumber produk ilegal menegaskan bahwa isu ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merupakan bagian dari rantai pasok global yang membutuhkan koordinasi lintas otoritas. Tingginya distribusi di wilayah Batam sebagai kawasan perdagangan dan pintu masuk internasional menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi determinan utama dalam risiko peredaran produk ilegal.

Penguatan sinergi dengan Criminal Justice System (CJS) dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis, namun perlu diikuti dengan integrasi data intelijen dan pengawasan terpadu untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan serta cara-cara penggunaan produk yang rasional. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produknya.

Kegiatan dalam layanan publik Balai POM di Batam meliputi layanan informasi, layanan sertifikasi, dan layanan pengujian. Layanan informasi yang telah dilakukan Balai POM di Batam tahun 2025 terdiri dari pemberian layanan informasi dan pengaduan yang dilakukan selama jam kerja setiap hari dengan total layanan sebanyak 688. Layanan ini dilakukan melalui konsultasi tatap muka dan WhatsApp yang terdiri dari layanan informasi sebanyak 686 orang serta pengaduan sebanyak 2 orang.

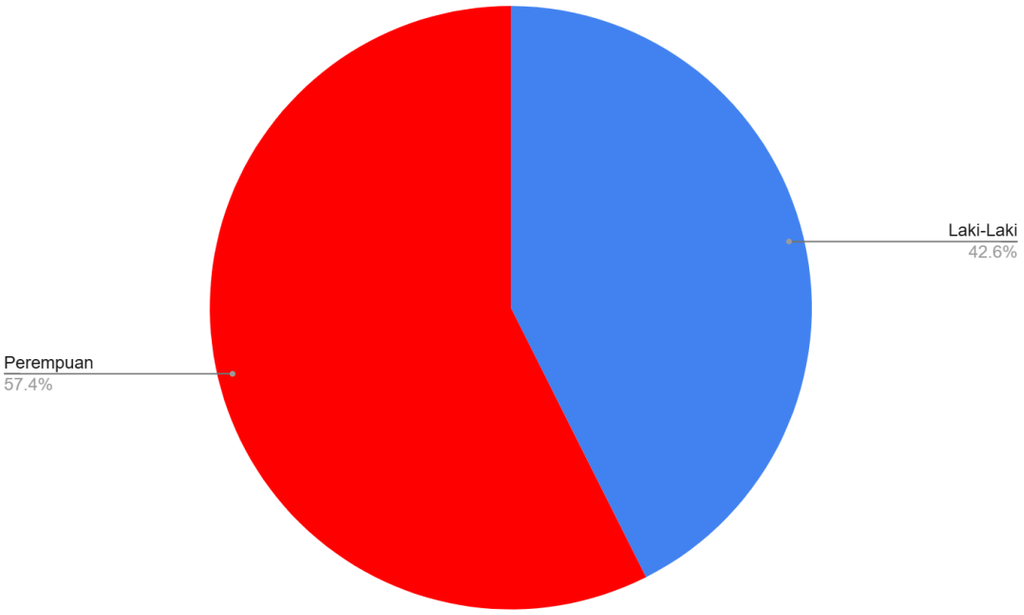
Selain itu, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui platform Instagram, Facebook, dan Twitter Balai POM di Batam dengan konten yang dipublikasikan di antaranya terkait obat, kosmetik, obat bahan alam, pangan olahan, stunting, serta isu-isu aktual di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kegiatan KIE melalui media elektronik dan cetak juga dilaksanakan sebanyak 5 kali, yang terdiri dari iklan layanan masyarakat melalui siaran radio Batam FM sebanyak 3 kali serta publikasi pada media cetak melalui koran Tribun Batam dan leaflet yang disediakan di ruang layanan ULPK.

Selanjutnya, Balai POM di Batam juga melaksanakan kegiatan pameran dan sosialisasi sebanyak 38 kali. Pameran yang dilaksanakan meliputi display produk TIE serta edukasi terkait NAPZA. Kegiatan sosialisasi menyasar berbagai kelompok sasaran, antara lain komunitas sekolah, masyarakat umum, kader PKK, tenaga kesehatan, pelaku usaha, pengelola pasar, serta SAKA POM. Tema sosialisasi yang disampaikan meliputi edukasi obat dan makanan, stunting, pengurusan izin edar, serta ruang lingkup pengawasan BPOM.

Selain itu, Balai POM di Batam juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan pada instansi dan stakeholder lain sebanyak 19 kali. Instansi penyelenggara antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, serta Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Materi yang disampaikan meliputi pendaftaran izin edar, keamanan pangan, serta sistem pengawasan obat dan makanan oleh BPOM.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 15A, 15B, 16A, 16B, dan 16C.
Berdasarkan data Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), pada tahun 2025 jumlah layanan informasi yang diberikan sebanyak 688 layanan, dengan komposisi pengguna layanan laki-laki sebanyak 292 orang (42,57%) dan perempuan sebanyak 394 orang (57,43%). Sementara itu, jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 2 pengaduan dengan komposisi masing-masing 1 orang laki-laki (50%) dan 1 orang perempuan (50%).

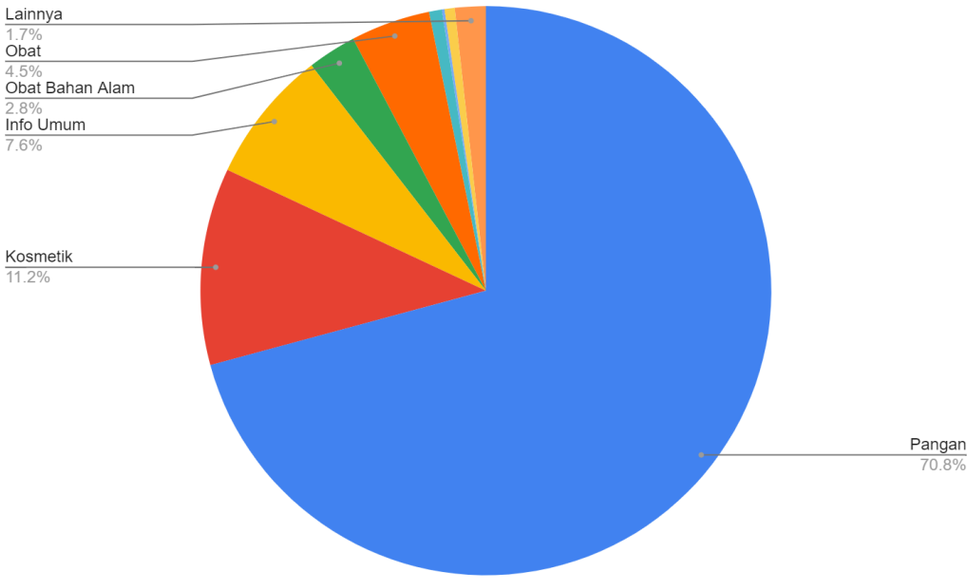


Gambar 31. Jumlah Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan Balai POM di Batam per Gender

Tabel 4. Tabel Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan per Gender

Jenis Layanan	Laki-laki	Perempuan
Layanan Informasi Obat dan Makanan	292	394
Layanan Pengaduan	1	1

Berdasarkan jenis komoditi, pertanyaan terkait produk pangan merupakan yang paling dominan yaitu sebanyak 487 pertanyaan (70,78%), diikuti kosmetik sebanyak 77 pertanyaan (11,19%), informasi umum sebanyak 52 pertanyaan (7,56%), obat sebanyak 31 pertanyaan (4,51%), obat bahan alam sebanyak 19 pertanyaan (2,76%), suplemen kesehatan sebanyak 5 pertanyaan (0,73%), NAPZA sebanyak 1 pertanyaan (0,15%), PKRT sebanyak 4 pertanyaan (0,58%), serta kategori lainnya sebanyak 12 pertanyaan (1,74%).

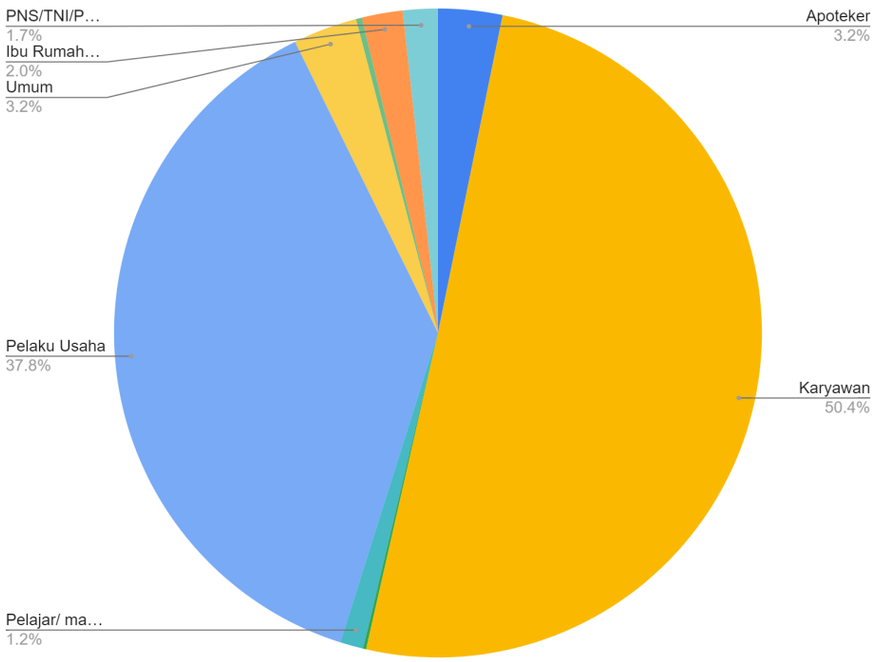


Gambar 32. Jumlah Layanan Informasi Balai POM di Batam per Komoditi

Tabel 5. Tabel Jumlah Layanan Informasi per Komoditi

Komoditi	Jumlah Pertanyaan	Persentase
Pangan	487	70,78%
Kosmetik	77	11,19%
Info Umum	52	7,56%
Obat Bahan Alam	19	2,76%
Obat	31	4,51%
Suplemen Kesehatan	5	0,73%
Napza	1	0,15%
Alkes	0	0%
PKRT	4	0,58%
Bahan Berbahaya	0	0%
Lainnya	12	1,74%

Ditinjau dari profesi, konsumen penerima layanan ULPK sebagian besar berasal dari kelompok karyawan sebanyak 346 orang (50,29%), diikuti pelaku usaha sebanyak 260 orang (37,79%), apoteker sebanyak 22 orang (3,2%), masyarakat umum sebanyak 22 orang (3,2%), ibu rumah tangga sebanyak 14 orang (2,03%), PNS/TNI/POLRI sebanyak 12 orang (1,74%), pelajar/mahasiswa sebanyak 8 orang (1,16%), wartawan sebanyak 2 orang (0,29%), serta LSM sebanyak 1 orang (0,15%).



Gambar 33. Profesi Konsumen Penerima Layanan Informasi Balai POM di Batam

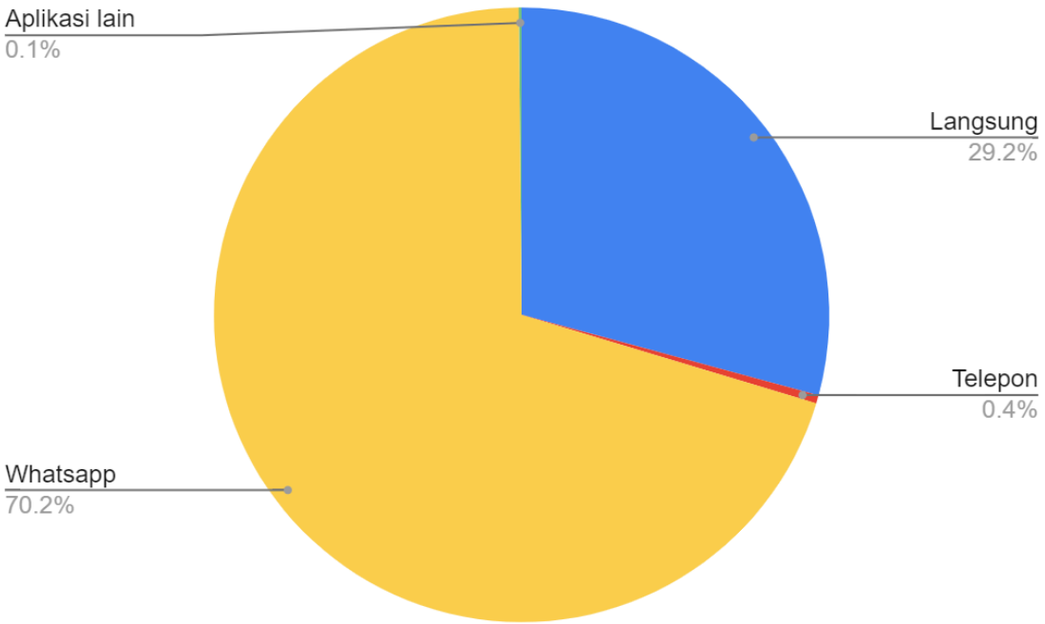
Tabel 6. Tabel Profesi Konsumen Penerima Layanan Informasi

Profesi	Jumlah	Persentase
Apoteker	22	3,2%
Dokter	0	0%
Karyawan	346	50,29%
LSM	1	0,15%
Tenaga kesehatan lain	0	0%
Pelajar/ mahasiswa	8	1,16%
Pelaku Usaha	260	37,79%
Sarjana Hukum	0	0%
Umum	22	3,2%
Wartawan	2	0,29%
Ibu Rumah Tangga	14	2,03%
PNS/TNI/POLRI	12	1,74%

Berdasarkan sarana yang digunakan untuk mendapatkan layanan informasi, mayoritas masyarakat menggunakan WhatsApp yaitu sebanyak 483 orang (70,2%), diikuti layanan langsung sebanyak 201 orang (29,22%), telepon sebanyak 3 orang (0,44%), serta aplikasi lain sebanyak 1 orang (0,15%).

Dominasi layanan melalui WhatsApp sebesar 70,2% menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat menuju layanan digital yang cepat, mudah diakses, dan responsif. Hal ini menuntut penguatan kapasitas layanan digital sebagai kanal utama pelayanan publik.

Komposisi pengguna layanan yang didominasi perempuan (57,43%) mengindikasikan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dalam konsumsi produk obat dan makanan di tingkat rumah tangga.



Gambar 34. Sarana Mendapatkan Layanan Informasi Balai POM di Batam

Tabel 7. Tabel Sarana Mendapatkan Layanan Informasi

Sarana Informasi	Jumlah	Persentase
Langsung	201	29,22%
Telepon	3	0,44%
Fax	0	0%
Surat	0	0%
E-mail	0	0%
SMS	0	0%
Media Sosial	0	0%
Kotak Saran	0	0%
Whatsapp	483	70,2%
Aplikasi lain	1	0,15%

Tingginya proporsi pertanyaan terkait pangan (70,78%) menunjukkan bahwa isu keamanan pangan merupakan perhatian utama masyarakat, sekaligus menjadi area prioritas dalam strategi komunikasi risiko BPOM.

Dominasi kelompok karyawan dan pelaku usaha sebagai pengguna layanan mencerminkan bahwa kebutuhan informasi tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kepatuhan usaha.

Rendahnya jumlah pengaduan (hanya 2 kasus) dapat mengindikasikan dua kemungkinan, yaitu tingkat kepatuhan yang cukup baik atau masih adanya *underreporting* akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

Kegiatan KIE yang masif melalui berbagai kanal (media sosial, pameran, sosialisasi, dan narasumber) menunjukkan pendekatan yang komprehensif, namun perlu diukur lebih lanjut efektivitasnya terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Secara strategis, pemberdayaan konsumen perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan perilaku kritis dan partisipatif dalam pengawasan produk di masyarakat.

BAB IV
MASALAH







BAB IV
MASALAH

Balai POM di Batam dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, seiring dengan karakteristik wilayah perbatasan, intensitas perdagangan internasional, serta perkembangan teknologi digital. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek operasional pengawasan, namun secara langsung mempengaruhi capaian kinerja, efektivitas intervensi, serta tingkat perlindungan masyarakat terhadap risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi merupakan kombinasi antara faktor eksternal dan internal, yang saling beririsan dan membutuhkan pendekatan pengawasan yang adaptif, terintegrasi, serta berbasis risiko.

A. Tantangan Eksternal

Dari aspek eksternal, tantangan utama berasal dari karakteristik geografis wilayah Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Posisi strategis ini menjadikan wilayah Batam dan sekitarnya sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat aktif, namun di sisi lain meningkatkan kerawanan terhadap masuknya produk obat dan makanan ilegal.

Keberadaan pelabuhan tidak resmi serta jalur masuk alternatif di sepanjang garis pantai membuka celah bagi masuknya produk tanpa melalui mekanisme pengawasan yang memadai. Produk yang beredar seringkali tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas pasar.

Kondisi wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dengan dominasi perairan menyebabkan pengawasan menjadi terfragmentasi. Keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya mobilisasi, serta kondisi cuaca yang tidak menentu seperti gelombang tinggi dan angin kencang, turut menghambat mobilitas petugas dalam menjangkau wilayah pulau terluar dan perbatasan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya cakupan dan frekuensi pengawasan, khususnya pada wilayah berisiko tinggi.

Perubahan iklim global semakin meningkatkan ketidakpastian kondisi cuaca yang berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan. Keterbatasan aksesibilitas juga berpotensi

menyebabkan keterlambatan respon terhadap temuan di lapangan, sehingga menurunkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Di sisi lain, pemberlakuan *Free Trade Zone* (FTZ) di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun memberikan kemudahan arus barang, termasuk produk impor. Namun demikian, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk mendistribusikan produk yang belum terjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya. Hal ini meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan di pasar domestik serta menuntut penguatan pengawasan yang lebih terintegrasi antara aspek *pre-market* dan *post-market*.

Perkembangan teknologi informasi dan pola perdagangan digital turut meningkatkan kompleksitas pengawasan. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi melalui platform online, termasuk *cross-border e-commerce*, membuka peluang masuknya produk obat dan makanan langsung ke konsumen tanpa melalui jalur distribusi resmi. Model transaksi ini menyulitkan pengawasan karena bersifat individual, tersebar, dan tidak sepenuhnya terdeteksi dalam sistem pengawasan konvensional. Selain itu, modus operandi peredaran produk ilegal semakin beragam, antara lain melalui jasa titipan, barang bawaan penumpang, serta pengiriman ekspedisi, termasuk untuk produk berisiko tinggi seperti Obat-Obat Tertentu (OOT).

Dalam aspek penegakan hukum, putusan pengadilan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan potensi keuntungan ekonomi dari pelanggaran menyebabkan masih tingginya kecenderungan pengulangan tindak pidana, sehingga melemahkan *deterrent effect* dalam pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan di wilayah perbatasan juga sangat bergantung pada sinergi dengan instansi lain, seperti Bea Cukai, Karantina, dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Perbedaan sistem, mekanisme kerja, serta integrasi data yang belum optimal berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan serta penguatan integrasi sistem lintas instansi.

Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang obat dan makanan masih bervariasi, terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masih terdapat pelaku usaha yang menganggap perizinan sebagai formalitas dan belum sepenuhnya memahami pentingnya pemenuhan standar keamanan dan mutu. Kendala yang dihadapi UMKM, seperti hambatan penindakangeografis, tingginya biaya transportasi, rendahnya literasi digital dan

administrasi, serta keterbatasan modal, turut mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan dan legalitas produk yang beredar.

Dalam proses layanan, pelaksanaan evaluasi dokumen secara online untuk pengajuan SKI/SKE menghadapi kendala dalam memastikan keabsahan dokumen, seperti sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*/CoA), invoice, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, pengawasan SKI post border masih menghadapi tantangan berupa ketidakpatuhan importir dalam melakukan *self-assessment* realisasi impor, serta ketidaksesuaian data antara dokumen impor dan pengajuan SKI.

Perubahan regulasi perizinan melalui sistem OSS dan mekanisme di BP Batam turut memberikan dinamika tersendiri. Perubahan alur proses bisnis, dimana permohonan diajukan melalui BP Batam sebelum masuk ke sistem BPOM, sempat menimbulkan kendala integrasi data dan keterlambatan layanan pada tahun 2025. Meskipun secara teknis telah mengalami perbaikan pada tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme baru, yang berdampak pada tingginya kesalahan pengajuan serta meningkatnya kebutuhan layanan konsultasi.

Secara keseluruhan, tantangan eksternal tersebut berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas pengawasan, keterbatasan jangkauan intervensi, serta tingginya potensi peredaran produk ilegal yang tidak terdeteksi secara optimal. Kondisi ini menuntut penguatan pengawasan berbasis risiko, pendekatan intelijen, serta sinergi lintas sektor yang lebih kuat dalam mengamankan wilayah perbatasan.

B. Tantangan Internal

Selain faktor eksternal, Balai POM di Batam juga menghadapi berbagai tantangan internal yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya peralatan laboratorium, masih menjadi kendala dalam mendukung kegiatan pengujian. Keterbatasan alat berpotensi menyebabkan antrian pengujian serta mempengaruhi kecepatan layanan dan ketepatan waktu pengambilan keputusan berbasis hasil uji.

Dari aspek sumber daya manusia, berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2025, pemenuhan SDM baru mencapai 69,30% dari kebutuhan ideal. Kesenjangan ini berdampak pada terbatasnya cakupan pengawasan, tingginya beban kerja per personel, serta belum optimalnya intensitas pengawasan pada wilayah berisiko tinggi. Selain itu, distribusi kompetensi SDM yang belum merata

menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Dalam aspek penegakan hukum, keterbatasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan menyebabkan penanganan perkara belum optimal. Kondisi ini berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelanggaran serta mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Keterbatasan anggaran operasional, khususnya untuk mendukung kegiatan pengawasan di wilayah kepulauan, juga menjadi kendala signifikan. Tingginya biaya transportasi laut dan udara menyebabkan belum optimalnya jangkauan pengawasan, terutama pada wilayah yang sulit diakses.

Selain itu, integrasi sistem informasi dan pengelolaan data, baik antar unit kerja maupun lintas instansi, belum sepenuhnya optimal. Hal ini berdampak pada efisiensi proses bisnis, validitas data, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Pelaksanaan pengawasan terhadap program strategis nasional, seperti produksi Makanan Bergizi Gratis (MBG), juga menghadapi berbagai kendala. Dari sisi SDM, belum seluruh petugas memiliki kompetensi spesifik seperti *kitchen inspection*. Dari sisi sarana, ketersediaan peralatan pendukung seperti inspection kit masih terbatas. Selain itu, belum terdapat alokasi anggaran khusus serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum maksimal dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan pangan apabila tidak segera dilakukan penguatan kapasitas dan sinergi.

C. Implikasi Strategis Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai POM di Batam memiliki implikasi strategis terhadap pelaksanaan pengawasan, antara lain:

- Belum optimalnya cakupan pengawasan pada wilayah perbatasan dan kepulauan, khususnya pada area berisiko tinggi
- Tingginya potensi peredaran produk ilegal melalui jalur tidak resmi dan platform digital
- Keterbatasan kecepatan respon terhadap temuan di lapangan akibat kendala akses, SDM, dan sarana pendukung
- Belum optimalnya efek jera dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

- Tingginya kebutuhan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam pemenuhan aspek legalitas dan standar mutu
- Belum optimalnya integrasi sistem dan data dalam mendukung pengawasan berbasis intelijen
- Implikasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi pengawasan dan rekomendasi pada Bab selanjutnya, guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat perlindungan masyarakat terhadap risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

BAB V
KESIMPULAN







BAB V
KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Batam tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengujian, layanan sertifikasi, penegakan hukum, serta layanan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Namun demikian, hasil pelaksanaan pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, baik dari aspek eksternal maupun internal, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Dari aspek pengawasan sarana, cakupan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi masih relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya jangkauan pengawasan, khususnya pada wilayah berisiko tinggi, termasuk wilayah perbatasan dan kepulauan. Selain itu, masih ditemukannya sarana yang tidak memenuhi ketentuan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha belum merata dan memerlukan penguatan pembinaan serta pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Dalam aspek pengujian laboratorium, kegiatan sampling dan pengujian telah dilaksanakan secara rutin dan non-rutin, namun hasil pengujian masih menunjukkan adanya produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko peredaran produk yang tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat masih cukup tinggi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko serta peningkatan efektivitas pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari sisi layanan publik, kinerja layanan sertifikasi dan layanan informasi menunjukkan capaian yang baik serta tingginya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keamanan produk serta kepercayaan terhadap layanan Balai POM di Batam. Namun demikian, dinamika perubahan sistem perizinan dan meningkatnya kompleksitas layanan berbasis digital menuntut peningkatan kualitas layanan yang lebih adaptif, cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Dalam aspek penegakan hukum, penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, secara umum penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya potensi pengulangan pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi lintas sektor serta dukungan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran operasional masih menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi pelaksanaan pengawasan, khususnya pada wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Selain itu, integrasi sistem informasi dan pengelolaan data yang belum sepenuhnya optimal juga berdampak pada efisiensi proses bisnis serta kecepatan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif, namun masih dihadapkan pada tantangan signifikan yang mempengaruhi tingkat efektivitas pengawasan. Kompleksitas wilayah perbatasan, tingginya arus perdagangan internasional, perkembangan perdagangan digital, serta keterbatasan kapasitas internal menjadi faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.

Kondisi tersebut berimplikasi pada masih adanya potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat peredaran produk yang tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis risiko, dengan menitikberatkan pada pengawasan wilayah berisiko tinggi, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, penguatan kapasitas internal, serta optimalisasi sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital.

Kesimpulan ini menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi dan langkah strategis pada tahun berikutnya, guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

BAB VI
SARAN







BAB VI
SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam pada tahun yang akan datang, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, terintegrasi, dan berbasis risiko sebagai berikut:

A. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

- Melakukan pengembangan sarana dan prasarana, khususnya modernisasi dan penambahan peralatan laboratorium sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar *Good Laboratory Practice* (GLP), guna mendukung kecepatan dan akurasi pengujian.
- Mendorong pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui penambahan jumlah ASN serta peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sehingga mampu menjawab kompleksitas pengawasan di wilayah perbatasan dan kepulauan.
- Mengoptimalkan dukungan anggaran operasional, khususnya untuk kegiatan pengawasan di wilayah sulit akses, guna meningkatkan cakupan dan frekuensi pengawasan.
- Melakukan pengembangan dan perluasan fasilitas kantor serta sarana pendukung pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

B. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko

- Meningkatkan efektivitas pengawasan pada wilayah berisiko tinggi, khususnya wilayah perbatasan, jalur tidak resmi, serta peredaran produk melalui platform digital dan *cross-border e-commerce*.
- Mengoptimalkan pengawasan *pre-market* dan *post-market* secara terintegrasi, termasuk penguatan validasi dokumen, pengawasan SKI post border, serta pemanfaatan data untuk pengawasan berbasis intelijen.
- Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum serta mendorong terciptanya efek jera terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

C. Penguatan Sinergi Lintas Sektor

- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor melalui perjanjian kerja sama (MoU) dan komitmen bersama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, Karantina, BP Batam, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan terpadu di wilayah perbatasan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga *Criminal Justice System* untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara dan penegakan hukum.

D. Peningkatan Kepatuhan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha

- Melakukan percepatan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui simplifikasi proses, pendampingan intensif, serta bimbingan teknis yang berkelanjutan.
- Memberikan dukungan fasilitasi, termasuk pengujian produk bagi UMKM binaan, dalam rangka percepatan pemenuhan persyaratan perizinan dan registrasi produk.

E. Penguatan Edukasi dan Layanan Publik

- Memperluas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih masif, terarah, dan berbasis digital.
- Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

F. Penguatan Pengawasan Program Prioritas Nasional

Meningkatkan kapasitas petugas, sarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan program strategis nasional, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan pemenuhan aspek keamanan pangan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

LAMPIRAN

Tabel 1A
***Sampling* dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan**
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	174	174	174	0	0	0	22	22	152
2	Obat Bahan Alam	sampel	172	172	172	0	0	0	66	66	106
3	Obat Kuasi	sampel	11	11	11	0	0	0	3	3	8
4	Suplemen Kesehatan	sampel	46	46	46	0	0	0	5	5	41
5	Kosmetik	sampel	345	345	345	0	0	0	115	115	230
6	Pangan Olahan	sampel	127	127	127	0	0	0	28	28	99
7	PIRT	sampel	11	11	11	0	0	0	1	1	10
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	2	2	2	0	0	0	1	1	1
Total		**sampel**	**888**	**888**	**888**	**0**	**0**	**0**	**241**	**241**	**647**

Sumber data
Data Target 1 Tahun : Pedoman Sampling Tahun 2025
Data Kesimpulan akhir sampel : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Keterangan:
1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11

Tabel 1B

***Sampling* dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan**

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	Investigasi / Penyelidikan dari Kepolisian dan BNN	sampel	466	466	2	464
2	Obat Bahan Alam	Investigasi	sampel	8	8	6	2
3	Obat Kuasi	-	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Investigasi/Penyelidikan dari Kepolisian	sampel	5	5	2	3
6	Pangan Olahan (MD,ML PIRT, dan Pangan Siap Saji)	Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik	sampel	13	13	0	13
		Uji sampel MBG (Mikrobiologi)	sampel	2	2	0	2
		Uji sampel KLB MBG (Mikrobiologi)	sampel	4	4	4	0
		Uji sampel KLB MBG (Kimia)	sampel	4	4	0	4
		Food Security	sampel	23	23	6	17
		Inwas Ta'Jil Bulan ramadhan	sampel	101	101	1	100
		Investigasi/Konfirmasi	sampel	6	6	6	0
		Uji sampel Kasus (Mikrobiologi)	sampel	1	1	0	1
		Uji sampel Kasus (Kimia)	sampel	1	1	0	1
Total			**sampel**	**634**	**634**	**27**	**607**

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Keterangan:
1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	**2**	**3**	**4**	**5=6+7**	**6**	**7**
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	0	180	6	174
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		**sampel**	**0**	**180**	**6**	**174**

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 1D

Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Batam	Balai Besar POM di Banda Aceh	Obat	sampel	34	34	34	0
		Loka POM di Aceh Tengah	Obat	sampel	12	12	12	0
		Loka POM di Aceh Selatan	Obat	sampel	11	11	10	1
		Balai Besar POM di Medan	Obat	sampel	33	33	33	0
		Loka POM di Toba	Obat	sampel	19	19	18	1
		Loka POM di Tanjung Balai	Obat	sampel	15	15	15	0
		Balai Besar POM di Padang	Obat	sampel	42	42	41	1
		Balai POM di Payakumbuh	Obat	sampel	8	8	7	1
		Loka POM di Sijunjung (Dharmasraya)	Obat	sampel	4	4	4	0
		Loka POM di Tanjungpinang	Obat	sampel	16	16	16	0
		Balai POM di Bengkulu	Obat	sampel	29	29	28	1
		Loka POM di Rejang lebong	Obat	sampel	11	11	11	0
		Loka POM di Tanjungpinang	Kosmetik	sampel	106	106	105	1
		Loka POM di Tanjungpinang	Obat Bahan Alam	sampel	53	53	49	4
		Loka POM di Tanjungpinang	Suplemen Kesehatan	sampel	14	14	12	2
		Loka POM di Tanjungpinang	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
		Loka POM di Tanjungpinang	Pangan Olahan	sampel	64	64	64	0
		Loka POM di Tanjungpinang	PIRT	sampel	6	6	6	0
		BBPOM Banda Aceh	Pangan	sampel	1	1	1	0
		BBPOM Medan	Pangan	sampel	5	5	5	0
		BBPOM Padang	Pangan	sampel	1	1	1	0
		BPOM di Payakumbuh	Pangan	sampel	1	1	1	0
		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Pangan	sampel	1	1	1	0
		Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Pangan	sampel	1	1	1	0
		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	Pangan	sampel	1	1	1	0
		Loka POM di Kabupaten Toba	Pangan	sampel	4	4	4	0
		Loka POM di Kota Tanjungbalai	Pangan	sampel	5	5	5	0
Total				**sampel**	**500**	**500**	**488**	**12**

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 1E

Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=8+9**	**8**	**9**
1	Balai POM di Batam	Loka POM di Toba Samosir	Obat	sampel	1	1	1	0
2		Balai Besar POM di Medan	Obat	sampel	3	3	3	0
3		Balai Besar POM di Padang	Obat	sampel	9	9	9	0
4		Balai Besar POM di Aceh	Obat	sampel	4	4	4	0
5		Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Obat	sampel	1	1	1	0
6		Loka POM di Tanjungpinang	Obat	sampel	1	1	1	0
7		Loka POM di Tanjungpinang	Kosmetik	sampel	99	99	96	3
8		Loka POM di Tanjungpinang	PIRT	sampel	5	5	5	0
9		Loka POM di Tanjungpinang	Obat Bahan Alam	sampel	53	53	52	1
10		Loka POM di Tanjungpinang	Suplemen Kesehatan	sampel	2	2	2	0
11		Loka POM di Tanjungpinang	Kuasi	sampel	3	3	3	0
12		Loka POM di Tanjungpinang	Pangan Olahan	sampel	50	**50**	48	2
Total				**sampel**	**231**	**231**	**225**	**6**

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2A

Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	25	25	0
	b. Waktu hancur	0	0	0
	c. Disolusi	243	242	1
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	739	737	2
	b. Penetapan kadar zat aktif	273	268	5
	c. Keseragaman sediaan	242	242	0
	d. EG/DEG	16	16	0
	c. Kandungan etilendiamin	4	4	0
Total		**1542**	**1534**	**8**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar air	54	53	1
	b. Lain-lain (waktu hancur)	56	38	18
2	**Kimia :**			
	a. Cemaran logam berat	117	116	1
	b. Kadar etanol dan methanol	10	9	1
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	107	106	1
	d. Bahan kimia obat	122	122	0
	e. Cemaran residu pelarut	15	15	0
	f. Lain-lain (Aflatoksin)	15	15	0
Total		**496**	**474**	**22**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2C

Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Lain-lain (waktu hancur)	1	0	1
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	13	13	0
	b. Identifikasi metil salisilat	13	13	0
	c. Lain-lain (PK Vitamin)	1	1	0
	d. Lain-lain (PK Logam Berat)	1	1	0
Total		**29**	**28**	**1**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2D

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar Air	0	0	0
	b. Lain-lain (waktu hancur)	45	44	1
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	5	5	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	57	52	5
	c. Cemaran residu pelarut	4	4	0
	d. PK etanol metanol	3	3	0
	e. Lain-lain (logam berat)	6	6	0
Total		**120**	**114**	**6**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2E

Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Kimia :**			
	a. Identifikasi pewarna	**1164**	**1163**	**1**
	b. Identifikasi pengawet	**2**	**2**	0
	c. PK pengawet	**28**	**28**	0
	d. PK tabir surya	**13**	**13**	0
	e. PK etanol dan metanol	**25**	**25**	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	**1341**	**1337**	4
	1. Identifikasi Vitamin D2 dan D3	18	18	**0**
	2. Identifikasi Steroid	67	67	**0**
	3. PK Niacinamide	47	47	**0**
	4. PK 1.4 Dioksan	37	37	**0**
	5. Identifikasi / PK Dietylen glikol	77	77	**0**
	6. PK Hg	199	197	2
	7. PK Pb	134	134	**0**
	8. PK As	57	57	**0**
	9. Identifikasi Hidrokinon	207	207	**0**
	10. Identifikasi Retinoat	160	160	**0**
	11. Identifikasi Bitionol	18	18	**0**
	12. Identifikasi Fitonadion	1	1	**0**
	13. Identifikasi Mikonazole	3	3	**0**
	14. Identifikasi Resorsinol	3	3	**0**
	15. Identifikasi Kloramfenikol	3	3	**0**
	16. Identifikasi benzoil peroksida	3	3	**0**
	17. Identifikasi ketokonazole	7	7	**0**
	18. Identifikasi Desonide	8	8	**0**
	19. Identifikasi Asam borat	13	13	**0**
	20. Identifikasi Heksaklorofen	25	25	**0**
	21. Ident/PK Metilbenzilidene campor	1	1	**0**
	22. Ident/PK Octocrylene	1	1	**0**
	23. Identifikasi Hg	198	196	2
	24. Ident/PK OMS	8	8	**0**
	25. Ident/PK BMDM	3	3	**0**
	26. Identifikasi Minoksidil	1	1	0
	27. PK Fluoride	11	11	0
	28. Identifikasi Kloroform	11	11	0
	29. PK Zinc PtO	2	2	0
	30. Identifikasi Pirogalol	18	18	**0**
Total		**2573**	**2568**	**5**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2F

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	0	0	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	0	0	0
	d. Kadar air	1	1	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. PK lemak	8	8	0
	b. PK protein	10	10	0
	c. PK vitamin	10	10	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	2	2	0
	e. PK gula	1	1	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	60	56	4
	h. PK pemanis buatan	116	116	0
	i. PK pengawet	24	24	0
	j. PK kloramfenikol	1	1	0
	k. PK sianida	0	0	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0
	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organik	0	0	0
	p. PK senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)	0	0	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	3	3	0
	t. PK natrium klorida	6	6	0
	u. PK kalium iodat	2	2	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	81	81	0
	x. Identifikasi histamin	10	10	0
	y. Identifikasi boraks	19	15	4
	z. Cemaran logam	510	509	1
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	0	0	0
	ac. Identifikasi formalin	16	14	2
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**880**	**869**	**11**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Obat**			
	a. ALT	14	14	0
	b. Uji batas cemaran	0	0	0
	c. Uji sterilitas	0	0	0
	d. Uji potensi	0	0	0
	e. Uji koefisien fenol	0	0	0
	f. Bebas Escherichia coli	0	0	0
	g. Escherichia coli	14	14	0
	h. Salmonella sp	0	0	0
	i. Salmonella aureus	0	0	0
	j. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	k. endotoksin	7	7	0
2	**Obat Bahan Alam**			
	a. ALT	225	218	7
	b. AKK	225	223	2
	c. Escherichia coli	0	0	0
	d. Salmonella sp	225	225	0
	e. Staphylococcus aureus	0	0	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Clostridium perfringens	0	0	0
	i. Clostridium tetani	0	0	0
	j. Bacillus anthraxis	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	l. Angka Mungkin Enterobacteriaceae	225	221	4
	m. Angka Mungkin Escherichia coli	225	225	0
	n. Shigella sonnei	225	225	0
	o. Clostridia sp.	225	224	1
3	**Obat Kuasi**			
	a. ALT	14	14	0
	b. AKK	14	14	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	d. Salmonella sp	1	1	0
	e. Staphylococcus aureus	13	13	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	13	13	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Clostridium perfringens	0	0	0
	i. Clostridium tetani	0	0	0
	j. Bacillus anthraxis	0	0	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	l. Angka Mungkin Enterobacteriaceae	1	1	0
	m. Angka Mungkin Escherichia coli	1	1	0
	n. Shigella sonnei	1	1	0
	o. Clostridia sp.	1	1	0
4	**Suplemen Kesehatan**			
	a. ALT	14	14	0
	b. AKK	14	14	0
	c. Escherichia coli	14	14	0
	d. Salmonella sp	14	14	0
	e. Staphylococcus aureus	14	14	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Shigella	0	0	0
	i. Fragmen DNA babi	0	0	0
	j. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	**Kosmetik**			
	a. ALT	382	379	3
	b. AKK	382	379	3
	c. Staphylococcus aureus	282	282	0
	d. Pseudomonas aeruginosa	282	282	0
	e. Candida albicans	282	282	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	**Pangan**			
	a. ALT	116	108	8
	b. ALT pembentuk spora	0		
	c. MPN Coliform	6	4	2
	d. AKK	70	70	0
	e. Angka Staphylococcus aureus	10	10	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. Salmonella sp	35	35	0
	k. Staphylococcus aureus	0	0	0
	l. Enterococci	0	0	0
	m. Vibrio cholerae	0	0	0
	n. Vibrio parahaemolyticus	0	0	0
	o. Clostridium perfringens	0	0	0
	p. MPN Escherichia coli	25	25	0
	q. Angka Enterobacteriaceae	42	41	1
	r. Angka Pseudomonas aeruginosa penyaringan	14	13	1
	s. Angka Coliform penyaringan	14	12	2

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	t. Angka Escherichia coli penyaringan	14	11	3
	u. Listeria monocytogenes	6	6	0
	v. Angka Listeria	2	2	0
	w. Angka Bacillus cereus	4	4	0
	x. Enterobacteriaceae	3	3	0
	y. DNA Porcine	3	3	0
7	**PIRT**	0		
	a. ALT	5	5	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	6	6	0
	e. Angka Staphylococcus aureus	2	2	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. Salmonella sp	9	9	0
	k. Staphylococcus aureus	0	0	0
	l. Enterococci	0	0	0
	m. Vibrio cholerae	0	0	0
	n. Vibrio parahaemolyticus	0	0	0
	o. Clostridium perfringens	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	q. Listeria monocytogenes	1	1	0
	r. Angka Enterobacteriaceae	4	4	0
	s. Angka Escherichia coli	2	2	0
	t. Angka Bacillus cereus	1	1	0
Total		**3743**	**3706**	**37**

Sumber data
Data Jenis Parameter Uji : Format laptah dari pusat
Data Jumlah Parameter Uji : Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Nihil		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	Nihil		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	Pegal Linu	Deksametason	2
2	Pegal Linu	Parasetamol	2
3	Stamina Pria	Sildenafil	2
Dst			
TOTAL			6

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	**Sampel Rutin**		
1	Henna - Kutek	Merah K10	1
Dst			
B	**Sampel Non Rutin**		
1	Krim malam	Merkuri	2
Dst			
C	**Sampel Penelurusan Kasus**		
1	NIHIL		
TOTAL			3

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
B	Sampel Non Rutin		
1	Kerupuk	Boraks	1
2	Ikan asin jambal	Formalin	1
3	Ikan asin jambal	Formalin	1
4	Kerupuk tempe	Boraks	1
5	Kerupuk dorang kuning	Boraks	1
6	Kerupuk rambak	Boraks	1
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	NIHIL		
TOTAL			6

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 4A

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4/3 x 100%)**
1	**Vaksin dan Produk Biologi Lainnya**	**2**	**2**	**100%**
2	**Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin**	**87**	**87**	**100%**
	a. Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	14	14	100%
	b. Obat Pencernaan dan Metabolisme	14	14	100%
	c. Sistem Pernapasan	13	13	100%
	d. Sistem saraf pusat	11	11	100%
	e. Sistem Kardiovaskular	8	8	100%
	f. Sistem muskuloskeletal	7	7	100%
	g. Dermatologis	6	6	100%
	h. Obat Darah dan Pembentuk Darah	4	4	100%
	i. Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	3	3	100%
	j. Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	2	2	100%
	k. Organ Sensorik	2	2	100%
	l. Antiparasit	1	1	100%
	m. Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100%
	n. Lain-lain	1	1	100%
3	**Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin**	**55**	**55**	**100%**
	a. Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	8	8	100%
	b. Obat Pencernaan dan Metabolisme	8	8	100%
	c. Sistem Pernapasan	7	7	100%
	d. Sistem saraf pusat	7	7	100%
	e. Sistem Kardiovaskular	5	5	100%
	f. Sistem muskuloskeletal	5	5	100%
	g. Dermatologis	3	3	100%
	h. Obat Darah dan Pembentuk Darah	3	3	100%
	i. Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	2	2	100%
	j. Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	2	2	100%
	k. Organ Sensorik	2	2	100%
	l. Antiparasit	1	1	100%
	m. Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100%
	n. Lain-lain	1	1	100%
4	**Sampel Obat Program**	**13**	**13**	**100%**
	a. Obat Program KB	0	0	-
	b. Obat Program Kemenkes	13	13	100%
5	**Sampel Ruang Lingkup**	**3**	**3**	100%
6	**Sampel di sarana tidak berizin**	**14**	**14**	**100%**
	b. Sampel sarana online (daring)	10	10	100%
	c. Sampel sarana offline (luring)	4	4	100%
7	**Rokok**	**2**	**2**	**100%**
TOTAL		**176**	**176**	**100%**

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 4B

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	45	45	100
2	Produk Impor	26	26	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	9	9	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	17	17	100
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	9	9	100
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	13	13	100
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	17	17	100
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	9	9	100
9	Fitofarmaka	10	10	100
10	Kategori lain-lain	17	17	100
	TOTAL	172	172	100

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 4C

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	3	3	100
2	Produk Impor	3	3	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	3	3	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	0
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	0
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	1	1	100
9	Kategori lain-lain	1	1	100
	TOTAL	11	11	100

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 4D

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	11	11	100
2	Produk Impor	9	9	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	9	9	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	5	5	100
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	3	3	100
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	4	4	100
7	Kategori lain-lain	5	5	100
	TOTAL	46	46	100

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 4E

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Metode pengambilan offline			
1	Kosmetik berisiko tinggi			
	a. Sediaan bayi	4	4	100.00
	b. Sediaan pewarna rambut	11	11	100.00
	c. Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	24	24	100.00
	d. Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (*eye shadow*, sediaan untuk alis, maskara)	14	14	100.00
	e. Sediaan rias wajah (perona pipi)	7	7	100.00
	f. Sediaan rias bibir (*lip color*)	17	17	100.00
	g. Sediaan parfum (*eau de cologne*)	4	4	100.00
	h. Sediaan pewarna kuku	7	7	100.00
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	21	21	100.00
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
	a. Kosmetik kasus khusus/ mengandung bahan yang mudah terurai, seperti alpha arbutin atau beta arbutin.	28	28	100.00
	b. Mainan berkosmetik	0	0	
	c. Kosmetik yang diproduksi negara Thailand	5	5	100.00
	d. Kosmetik yang diproduksi negara Filipina	1	1	100.00
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	34	34	100.00
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	17	17	100.00
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	28	28	100.00
7	Kosmetik menengah ke bawah	16	16	100.00
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	3	3	100.00
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine	0	0	0.00
B.	Metode pengambilan online			
1	Kosmetik viral	10	10	100.00
2	Kosmetik di *online official store/reseller*	10	10	100.00
3	Kosmetik berisiko tinggi			
	a. Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	11	11	100.00
	b. Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (*eye shadow*, sediaan untuk alis, maskara)	4	4	100.00
	c. Sediaan rias bibir (*lip color*)	7	7	100.00
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	10	10	100.00
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT (Diproduksi negara Thailand atau Filipina/ mengandung bahan yang mudah terurai, seperti alpha arbutin atau beta arbutin.	14	14	100.00

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	10	10	100.00
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	7	8	114.29
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	10	10	100.00
9	Kosmetik menengah ke bawah	10	10	100.00
	TOTAL	344	345	100.29

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 4F

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0	3	3	100,0
2	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	7	7	100,0
3	Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	3	3	
4	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	12	12	100,0
5	Kembang gula/permen dan cokelat	9	9	100,0
6	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur	5	5	100,0
7	Produk bakeri	5	5	100,0
8	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	4	4	100,0
9	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil	4	4	100,0
10	Gula dan pemanis, termasuk madu	3	3	100,0
11	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	7	7	100,0
12	Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus	5	5	
13	Minuman, tidak termasuk produk susu	38	38	100,0
14	Makanan ringan siap santap	8	8	100,0
15	Pangan Siap Saji Terkemas Dengan masa simpan > 7 hari	2	2	100,0
16	Bahan Tambahan Pangan	2	2	100,0
17	Produk Industri Rumah Tangga			
	a. Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata	1	1	100,0
	b. Hasil olahan buah, sayur dan rumput laut	1	1	100,0
	c. Tepung dan hasil olahannya	1	1	100,0
	d. Gula, kembang gula dan cokelat	1	1	100,0
	e. Kopi dan teh kering	1	1	100,0
	f.. Bumbu dan rempah	1	1	100,0
	g. Minuman serbuk dan botanika	3	3	100,0
	h. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi	2	2	100,0
18	Target Sampel Emerging Issue/ Pangan Tertentu (Sampel kasus/pengaduan masyarakat/KLB KP/ emerging issue pendampingan UMK/ pendampingan produk menengah rendah)			
	a. UMKM	9	10	111,1
	b. PMR (pendampingan produk menengah rendah)	1	3	300,0
	TOTAL	138	141	102,2

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 5

Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	Polda Kepulauan Riau	173	Metamfetamin	172	1
		33	MDMA	33	0
		16	Cannabis	16	0
		1	Ketamin	1	0
2	BNN Prov. Kepulauan Riau	32	Metamfetamin	32	0
		7	MDMA	7	0
		6	Cannabis	6	0
		1	Ketamin	1	0
3	Polresta Barelang	92	Metamfetamin	92	0
		10	MDMA	9	1
		13	Cannabis	13	0
4	Polres Bintan	33	Metamfetamin	33	0
		1	MDMA	1	0
5	Polres Anambas	18	Metamfetamin	18	0
6	Polres Natuna	18	Metamfetamin	18	0
7	Polres Lingga	3	Metamfetamin	3	0
8	Polsek Tebing Karimun	2	Metamfetamin	2	0
9	Polsek Kundur Karimun	2	Metamfetamin	2	0
10	POM Kodaeral IV Batam	1	Metamfetamin	1	0
		2	MDMA	2	0
11	Polresta Tanjung Pinang	1	Metamfetamin	1	0
12	Tim Penindakan BPOM Batam	1	Triheksifenidil	1	0
	Total	**466**		**464**	**2**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan urutan nomor

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di...., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)

Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel

Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel

Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif

Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit ~~Transfusi~~ Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kota Batam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Provinsi Kepulauan Riau	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kota Batam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kota Batam	sarana	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kota Batam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kota Batam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kota Batam	sarana	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**5**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=7+8+9+10**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13=14+15+16+17**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	Kota Batam	sarana	**63**	19	22	13	9	0	0	**2464**	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	**11**	6	4	4	0	0	0	**525**	1	1	1	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	**0**	0	0	0	0	0	0	**187**	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	**1**	1	1	0	1	0	0	**48**	2	2	0	2	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	**1**	0	0	0	0	0	0	**158**	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**76**	**26**	**27**	**17**	**10**	**0**	**0**	**3382**	**3**	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kota Batam	sarana	3	3	3	3	0	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kota Batam	sarana	29	10	12	2	10	267	47	53	29	24	30	17	17	14	3
2	Kabupaten Karimun	sarana	1	1	1	0	1	37	9	7	3	4	32	2	1	1	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	0	0	0	0	0	14	6	4	2	2	1	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	0	0	0	0	0	14	3	3	2	1	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	0	0	0	0	0	13	5	4	1	3	5	1	2	1	1
6	Kota Tanjung Pinang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**30**	**11**	**13**	**2**	**11**	**345**	**70**	**71**	**37**	**34**	**68**	**20**	**20**	**16**	**4**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	**2**	**3**	**19**	**20**	**21=22+23**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26=27+28**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31=32+33**	**32**	**33**
1	Kota Batam	sarana	2	2	2	2	0	21	11	12	11	1	107	9	12	10	2
2	Kabupaten Karimun	sarana	1	1	1	0	1	3	3	3	3	0	50	7	9	8	1
3	Kabupaten Lingga	sarana	1	1	1	0	1	2	2	1	1	0	48	3	5	5	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	1	1	1	0	1	3	2	2	1	1	49	3	5	4	1
5	Kabupaten Natuna	sarana	1	1	1	0	1	2	2	2	1	1	14	3	10	9	1
6	Kota Tanjung Pinang	sarana	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**7**	**7**	**7**	**3**	**4**	**31**	**20**	**20**	**17**	**3**	**268**	**25**	**41**	**36**	**5**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kota Batam	sarana	**164**	26	25	17	8
2	Kabupaten Karimun	sarana	**5**	3	4	4	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	**0**	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	**0**	1	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	**1**	0	1	0	1
6	Kota Tanjung Pinang	sarana	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**170**	**30**	**30**	**21**	**9**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kota Batam	sarana	349	9	11	7	4	0	394	4	4	4	0	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	80	2	1	0	1	0	81	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	19	1	1	1	0	0	22	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	10	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	22	1	1	1	0	0	18	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**480**	**13**	**14**	**9**	**5**	**0**	**524**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B (lanjutan)

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	**2**	**3**	**16**	**17**	**18=19+20+21**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24=25+26+27**	**25**	**26**	**27**
1	Kota Batam	sarana	183	46	45	29	13	3	56	8	2	1	1	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	34	8	6	6	0	0	8	1	1	1	0	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	2	3	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	17	2	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	15	5	6	3	3	0	1	1	1	0	1	0
	Total	**sarana**	**251**	**64**	**62**	**38**	**21**	**3**	**70**	**10**	**4**	**2**	**2**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C

Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kota Batam	sarana	1537	127	143	86	57	0
2	Kabupaten Karimun	sarana	94	24	25	19	6	0
3	Kabupaten Lingga	sarana	75	17	11	4	7	0
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	sarana	43	14	3	1	2	0
5	Kabupaten Natuna	sarana	120	14	17	13	4	0
	Total	**sarana**	**1869**	**196**	**199**	**123**	**76**	**0**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Agustus	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	November	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL		**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :
1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
   a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
   d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	36	1	0	0	30	67	5	0	0	0	5	10
2	Februari	7	0	0	0	4	11	9	0	0	0	5	14
3	Maret	6	0	0	1	1	8	5	0	0	1	7	13
4	April	16	1	0	1	7	25	5	0	0	0	8	13
5	Mei	31	0	0	0	8	39	15	0	0	0	4	19
6	Juni	3	0	0	0	0	3	36	0	0	0	18	54
7	Juli	24	0	0	0	9	33	23	0	0	0	9	32
8	Agustus	23	1	0	0	10	34	29	0	0	0	6	35
9	September	23	1	0	0	8	32	28	2	0	0	15	45
10	Oktober	24	0	0	0	9	33	31	0	0	0	8	39
11	November	16	0	0	0	5	21	11	0	0	0	5	16
12	Desember	20	0	0	0	13	33	20	0	0	0	7	27
	TOTAL	**229**	**4**	**0**	**2**	**104**	**339**	**217**	**2**	**0**	**1**	**97**	**317**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :
1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
   b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	239	239
			Pangan	2102	2105
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	2775	2776
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	Obat	14	14
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	3	3
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	Kosmetik	9	9

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	Obat Bahan Alam	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	Pangan	25	25
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	Pangan	6	6
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	466	466
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	5	5
			Pangan	13	13
Total	**Surat Keterangan Impor (SKI)**			2341	2344
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			2775	2776
	Rekomendasi Lainnya			57	57
	Sertifikasi Lainnya			484	484

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Batam	Media Cetak	30	24	6	Penilaian 9 iklan UPT tidak sesuai dengan Pusat
			Media Elektronik	37	29	8	
			Media Luar Ruang	7	7	0	
			Total	**74**	**60**	**14**	
2	Obat Bahan Alam	Balai POM di Batam	*E-Commerce*	15	5	10	Penilaian 1 iklan UPT tidak sesuai dengan Pusat
			Website	7	3	4	
			Media Sosial	13	7	6	
			Internet Lain	3	0	3	
			TV Nasional	10	8	2	
			Penyiaran Lokal	5	0	5	
			Media Lain	12	9	3	
			Total	**65**	**32**	**33**	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Batam	*E-Commerce*	2	2	0	Sesuai
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	1	1	
			Total	**10**	**6**	**4**	
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Batam	*E-Commerce*	10	4	6	Sesuai
			Website	3	3	0	
			Media Sosial	4	1	3	
			Internet Lain	2	0	2	
			TV Nasional	5	5	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	8	7	1	
			Total	**32**	**20**	**12**	
5	Kosmetik	Balai POM di Batam	Media Cetak	6	4	2	Penilaian 19 iklan UPT tidak sesuai dengan Pusat
			Media Elektronik	50	44	6	
			Media Luar Ruang	10	9	1	
			Media Digital	167	64	103	
			Total	**233**	**121**	**112**	
6	Pangan	Balai POM di Batam	Media Cetak	16	12	4	Sesuai
			Media Elektronik	30	23	7	
			Media Luar Ruang	29	23	6	
			Media Internet	47	30	17	
			Total	**122**	**88**	**34**	
TOTAL				**536**	**327**	**209**	

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 11

Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	174	154	20
2	Obat Bahan Alam	172	130	42
3	Obat Kuasi	11	8	3
4	Suplemen Kesehatan	46	43	3
5	Kosmetik	345	231	114
6	Pangan Olahan	127	99	28
7	Pangan PIRT	11	11	0
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	2	1	1
	Total	888	677	211

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 12A

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Batam	Obat Bahan Alam	17
		Obat	14
		Suplemen Kesehatan	-
		Kosmetik	15
		Pangan	25
		Kuasi	7
2	Kabupaten Karimun	Obat Bahan Alam	1
		Obat	-
		Suplemen Kesehatan	-
		Kosmetik	3
		Pangan	9
		Kuasi	3
3	Kabupaten Lingga	Obat Bahan Alam	-
		Obat	-
		Suplemen Kesehatan	-
		Kosmetik	1
		Pangan	-
		Kuasi	-
4	Kabupaten Anambas	Obat Bahan Alam	-
		Obat	-
		Suplemen Kesehatan	-
		Kosmetik	-
		Pangan	-
		Kuasi	-
5	Kabupaten Natuna	Obat Bahan Alam	-
		Obat	-
		Suplemen Kesehatan	-
		Kosmetik	-
		Pangan	-
		Kuasi	-

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dashboard penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown* Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan *Profiling* Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan *Takedown*	Total Tautan yang telah Di-*takedown*	Persentase Tautan yang telah Di-*takedown*
1	**2**	**3**	**4**	**5=4/3*100**
1	12	620	595	95,97%

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan siber Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dtindaklanjuti dengan rekomendasi Takedown dan terverifikasi pada aplikasi pelaporan siber BPOM (inawebcrawler-siber.pom.go.id)

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	78	78	100

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 13

Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
	15	1	7	0	0	0	4	0	0	0	1	1	12	12	39	1	40	32	0,5897	1	0,0769	13	0,3333

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM
5. Sumber Data Berasal dari BALAI POM di Batam dan Aplikasi Dashboard Penindakan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 14

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kota Batam	Tahun 2025	3	0	0	1	0	0	2	0	0	184,542,312
		Carry Over	1	0	0	0	0	0	1	0	0	98,610,000
	Total		**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**283,152,312**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	1	-	-	-	1	-	3	1	-	3	3	13
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/ WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(137 konten **)	(138 konten **)	(196 konten **)	(203 konten **)	(338 konten **)	(381 konten **)	(305 konten **)	(264 konten **)	(337 konten **)	(363 konten **)	(247 konten **)	(406 konten **)	(3315 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	9	15

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	1	3	3	2	6	4	2	3	15	3	-	43
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(35 konten **)	(84 konten **)	(10 konten **)	(13 konten **)	(22 konten **)	(34 konten **)	(54 konten **)	(29 konten **)	(14 konten **)	(47 konten **)	(23 konten **)	(52 konten **)	(417 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2

Sumber data: Balai POM di Batam

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)

2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	KIE	-	1	-	Kantor BPOM di Batam	1	86	Masyarakat umum	1. Dinas Kesehatan Kota Batam 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Batam 5. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 6. Badan Narkotika Nasional Kota Batam 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam 8. GP Farmasi Kota Batam 9. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Batam 10. Ikatan Bidan Indonesia Kota Batam 11. Pramuka Kwarcab Batam	1. Musthofa Anwari, S.Si., Apt. 2. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Februari	1	KIE	-	1	-	Aula Kantor BPOM di Batam	1	50	Guru dan Siswa	-	1. M. Nurhisyam Kurnadi, S.K.M. 2. Ana Fitri, S.Si.	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	KIE	-	1	-	Sanggar Sapta Pesona	1	30	Guru dan Siswa	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
						, Kel. Dabo, Kab. Lingga				Perlindungan Anak Kab. Lingga 2. Dinas Kesehatan Kab. Lingga										
Juni	1	Webinar	1	-	-	Daring Zoom Meeting	1	145	Masyarakat umum	Kantor Kementrian Agama Kota Batam	1. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt. 2. Annisa Afiaty, S.Sos 3. Rizki Indriyani, S.Farm., Apt. 4. Riza Fahlevie, S.T.P. 5. Miranda, S.T.P.	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	Webinar	1	-	-	Daring Zoom Meeting	1	132	DWP BPOM di Batam, Kader Posyandu dan Kader Desa	1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri 2. Dinas Kesehatan Kota Batam 3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun 4. Dinas Kesehatan Kab. Lingga 5. Dinas Kesehatan Kab. Natuna 6. Dinas Kesehatan Kab. Kep. Anambas	M. Nurhisyam Kurnadi, S.K.M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2	KIE	-	1	-	Aula Kantor BPOM di Batam	1	51	PKK Kelurahan Tiban Baru	Ketua Tim Penggerak PKK Kel. Tiban Baru	Rizki Indriyani, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Aula Kantor BPOM di Batam	1	17	Pramuka SAKA POM	-	Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
September	1	KIE	-	1	-	Universitas Ibnu Sina	1	48	Pelaku usaha, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Media	1. Dinas Kesehatan Kota Batam 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam 3. Dinas Sosial Kota Batam	1. Mahfudziyah Shahifah, S.Farm., Apt. 2. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	1	KIE	-	1	-	Aula Kantor BPOM	1	27	Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kota Batam	-	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
						di Batam														
	2	KIE	-	1	-	Aula Institut Kesehatan Mitra, Kota Batam	1	73	Dosen dan Mahasiswa	Institut Kesehatan Mitra Bunda	Ana Fitri, S.Si.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Desember	1	KIE	-	1	-	SMP Negeri 53 Kota Batam	1	50	Siswa SMPN 53 Batam	SMP Negeri 53 Kota Batam	Riza Fahlevie, S.T.P.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	SMP Negeri 29 Kota Batam	1	83	Siswa SMPN 29 Batam	SMP Negeri 29 Kota Batam	Menti Aslina Sinurat, SKM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	SLB Kartini Kota Batam	1	56	Guru dan Siswa SLB Kartini	SLB Kartini 53 Kota Batam	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Total			2	11	0		13	848												

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online, offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	*Online*	*Offline*	*Hybird*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	KIE	-	1	-	Ruang Pertemuan SMA Kartini Batam	1	47	Siswa SMA	-	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Februari	1	KIE	-	1	-	Aula BPOM di Batam	1	52	Guru dan Siswa	-	1. Menti Aslina Sinurat, SKM 2. Riza Fahlevie, S.T.P.	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Maret	1	KIE	-	1	-	Bazar Ramadhan Area Mega Techno City Nongsa, Kota Batam	1	24	Pedagang Kreatif Lapangan di Area Bazar Ramadhan	1. Dinas Kesehatan Kota Batam 2. SAKA POM	1. Menti Aslina Sinurat, SKM 2. M. Nurhisyam Kurnadi, S.K.M. 3. Rizky Amalia, S.K.M.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Bazar Ramadhan Area Mega Techno City Nongsa	1	30	Pedagang Kreatif Lapangan di Area Bazar Ramadhan	1. Dinas Kesehatan Kota Batam 2. SAKA POM	1. Ana Fitri, S.Si. 2. Miranda, S.T.P. 3. Riza Fahlevie, S.T.P.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Bazar Ramadhan Area Pasar Legenda Malaka, Kota Batam	1	14	Pedagang Kreatif Lapangan di Area Bazar Ramadhan	1. Dinas Kesehatan Kota Batam 2. SAKA POM	1. Rizki Indriyani, S.Farm., Apt. 2. Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M. 3. M. Nurhisyam Kurnadi, S.K.M.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
April	1	KIE	-	1	-	Hotel Harmony One	1	47	Pelaku Usaha Pangan	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam 2. Kantor Kementrian Agama Kota Batam	Menti Aslina Sinurat, SKM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Hotel Planet Holiday	1	50	Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinas Kesehatan Kota Batam	Riza Fahlevie, S.T.P.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Aula BPOM di Batam	1	15	Siswa SMP	-	Menti Aslina Sinurat, SKM	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Mei	1	KIE	-	1	-	Fasum Blok D Legenda Malaka, Kota Batam	1	36	Ibu PKK	-	1. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt. 2. Miranda, S.T.P.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Lab Komputer SDS Yos Sudarso	1	9	Pedangan Kantin	-	Rizki Indriyani, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juni	1	KIE	-	1	-	Harmoni One Hotel	1	30	Pelaku Usaha UMKM	Dinas Kesehatan Kota Batam	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Harmoni One Hotel	1	30	Pelaku Usaha UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kepri	Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	*Online*	*Offline*	*Hybird*	5	6	7	8	9	10	11								
	3	Pameran	-	1	-	Mega Mall Batam Centre	1	5	Masyarakat Umum	Polda Kepri	1. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt. 2. Rizki Indriyani, S.Farm., Apt. 3. Menti Aslina Sinurat, SKM	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	4	KIE	-	1	-	Gedung PLUT Bengkong, Kota Batam	1	30	Pelaku Usaha Pangan	Dinas Koperasi UMKM Prov Kepri	1. Ana Fitri, S.Si. 2. Achmad Fatoni, S.Si.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juli	1	KIE	-	1	-	Gym Room SMAS Mondial	1	126	Guru dan Siswa	-	1. Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H. 2. Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Mushola Sekolah NAM IBS	1	78	Guru dan Siswa	-	1. Ana Fitri, S.Si. 2. Rizki Indriyani, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Agustus	1	KIE	-	1	-	Aula MTs Iskandar Muda	1	83	Guru dan Siswa	-	1. Menti Aslina Sinurat, S.K.M 2. Riza Fahlevie, S.T.P.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Aula SMAIT Fajar Ilahi	1	70	Guru dan Siswa	-	1. Miranda, S.T.P. 2. Rizky Amalia, S.K.M.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Outbound Pro Adventure Indonesia, Kampung Terih	1	26	Masyarakat Umum, Kader Keamanan Pangan Kel. Sambau dan Mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda	-	Rizki Indriyani, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
September	1	KIE	-	1	-	Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri	1	100	Ibu-ibu Dharmawanita Kepri	DWP Kepri	Ruth Desiyanti Purba, S.Si., Apt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Aula BPOM di Batam	1	57	Anak TK dan Guru atau Pendamping Sekolah	-	1. Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M. 2. Menti Aslina Sinurat, SKM 3. Riza Fahlevie, S.T.P.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Aula BPOM di Batam	1	46	Anak TK dan Guru atau Pendamping Sekolah	-	1. Rizky Amalia, S.K.M 2. M. Nurhisyam Kurnadi, S.K.M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	*Online*	*Offline*	*Hybird*	5	6	7	8	9	10	11								
November	1	KIE	-	1	-	Aula BPOM di Batam	1	51	Guru dan Siswa SMKN 4 Batam	-	1. Ana Fitri, S.Si. 2. Dyah Ayu Novi H., S.Farm., Apt. 3. Duanda Oktora, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	2	KIE	-	1	-	Harmoni One Hotel	1	84	Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar di Kota Batam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Ana Fitri, S.Si.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	KIE	-	1	-	Kawasan Perkemahan Pantai Bale-Bale Nongsa, Kota Batam	1	32	Pembina dan Anggota Pramuka Pangkalan SMAN 26 Batam	-	1. Riza Fahlevie, S.T.P. 2. Rizki Indriyani, S.Farm., Apt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	25	0		25	1172												

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online, offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah *Followers* b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	*Balai POM di Batam*	906	13	36	4	1	2	1	2	6	2	9	15	7
	Instagram	*@bpom.batam*	*3765*	17	40	4	1	2	1	2	7	3	10	18	9
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	*649*	5	26	3	0	2	1	1	3	0	7	9	4
Februari	Facebook	*Balai POM di Batam*	906	16	31	6	0	1	0	2	13	1	15	7	2
	Instagram	*@bpom.batam*	3790	56	162	12	0	4	4	13	33	0	47	24	1
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	12	21	5	0	1	1	2	10	0	11	3	0
Maret	Facebook	Balai POM di Batam	923	3	56	4	0	3	1	6	14	0	21	10	0
	Instagram	*@bpom.batam*	3809	5	74	6	0	3	3	8	19	0	27	13	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	651	2	56	5	0	3	2	5	13	0	22	8	0
April	Facebook	Balai POM di Batam	936	3	63	2	0	1	2	7	5	0	41	8	0
	Instagram	*@bpom.batam*	3907	8	75	2	0	1	2	13	8	0	47	9	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	650	2	52	2	0	1	2	7	3	0	34	5	0
Mei	Facebook	Balai POM di Batam	968	11	160	15	2	12	0	2	18	0	94	28	0
	Instagram	*@bpom.batam*	4082	10	95	9	1	8	0	2	12	0	53	20	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	1	61	3	1	5	0	0	7	0	37	9	0
Juni	Facebook	Balai POM di Batam	949	17	177	13	0	6	0	3	19	0	108	45	0
	Instagram	*@bpom.batam*	4180	12	104	8	0	3	0	3	15	0	59	28	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	5	66	3	0	2	0	2	8	0	39	17	0
Juli	Facebook	Balai POM di Batam	962	29	130	12	0	15	5	12	21	0	39	55	0
	Instagram	*@bpom.batam*	4298	17	76	7	0	9	3	7	11	0	24	31	0

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah *Followers* b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	8	45	3	0	7	2	5	8	0	12	16	0
Agustus	Facebook	Balai POM di Batam	987	16	124	10	0	8	2	11	23	0	46	36	4
	Instagram	*@bpom.batam*	4319	10	72	5	0	4	2	6	12	0	29	20	4
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	650	3	38	3	0	1	1	2	3	0	15	11	1
September	Facebook	Balai POM di Batam	991	13	160	8	0	5	1	7	22	0	67	63	0
	Instagram	*@bpom.batam*	4504	12	90	5	0	4	1	4	14	0	37	37	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	2	60	8	0	5	1	7	22	0	67	63	0
Oktober	Facebook	Balai POM di Batam	992	25	162	15	0	7	4	2	20	0	87	51	0
	Instagram	*@bpom.batam*	4970	16	90	8	0	4	2	1	10	0	51	28	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	649	6	64	5	2	6	21	1	6	0	34	21	0
November	Facebook	Balai POM di Batam	1005	12	119	35	0	10	2	5	21	4	4	24	26
	Instagram	*@bpom.batam*	5210	8	65	19	0	6	1	3	11	2	2	14	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	646	3	41	13	0	3	1	1	7	2	1	7	9
Desember	Facebook	Balai POM di Batam	1005	28	188	10	0	0	4	14	30	6	108	44	0
	Instagram	*@bpom.batam*	5205	16	99	5	0	0	2	7	16	3	58	24	0
	X	*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*	647	8	67	3	0	0	1	7	9	2	35	18	0
Total				430	3045	280	8	154	76	182	479	25	1397	839	67

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun [a]	Jumlah *Followers* [b]	Jumlah Konten [c]		Topik [d]									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook														
	Instagram														
	X														
	TikTok														
	Youtube														
	WhatsApp														
	Lainnya (sebutkan)														
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Digital	Website	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Februari	Media Digital	Website, Ebook Perpustakaan Online	13	-	-	-	-	2	-	-	-	11	-
Maret	Media Digital	Website	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
April	Media Digital	Website	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Mei	Media Digital	Website	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Juni	Media Digital	Website	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	Media Cetak	Leaflet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Media Digital	Website	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	Media Cetak	Leaflet	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Agustus	Media Digital	Website	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
September	Media Digital	Website	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Oktober	Media Digital	Website	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
November	Media Digital	Website	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Desember	Media Digital	Website	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	Media Elektronik	ILM Radio	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Media Luar Ruang	Spanduk	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Total			152	0	1	0	0	2	0	0	6	143	0

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:
Jenis Media
1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya.Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital.Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media [a]	Frekuensi (Kali) [b]	Topik [c]									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst											
	Media Digital	e-book, web, dst											
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst											
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst											
	Lainnya (sebutkan)												
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
Total													

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya.Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital.Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0%	0%	47	47	47	100%	100%
2	s.d Februari	1	1	1	100%	100%	105	105	105	100%	100%
3	s.d Maret	0	0	0	0%	0%	171	171	171	100%	100%
4	s.d April	0	0	0	0%	0%	235	235	235	100%	100%
5	s.d Mei	0	0	0	0%	0%	304	304	304	100%	100%
6	s.d Juni	0	0	0	0%	0%	356	356	356	100%	100%
7	s.d Juli	0	0	0	0%	0%	414	414	414	100%	100%
8	s.d Agustus	0	0	0	0%	0%	486	486	486	100%	100%
9	s.d September	0	0	0	0%	0%	545	545	545	100%	100%
10	s.d Oktober	0	0	0	0%	0%	603	603	603	100%	100%
11	s.d November	2	2	2	100%	100%	649	649	649	100%	100%
12	s.d Desember	0	0	0	0%	0%	686	686	686	100%	100%

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
2	s.d Februari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
3	s.d Maret	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
4	s.d April	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
5	s.d Mei	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
6	s.d Juni	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
7	s.d Juli	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
8	s.d Agustus	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
9	s.d September	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
10	s.d Oktober	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
11	s.d November	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
12	s.d Desember	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum DIdokumentasikan	Tidak DIkuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	2	10 hari kerja	2	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya

2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan

3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)

4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Apoteker	3	1	1	5	0	1	1	5	3	2	0	0	22
2	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ibu Rumah Tangga	1	4	3	1	1	3	0	1	0	0	0	0	14
5	Karyawan	30	27	28	28	34	25	37	32	31	28	25	21	346
6	Pelajar/ mahasiswa	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	8
7	Pelaku Usaha	12	20	29	28	25	21	17	30	22	25	18	13	260
8	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wartawan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	LSM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Umum	0	4	4	2	2	0	1	2	3	1	0	2	21
12	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16	PNS/TNI/POLRI	1	1	1	0	3	0	1	2	0	1	2	0	12
TOTAL		**47**	**58**	**66**	**64**	**69**	**52**	**58**	**72**	**59**	**58**	**46**	**37**	**686**

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	E-mail	bpom_batam@pom.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Langsung	Jalan Hang Jebat, Kelurahan Sambau/Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29466	8	16	26	9	23	14	15	21	22	17	17	12	200
3.	Telepon	0778 761 753	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
4.	Fax	0778 761 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Surat	Jalan Hang Jebat, Kelurahan Sambau/Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	082392201231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	bpom.batam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	082392201231	39	41	40	55	46	38	42	51	36	40	29	25	482
10	Aplikasi lain	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL			**47**	**58**	**66**	**64**	**69**	**52**	**58**	**72**	**59**	**58**	**46**	**37**	**686**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai POM di Batam

Tabel 19A

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Makanan	10	10	0
2	Obat Tradisional	1	1	0
3	Obat	3	3	0
4	Napza	13	13	0
5	Minuman	32	32	0
6	Campuran	18	18	0
	Total	77	**77**	**0**

Sumber Data: Aplikasi SPIMKer KLB-KP Badan POM RI per 9 April 2026

Tabel 19B

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	0	0	0
3	50 - 59 Tahun	0	0	0
4	30 - 49 Tahun	29	29	0
5	15 - 29 Tahun	44	44	0
6	5 - 14 Tahun	4	4	0
7	< 5 Tahun	0	0	0
	Total	77	77	0

Sumber Data: Aplikasi SPIMKer KLB-KP Badan POM RI per 9 April 2026

Tabel 19C

Frekuensi Kasus Keracunan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kota Batam	3	13	1	0	0	52	69
2	Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0	3	3
3	Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0	1	1
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0	4	4
	Total	3	13	1	0	0	60	77

Sumber Data: Aplikasi SPIMKer KLB-KP Badan POM RI per 9 April 2026

Tabel 19D

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kota Batam MAN 2 Kota Batam	11 November 2025	Lembaga pendidikan	Makan rutin	KLB KP MBG di MAN 2 Kota Batam, pada 11 November 2025, dengan gejala kejang perut, lemas, mual, pusing, muntah, demam dan kulit merah. Korban sebanyak 227 orang (94 laki-laki dan 133 wanita), tidak ada korban meninggal	227	227	0	Jasa boga	Diduga berasal dari menu MBG hari tersebut yaitu: Nasi Putih, Dendeng balado, Tahu krispi, Jeruk, dan lalapan timun	Mikrobiologi	Belum verifikasi	Tidak	Sudah berakhir	Program MBG
2	Kota Batam SDN 016 Sagulung	26 September 2025	Lembaga pendidikan	Makan rutin	KLB KP MBG di SDN 016 Sagulung, Kota Batam, pada 26 September 2025. Korban sebanyak 17 orang (3 laki-laki dan 14 wanita) dengan gejala mual, muntah, pusing, sakit perut dan lemas. Tidak ada korban meninggal	17	17	0	Jasa boga	Diduga berasal dari spaghetti, ayam saus bolognese, mix vegetable	Mikrobiologi	Belum verifikasi	Tidak	Sudah berakhir	Program MBG
3	Kabupaten Karimun SMP 4 Satu Atap Tebing	6 Oktober 2025	Lembaga pendidikan	Makan rutin	Dicurigai terjadi Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan di SMP 4 Satu Atap, kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau pada tanggal 06 Oktober 2025. Korban sakit sebanyak 11 orang (8 laki-laki dan 3 perempuan) dengan gejala mual, muntah dan pusing. Tidak ada korban meninggal dunia.	11	11	0	Jasa boga	Tumis labu siam	Mikrobiologi	Belum verifikasi	Tidak	Sudah berakhir	Program MBG
4	Kabupaten Karimun SMPN 2 Karimun	25 September 2025	Lembaga pendidikan	Makan rutin	Dicurigai Kejadian Luar bIasa Keamanan Pangan MBG yang terjadi di SMPN 2 Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 September 2025. Korban sebanyak 15 siswa (5 laki-laki dan 10 perempuan), dengan gejala mual dan muntah. Tidak ada korban meninggal dunia.	15	15	0	Jasa boga	Acar	Mikrobiologi	Belum verifikasi	Tidak	Sudah berakhir	Program MBG

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Kabupaten Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: Aplikasi SPIMKer KLB-KP Badan POM RI per 9 April 2026

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilijh dari beberapa pilihan lokasi kejadian :

a. Tempat tinggal : rumah, dll

b. Hotel / penginapan : hotel / wisma

c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik

d. Restoran : restoran

e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan

f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan

g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian

h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan

i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan

j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah

k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus

5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :

a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin

b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll

c. Kegiatan Keagaman : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll

d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat

e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga

f. Jajan : kegiatan merupakan jajan

g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll

6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)

7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumi pangan yang diduga menjadi penyebab

8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit

9. Diisi dengan jumleh korban yang meninggal

10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :

a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan

b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.

d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar.
Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP

12. Diisi dengan pilihan

a. Mikrobiologi

b. Kimia

13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*

14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada

15. Diisi dengan pilihan

a. Status KLB sudah selesai

b. Status KLB sudah belum berakhir

16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20

Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting	Jenis Bimtek																											Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																					
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/Remaja Putra	Pemuda/Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Kota Batam	Nongsa	Kelurahan Ngenang	Stunting	0	0	2	0	0	3	0	5	0	0	5	7	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Ya	
2			Kelurahan Sambau	Non Stunting	1	1	1	0	0	2	0	5	0	0	1	0	13	3	0	3	0	0	0	0	0	9	4	2	0	35	Ya	
3			Kelurahan Batu Besar	Non Stunting	0	0	1	0	0	2	2	5	0	2	2	0	5	0	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	Ya	
	Total				**1**	**1**	**4**	**0**	**0**	**7**	**2**	**15**	**0**	**2**	**8**	**7**	**18**	**6**	**4**	**14**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**9**	**4**	**2**	**0**	**75**		

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 21A

Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kota Batam	3	2	2	7	3	2	2	7	24	4	28
Total		3	2	2	7	3	2	2	7	24	4	28

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 21B

Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kota Batam	38	18	12	8	38
Total						38

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 21C

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kota Batam	3	2	2	7	3	2	2	7
Total		3	2	2	7	3	2	2	7

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 22A

Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Batam	8 Mei 2025	Summerland	Riski	-	-	-
2				Andi			
3				Neta			
4			Hang Tuah	Samsul			
5				Fernando			
Total				**5 Orang**			**..... Orang**

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 22B

Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Batam

Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel

Sumber data: Balai POM di Batam

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 23A

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIHIL						

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 23B

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NIHIL							

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 23C

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)							Keterangan / Kendala
					Sosialisasi Keamanan Pangan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Citra Pempek / CV.Citra Nusantara Food	Anggrek Mas I Blok K No.29-30 Kel.Taman Baloi Kec.Batam Kota, Kota Batam	Pempek Citra	Pempek (09.02.01)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum menyelesaikan dokumen persyaratan registrasi pangan olahan
2	SKS Yummy	Perumahan Asrama Satbrimob Kepri Blok B No. 7 RT 004/ RW 014, Tembesi, Sagulung	SKS Yummy	Risoles (06.04.01)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
3	Browtee	Ruko Pesona Niaga Blok B No.8, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam	Browtee	Epok-Epok (07.02.02)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
4	Miskriukk	Agung Permai Blok G No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, KOTA BATAM, Provinsi KEPULAUAN RIAU, 29466, Indonesia	Miskriukk	Sate lilit Bali ayam, kornet ayam (08.03)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum menyelesaikan dokumen persyaratan registrasi pangan olahan
5	CV. Limun Kuda Mas	Baran Satu No. 126, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun	Kuda Mas	Minuman berkarbonasi (14.01.04)	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Terbit CPPOB di 2025, NIE Produk masih berlaku hingga Oktober 2026 (ada e-reg.pom.go.id)
6	PT. Mutiara Ujung Utara	Pasar Sentra, Ranai, Natuna	-	Bakso Ikan (09.02.04)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum menyelesaikan dokumen persyaratan registrasi pangan olahan
7	SIKNA Food	Komplek Natuna Gerbang Utara Jl. Masjid Agung Kelurahan Kota Ranai, Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna	-	Ikan Asap (09.02.05)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum menyelesaikan dokumen persyaratan registrasi pangan olahan
8	Karimun Coffee	Baran, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Karimun	Kopi bubuk (14.01.05)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)							Keterangan / Kendala
					Sosialisasi Keamanan Pangan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Vestilawati / PT. Adelicious Cake and Bakery	Bukit Sentosa Blok G No. 6 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk		Risoles (06.04.01)	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Sarana masih berproses perbaikan fasilitas produksi
10	Masterfood	Perumahan Cendana Blok F12 No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam Perumahan Cendana Blok F12 No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam	Masterfood	Kroket (06.04.03)	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Sarana masih berproses perbaikan fasilitas produksi

Sumber data: Balai POM di Batam

Tabel 24

Keterjangkauan Pengawasan

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
A	**Balai POM di Batam**					
1	Kota Batam	jam	± 2	✓	✓	
2	Kabupaten Karimun	jam	± 6	✓	✓	
3	Kabupaten Lingga	jam	± 22			
4	Kabupaten Natuna	jam	± 45	✓		
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	jam	± 24	✓		
Total		**jam**	**± 99**			

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :

a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)

b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)

c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
Balai POM di Batam
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah (Ribu)
1	2	3	4
1	Karimun	jiwa	266
2	Natuna	jiwa	86,8
3	Lingga	jiwa	103
4	Kepulauan Anambas	jiwa	50,4
5	Kota Batam	jiwa	1297
Total		jiwa	1803,2

Sumber data: https://kepri.bps.go.id/

Tabel 26

Sarana dan Prasarana

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	1	
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	1	
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	1	
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	1	
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	1	
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	0	
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	4	
11	Mobil laboratorium keliling	unit	2	
12	Mobil penyidikan	unit	1	
13	Mobil incenerator	unit	1	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	5	2 Mobil dalam Kondisi Rusak Berat
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	2	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	1	
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	
18	Luas tanah***	m2 (status)	8715	Memiliki 3 Bidang Tanah bersertifikat, sebagai berikut: a. Tanah Seluas 3.117 m2 b. Tanah Seluas 3.000 m2 c. Tanah Seluas 2.598 m2
19	Luas bangunan***	m2 (status)	4846	Memiliki 8 Bidang Bangunan yang terdiri dari 2 Bangunan Gedung Kantor bersertifikat dan 6 Bangunan Pendukung sebagai berikut: a. Gedung Kantor NUP 2 seluas 4.364 m2 (3 Lantai) b. Gedung Kantor NUP 8 seluas 180 m2 c. Rumah Gas NUP 1 seluas 12 m2 d. Rumah Genset NUP 2 seluas 23 m2 e. Pagar Gedung Kantor seluas 246 m2 f. Bak Penampungan Limbah seluas 11 m2 g. Reservoir Air seluas 5 m2
20	Taman Permanen	m2 (Status)	1544	Izin Penggunaan Lahan Penghijauan
21	Jaringan Listrik Lainnya	Unit	1	
22	Water Purification	Unit	2	
23	Baggage Trolly	Unit	18	
24	Mesin Kompresor	Unit	1	
25	Digital Tachometer	Unit	1	
26	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Unit	34	
27	Colour Spectrophotometer	Unit	1	
28	Lemari Penyimpan	Unit	1	
29	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	
30	Lemari Besi/Metal	Unit	42	
31	Lemari Kayu	Unit	24	
32	Rak Besi	Unit	127	
33	Rak Kayu	Unit	10	
34	Filing Cabinet Besi	Unit	47	
35	Brandkas	Unit	4	
36	Locker	Unit	4	
37	Lemari Display	Unit	4	
38	Folding Container Box	Unit	5	
39	Laci Box	Unit	8	
40	Koper/Tas	Unit	6	
41	Tabung Pemadam Api	Unit	16	
42	CCTV - Camera Control Television System	Unit	46	
43	Papan Visual/Papan Nama	Unit	6	
44	White Board	Unit	4	
45	Alat Penghancur Kertas	Unit	10	
46	Mesin Absensi	Unit	2	
47	Panel Pameran	Unit	1	
48	Laser Pointer	Unit	5	
49	Display	Unit	6	
50	LCD Projector/Infocus	Unit	4	
51	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Unit	5	
52	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	3	
53	Kotak Surat	Unit	1	

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
54	Pallet Plastik	Unit	102	
55	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	37	
56	Meja Kerja Kayu	Unit	130	
57	Kursi Besi/Metal	Unit	494	
58	Kursi Kayu	Unit	7	
59	Bangku Panjang Besi/Metal	Unit	1	
60	Meja Rapat	Unit	2	
61	Meja Komputer	Unit	16	
62	Meja Ketik	Unit	1	
63	Meja Telepon	Unit	6	
64	Meja Resepsionis	Unit	2	
65	Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	42	
66	Partisi	Unit	13	
67	Rak Sepatu (Almunium)	Unit	7	
68	Gantungan Jas	Unit	3	
69	Meja Taman	Unit	3	
70	Sofa	Unit	9	
71	Jam Mekanis	Unit	1	
72	Lemari Es	Unit	12	
73	A.C. Split	Unit	90	
74	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Unit	3	
75	Kipas Angin	Unit	6	
76	Exhause Fan	Unit	43	
77	Air Handling Unit	Unit	1	
78	Chiller	Unit	2	
79	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Unit	2	
80	Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	2	
81	Teko Listrik	Unit	2	
82	Rak Piring Alumunium	Unit	5	
83	Blender	Unit	4	
84	Thermos Air	Unit	6	
85	Televisi	Unit	10	
86	Equalizer	Unit	3	
87	Loudspeaker	Unit	104	
88	Microphone	Unit	2	
89	Mic Conference	Unit	3	
90	Camera Video	Unit	1	
91	Tiang Bendera	Unit	2	
92	Dispenser	Unit	13	
93	Mimbar/Podium	Unit	1	
94	Coffee Maker	Unit	2	
95	Vertikal Blind	Unit	80	
96	Lemari Plastik	Unit	57	
97	Mesin Pengering Tangan	Unit	3	
98	DVD Player	Unit	2	
99	Tangga	Unit	3	
100	Lampu	Unit	5	
101	Bingkai Foto	Unit	5	
102	Bracket Standing Peralatan	Unit	4	
103	Lampu Emergency	Unit	6	
104	Audio Mixing Portable	Unit	1	
105	Microphone/Wireless MIC	Unit	3	
106	Microphone/Boom Stand	Unit	8	
107	Professional Sound System	Unit	3	
108	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	131	
109	Video Monitor	Unit	2	
110	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Unit	2	
111	Tripod Camera	Unit	6	
112	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Unit	1	
113	Head Set	Unit	113	
114	Camera Digital	Unit	7	
115	Video Conference	Unit	1	
116	Clipp On	Unit	1	
117	Camera Conference	Unit	84	
118	Drone	Unit	2	
119	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	Unit	4	
120	Mesin Barcode	Unit	1	
121	Teropong/Keker	Unit	2	
122	Telephone (PABX)	Unit	1	
123	Pesawat Telephone	Unit	24	

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
124	Telephone Mobile	Unit	10	
125	Dehumidifier (Humidity Control)	Unit	24	
126	Charger	Unit	1	
127	Kursi Dorong	Unit	1	
128	Instrument Trolley, Stainless Steel	Unit	8	
129	Vacum Ectrator (AB)	Unit	1	
130	Walker Polding	Unit	1	
131	Refrigated Centrifuge	Unit	1	
132	Reffigerated Incubator	Unit	1	
133	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Unit	3	
134	Pompa Hidrolik	Unit	6	
135	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	19	
136	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	9	
137	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Unit	8	
138	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Unit	11	
139	Compressor Unit	Unit	5	
140	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Unit	6	
141	Vacum Pump	Unit	4	
142	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Unit	12	
143	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	4	
144	Dry Oven	Unit	6	
145	Laminar Air Flow	Unit	6	
146	Refrigerator	Unit	11	
147	Bacteriological Colony Counter	Unit	3	
148	Vortex Mixer	Unit	1	
149	Alat Laboratorium Umum Lainnya	Unit	2	
150	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Unit	1	
151	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Unit	11	
152	Aquadestilator	Unit	1	
153	Test Tube Mixer	Unit	3	
154	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Unit	4	
155	Loop Sterilizer	Unit	3	
156	Reader Antibiotic	Unit	1	
157	Micro Pippettes	Unit	37	
158	Microscope Tringular	Unit	1	
159	Vacuum Manifold	Unit	3	
160	Alat Laboratorium Microbiologi Lainnya	Unit	1	
161	Mercury Analyzer (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	
162	Desicator	Unit	12	
163	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	
164	TLC Reagent Sprayer	Unit	4	
165	Filtration System	Unit	2	
166	Air Sampler (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	
167	Hydrolic Pump	Unit	1	
168	Pengukur Dissolution	Unit	4	
169	Automatic Thin-Layer Chromatography (TLC) Sampler	Unit	3	
170	Refrigerator Centrifuge	Unit	1	
171	Automatic Pipet Set	Unit	1	
172	Stand, Diluter/Pipet	Unit	63	
173	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Unit	2	
174	Protein Analyzer	Unit	1	
175	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	Unit	20	
176	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Unit	13	
177	Micro Analytical Balance	Unit	2	
178	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Unit	6	
179	Disintegrator	Unit	1	
180	Lemari Pengering Botol	Unit	22	
181	Portable Router	Unit	3	
182	Ion Meter	Unit	1	
183	Sand Washing Machine	Unit	1	
184	Anaerobic Jar (Alat Laboratorium Pertanian)	Unit	7	
185	Elisa Reader(Computerized,Semi Manual)	Unit	1	
186	Fumehood	Unit	6	
187	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	Unit	11	

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
188	Muffle Furnace	Unit	2	
189	Shaker (Alat Laboratorium Pertanian)	Unit	3	
190	Stabilizer/UPS	Unit	23	
191	Stomacher	Unit	2	
192	Tlc Scanner	Unit	1	
193	Vortex Mixer(Alat Laboratorium Pertanian)	Unit	9	
194	Digestor Heating	Unit	3	
195	Polymerase Chain Reactor (Alat Laboratorium Pertanian)	Unit	1	
196	Electronic Moisture Balance	Unit	1	
197	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)	Unit	1	
198	Homogenizer (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Unit	1	
199	Laboratory Instrument Cabinet	Unit	1	
200	Laboratory Emergency Shower/Eyewash	Unit	2	
201	Laboratory Fridge/Freezer	Unit	14	
202	Laboratory Flammable Storage Cabinets	Unit	1	
203	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	4	
204	Laboratory Blender Warning	Unit	2	
205	Tang	Unit	6	
206	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	7	
207	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	2	
208	Automatic Pipet Dispenser	Unit	25	
209	Karl Fiher	Unit	1	
210	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	4	
211	Thermocouple	Unit	34	
212	Moisture Tester (Analytical Instrument)	Unit	1	
213	Atomic Absorption(Flame) Spectrophotometer	Unit	2	
214	Chromatography Developing Chamber	Unit	25	
215	Gas Chromatograph(GC)	Unit	2	
216	Balance Weight Set	Unit	1	
217	Shaking Water Bath	Unit	3	
218	Bunsen Gas Bumer	Unit	6	
219	Hot Plate With Magnetic Stiring (General Laboratory Tool)	Unit	1	
220	Panel Uto Power	Unit	7	
221	Pipetter Epperdort	Unit	20	
222	Water Chiller	Unit	2	
223	Soxhlel Extractor	Unit	2	
224	Flask	Unit	2	
225	Generator Set (Lab Scale)	Unit	1	
226	Fire Extinguisher	Unit	1	
227	Fume Hood (Laboratory Safety Equipment)	Unit	3	
228	Uninterupted Power Supply (UPS)	Unit	14	
229	Single Phase Transformer Step Up/Down	Unit	1	
230	System/Power Supply Lainnya	Unit	1	
231	Infrared Thermometer	Unit	16	
232	Electric Desicator	Unit	11	
233	Kjedahl Nitrogen Digestion & Distilling Apparatus	Unit	2	
234	UV/VIS Spectrophotometer	Unit	4	
235	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	12	
236	Deaeration And Filtering System	Unit	2	
237	Multi Tester	Unit	1	
238	Photo Meter	Unit	1	
239	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Unit	2	
240	Density Balance For Liquids	Unit	1	
241	Local Area Network (LAN)	Unit	17	
242	P.C Unit	Unit	109	
243	Lap Top	Unit	15	
244	Note Book	Unit	21	
245	Tablet PC	Unit	1	
246	Speaker Komputer	Unit	28	
247	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	
248	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	103	
249	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2	
250	External/ Portable Hardisk	Unit	16	
251	Router	Unit	17	

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
252	Hub	Unit	16	
253	Rak Server	Unit	1	
254	Switch	Unit	12	
255	Rackmount	Unit	1	
256	Digital LUX Meter + Acc	Unit	1	
257	Alat Peraga Percontohan Lainnya	Unit	3	
258	Alat Musik Modern/Band	Unit	2	

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.

2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM

3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:

1. Sewa; atau

2. Pinjam pakai; atau

3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau

4. Milik sendiri

Tabel 27

Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	58
2	SDM Administrasi**	pegawai	12
TOTAL			70

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28

Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	**Balai POM di Batam**										
1	Kepala		1							1	0
2	Bagian TU/ Sub Bagian TU		2		5	4				11	0
3	Tim Kerja Pengujian			6	18					24	24
4	Tim Kerja Pemeriksaan		1	9	8					18	18
5	Tim Kerja Penindakan		2		5					7	7
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi			2	7					9	9
	Total	**0**	**6**	**17**	**43**	**4**	**0**	**0**	**0**	**70**	**58**

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29

Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	5	739	1542	148	308
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	9	762	3218	85	358
3	Pangan dan Air	5	239	880	48	176
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	5	865	3743	173	748
	TOTAL	24	2605	7841	454	1590

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Tabel 30

Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (*Provider*)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Uji disolusi pada tablet metronidazol	BBPOM Serang	10	1- 13 Juni 2025
		Penetapan Kadar Cemaran EG DEG dalam Sediaan Cair Oral	P3OMN	32	15 Juli - 15 Agustus 2025
		Penetapan Kadar Teofilin Kapsul Secara KCKT	BBPOM Mataram	4	29 Oktober 2025 - 28 November 2025
		Identifikasi Psikotropika dalam Serbuk secara Kromatografi Lapis Tipis	P3OMN	34	15 Juli - 15 Agustus 2025
2	Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	Identifikasi Imipramin, Amtriptilin, Fluoksetin	Uji Banding Antar Laboratorium BBPOM Banjarbaru	3	9 Desember - 23 Desember 2025
		Identifikasi Difenhidramin HCl, Klorfeniramin Maleat, Prometazin HCl dalam OBA Sediaan Padat Dengan GCMS	P3OMN	32	18 Juli - 1 Agustus 2025
3	Kosmetik	Identifikasi Bahan Dilarang dalam Kosmetik Sediaan untuk Kulit Berjerawat	P3OMN	35	21 Juli - 15 Agustus 2025
4	Pangan	ANTIOXIDANTS (BHA, BHT, TBHQ) in Cooking Oil	P3OMN	47	1 Juli - 14 Juli 2025
		Penetapan Kadar Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) dalam Sirup	P3OMN	36	11 Juli - 31 Juli 2025
		PK NaCl pada garam	P3OMN	40	30 September - 27 Oktober 2025
5	Mikrobiologi	Deteksi Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus dan Candida albicans Pada Produk Kosmetik (Matriks: Sampo Bayi)	P3OMN	43	22 April - 23 Mei 2025

Sumber data: Balai POM di Batam
Per 29 Desember 2025

Tabel 31A

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

Balai POM di Batam

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	**2**						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	**3**						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	**1**						
4	CONDUCTIVITY METER	**1**						
5	DISINTEGRATION TESTER	**1**						
6	DISSOLUTION TESTER	**3**						
7	ELISA SYSTEM	**1**						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	**1**						
9	GC	**2**						
10	GCMS	**2**						
11	HPLC	**17**						
12	ICPMS	**1**						
13	ION METER	**1**						
14	KARL FISHCHER	**1**						
15	MICROWAVE DIGESTER	**4**						
16	MUFFLE FURNACE	**2**						
17	OVEN	**2**						
18	pH METER	**4**						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	**1**						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	**3**						
21	TIMBANGAN ANALITIK	**5**						
22	TIMBANGAN MIKRO	**3**						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	**4**						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	**2**						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	**2**						

B. Peralatan Unggul

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	CYTOTOXIC CABINET	**1**						
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS (DUSA) FOR INHALER TESTING MDI + DPI	**1**						
3	HIGH PRESSURE ION CHROMATOGRAPHY (HPIC)	**1**						
4	GCMS/MS	**1**						
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	**2**						
6	SPECTROFLUOROMETER	**1**						

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	**2**						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	**3**						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	**1**						
4	CONDUCTIVITY METER	**1**						
5	DISINTEGRATION TESTER	**1**						
6	DISSOLUTION TESTER	**3**						
7	ELISA SYSTEM	**1**						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	**1**						
9	GC	**2**						
10	GCMS	**2**						
11	HPLC	**12**						
12	ICPMS	**1**						
13	ION METER	**1**						
14	KARL FISHCHER	**1**						
15	MICROWAVE DIGESTER	**3**						
16	MUFFLE FURNACE	**1**						
17	OVEN	**2**						
18	pH METER	**3**						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	**1**						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	**2**						
21	TIMBANGAN ANALITIK	**5**						
22	TIMBANGAN MIKRO	**3**						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	**4**						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	**2**						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	**2**						

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan	Keterangan
1	AAS	**2**	2	0	0	0	2	100.00	
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	**3**	3	0	0	0	3	100.00	
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	**1**	0	0	0	0	0	0.00	Belum memiliki Automatic Titrator / Potensiometer. Karena belum ada kebutuhan parameter uji menggunakan alat tersebut
4	CONDUCTIVITY METER	**1**	2	0	0	0	2	100.00	
5	DISINTEGRATION TESTER	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
6	DISSOLUTION TESTER	**2**	3	0	0	0	3	100.00	
7	ELISA SYSTEM	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
8	FAT ANALYZER SYSTEM	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
9	GC	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
10	GCMS	**1**	1	1	1	1	2	100.00	
11	HPLC	**10**	10	0	0	0	10	100.00	
12	ICPMS	**1**	0	0	0	0	0	0.00	Sudah mendapat rekomendasi alat di tahun 2025 dan dilakukan perencanaan Pengadaan tahun 2026. Alat ini digunakan untuk penetapan kadar logam berat pada komoditi pangan dan obat tradisional
13	ION METER	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
14	KARL FISHCHER	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
15	MICROWAVE DIGESTER	**2**	2	0	0	0	2	100.00	
16	MUFFLE FURNACE	**1**	2	0	0	0	2	100.00	
17	OVEN	**1**	4	0	0	0	4	100.00	
18	pH METER	**2**	3	0	0	0	3	100.00	
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	**1**	1	0	0	0	1	100.00	
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	**1**	4	0	0	0	4	100.00	
21	TIMBANGAN ANALITIK	**2**	10	0	0	0	10	100.00	
22	TIMBANGAN MIKRO	**3**	2	0	0	0	2	66.67	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	**2**	5	0	0	0	5	100.00	
24	TIMBANGAN TOP LOADING	**1**	3	0	0	0	3	100.00	
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC , AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	**2**	1	1	1	1	2	100.00	

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	**2**						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	**2**						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	**1**						
4	CONDUCTIVITY METER	**1**						
5	DISINTEGRATION TESTER	**1**						
6	DISSOLUTION TESTER	**1**						
7	ELISA SYSTEM	**1**						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	**1**						
9	GC	**1**						
10	GCMS (Detektor MS)	**1**						
11	HPLC	**5**						
12	ICPMS	**1**						
13	ION METER	**1**						
14	KARL FISHCHER	**1**						
15	MICROWAVE DIGESTER	**1**						
16	MUFFLE FURNACE	**1**						
17	OVEN	**1**						
18	pH METER	**2**						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	**1**						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	**1**						
21	TIMBANGAN ANALITIK	**2**						
22	TIMBANGAN MIKRO	**2**						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	**1**						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	**1**						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	**1**						

Sumber data
Data Standar Peralatan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 161 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Data Total Peralatan : Balai POM di Batam
Data per 20 Desember 2025

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas

Balai POM di Batam

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE	1						
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
9	COLONY COUNTER	2						
10	CONDUCTIVITY METER	1						
11	DEEP FREEZER	1						
12	ELECTRICAL PIPETTE	10						
13	FREEZER	3						
14	FUME HOOD	1						
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
16	HOT PLATE	2						
17	INCUBATOR	13						
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
19	INCUBATOR ROTARY	1						
20	ISOLATOR	1						
21	LABORATORY BLENDER	1						
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
27	OVEN	3						
28	PARTICLE COUNTER	1						
29	PCR CABINET	1						
30	PCR REAL TIME	1						
31	pH METER	1						
32	REFRIGERATOR	6						
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2						
36	STOMACHER	2						
37	TIMBANGAN ANALITIK	2						
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
39	ULTRASONIC DEGASSER	1						
40	UV CABINET / LAMPU UV	1						
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
43	VACUUM PUMP	2						
44	VELOCITY METER	1						
45	VORTEX MIXER	6						
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
47	WATERBATH SHAKER	2						

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan	Keterangan
1	ANAEROBIC JAR *	15	4	3	3	3	7	46.67	Jumlah yg *existing* sesuai dengan kebutuhan lab
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	1	0	0	0	1	100.00	
3	AUTOCLAVE	2	2	0	0	0	3	100.00	
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0.00	Alat dibutuhkan untuk pengujian MBG sudah mengusulkan di usulan alat untuk pengujian MBG
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	5	0	0	0	5	83.33	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	1	0	0	0	1	100.00	
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	2	0	0	0	2	66.67	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab
8	COLONY COUNTER	2	2	0	0	0	2	100.00	
9	CONDUCTIVITY METER	1	1	0	0	0	1	100.00	
10	DEEP FREEZER	1	0	0	0	0	0	0.00	
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	2	0	0	0	2	20.00	
12	FREEZER	3	4	0	0	0	3	100.00	
13	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0.00	
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	1	0	0	0	1	100.00	
15	HOT PLATE	1	2	0	0	0	2	100.00	
16	INCUBATOR	13	10	0	0	0	10	76.92	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	1	0	0	0	1	100.00	
18	INCUBATOR ROTARY	1	1	0	0	0	1	100.00	
19	LABORATORY BLENDER	1	1	0	0	0	1	100.00	
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	1	0	0	0	1	100.00	
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	3	0	0	0	3	100.00	
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	6	0	0	0	6	100.00	
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	2	0	0	0	2	100.00	
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	6	0	0	0	6	100.00	
25	OVEN	3	2	0	0	0	2	66.67	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab
26	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0.00	
27	PCR CABINET	1	2	0	0	0	2	100.00	
28	PCR REAL TIME	1	1	0	0	0	1	100.00	
29	pH METER	1	2	0	0	0	2	100.00	
30	REFRIGERATOR	6	6	0	0	0	6	100.00	
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	1	0	0	0	1	100.00	
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0.00	
33	STOMACHER	2	2	0	0	0	2	100.00	
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	2	0	0	0	2	100.00	

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan	Keterangan
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	3	0	0	0	3	100.00	
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	1	1	1	1	100.00	
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	1	0	0	0	1	100.00	
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	6	0	0	0	6	100.00	
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	1	0	0	0	1	100.00	
40	VACUUM PUMP	2	1	1	1	1	2	100.00	
41	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0.00	
42	VORTEX MIXER	6	7	0	0	0	7	100.00	
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	1	0	0	0	0	100.00	
44	WATERBATH SHAKER	2	1	0	0	0	1	50.00	Jumlah yg existing sesuai dengan kebutuhan lab

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

Sumber data
Data Standar Peralatan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 161 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Data Total Peralatan : Balai POM di Batam
Data per 20 Desember 2025

Tabel 32

Sertifikasi/Akreditasi

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO/IEC 9001:2015	sertifikat	1	PT SUCOFINDO Sertifikat berlaku sejak 18 November 2024 s.d 17 November 2027
2	ISO 17025	sertifikat	1	Komite Akreditasi Nasional (KAN) Akreditasi 2013 (berlaku 2013-2017) Reakreditasi 1 2016 sertifikat keluar 2017 (berlaku 2017-2022) Reakreaditasi 2 2021 sertifikat keluar 2022 (berlaku 2022-2027)
3	ISO 45001:2018	sertifikat	1	PT TUV SUD Indonesia Sertifikat berlaku sejak 03 Desember 2024 s.d 02 Desember 2027
4	ISO 37001:2016	sertifikat	1	PT TUV SUD Indonesia Sertifikat berlaku sejak 05 Desember 2024 s.d 04 Desember 2027

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :
*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A

Kerja Sama

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau	2024	2027	Pengawasan Isi Siaran Terkait Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	1. Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pertukaran informasi, temuan dan/atau data rekaman publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan 3. KIE Obat dan Makanan	1. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan 2. Koordinasi terkait Pertukaran Informasi Iklan dan Promosi Obat dan Makanan di media TV dan Radio Di wilayah kepri 3. KIE terkait obat dan makanan	1. Jumlah kegiatan koordinasi 2. Tingkat efektivitas Obat dan Makanan	Efektif
2	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau	2023	2028	Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu	Koordinasi terkait pengawasan Narkotika, Psikotropika di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kegiatan koordinasi	Efektif
3	Bupati Lingga	2023	2026	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1. Pemantauan, evaluasi dan pemberian arahan kebijakan pengawasan obat dan makanan kepada tim kabupaten/kota (Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan) 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan publikasi obat dan makanan 3. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan obat dan makanan	1. Pengawasan Bersama, pemberian rekomendasi hasil Pengawasan 2. KIE terkait obat dan makanan 3. Koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanandi Provinsi Kepulauan Riau	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 3. Jumlah kegiatan Koordinasi	Efektif

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Gubernur Kepulauan Riau	2022	Berlaku hingga ada perubahan	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau	1. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu	1. KIE terkait obat dan makanan 2. Koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanandi Provinsi Kepulauan Riau	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah kegiatan Koordinasi	Efektif

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama

Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama

4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.

5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B

Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	2	1. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau Tentang Pengawasan Isi Siaran Terkait Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau 2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	2	1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1342 Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau 2. Keputusan Bupati Lingga Nomor: 598/KPTS/IX/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	9	1. UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat 2. Balai terbaik 3 dalam penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan 3. Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 bulan Agustus dan September Tahun Anggaran 2025 4. Penghargaan pada Kekayaan Negara Award 2025 dalam kategori Pengelolaan BMN Kelompok Satuan Kerja sebagai terbaik pertama 5. Juara 1 UMKM Inovasi Terbaik pada ajang "Inovasi UMKM: Produk Aman dan Berkelanjutan" 6. Predikat WBK dari Kementerian PANRB 7. Badan Publik Informatif kategori instansi vertikal tingkat Provinsi Kepulauan Riau 8. Apresiasi atas Peran Aktif dan Kerja Sama Strategis dalam Mendorong Transformasi Mutu dan Keamanan Produk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau 9. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

Sumber data: Balai POM di Batam

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34

Pengadaan Barang/Jasa

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
							No	Tanggal	Nilai	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	52,215,000	52,215,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.8018	31-Dec-24	52,215,000	PT. AGRES BATAM TEKNOLOGI	0077.4747.2422.5000	Ruko Grand Niaga Mas Blok A No. 77, Batam Kota, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B1.25.01.329 Tgl 23 Januari 2025	No. PL.02.01.3B1.25.01.329 Tgl 23 Januari 2025	00031 T/672838/2025	03-02-2025	52,215,000	25137130200263	05-02-2025	51,431,775	52,215,000	NIHIL	NIHIL
2	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Regionalisasi Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	58,334,450	58,334,450	7-Mar-25	PL.02.01.3B.3B1.03.25.987	7-Mar-25	58,334,450	PT. BENSRA SUKSES INDONESIA	0737.8204.6421.6000	Komplek Paninsula Blok B No.5 RT.001 RW.008, Marpoyan Damai, Pekanbaru			100	No.PL.02.01.3B.3B1.04.25.1410 Tgl 15 April 2025	No.PL.02.01.3B.3B1.04.25.1410 Tgl 15 April 2025	00138 T/672838/2025	29-04-2025	58,334,450	25137130201815	30-04-2025	51,765,255	58,334,450	NIHIL	NIHIL
3	Pemeliharaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025	1 Paket	E-Purchasing	60,472,800	60,472,800	24-Jan-25	PL.02.01.3B.3B1.01.25.382	24-Jan-25	60,472,800	PT. ESCO UTAMA	0314.8171.5641.1000	Taman Tekno BSD Blok H8 No.1, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten			100	No.PL.02.01.3B.3B1.03.25.1254 Tgl 24 Maret 2025	No.PL.02.01.3B.3B1.03.25.1254 Tgl 24 Maret 2025	00104 T/672838/2025	27-03-2025	60,472,800	25137130201372	09-04-2025	53,390,400	60,472,800	NIHIL	NIHIL
4	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	63,500,000	63,500,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.8016	31-Dec-24	63,500,000	CV. ELANG ATK	0210.3701.8521.5000	Komplek Lucky Permai No 22 RT 04 RW 07 Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.02.3B1.01.25.01 Tgl 01 Januari 2025	No. PL.02.02.3B1.01.25.01 Tgl 01 Januari 2025	00013 T/672838/2025	13-01-2025	63,500,000	25137130200060	15-01-2025	61,200,000	63,500,000	NIHIL	NIHIL

No	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
							No	Tanggal	Nilai	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025	1 Paket	E-Purchasing	64,780,000	64,780,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B.3B1.12.24.7998	31-Dec-24	64,780,000	CV. HANINDO JOA	0969.6160.5122.5000	Ruko Puri Mas Blok A No. 20 Kel. Teluk Kering, Buru, Karimun, Kepri			100	No. PL.02.01.3B1.02.25.623 Tgl 11 Februari 2025	No. PL.02.01.3B1.02.25.623 Tgl 11 Februari 2025	00058 T/672838/2025	04-03-2025	64,780,000	25137130200764	06-03-2025	62,547,500	64,780,000	NIHIL	NIHIL
6	Pengadaan Sewa Rumah Jabatan Pimpinan TA 2025	1 Paket	Pengadaan Langsung	68,000,000	68,000,000	1-Jan-25	PL.02.02.3B1.12.24.8019	31-Dec-24	68,000,000	LIZANIA FITRI	0585.5363.5220.1000	Perumahan Bukit Citra Lestari Blok H No. 1, Nongsa, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B.3B1.02.25.632 Tgl 12 Februari 2025	No. PL.02.01.3B.3B1.02.25.632 Tgl 12 Februari 2025	00040 T/672838/2025	18-02-2025	68,000,000	25137130200461	20-02-2025	63,808,300	68,000,000	NIHIL	NIHIL
7	Pemeliharaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025	1 Paket	E-Purchasing	74,390,757	74,390,757	1-Jan-25	PL.02.01.3B.3B1.12.24.8000	31-Dec-24	74,390,757	PT. UNITAMA ANALITIKA PERKASA	0017.7474.1102.7000	Jl. Garuda No. 31 - C Kemayoran Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat			100	No.PL.02.01.3B.3B1.01.25.142 Tgl 10 Januari 2025	No.PL.02.01.3B.3B1.01.25.142 Tgl 10 Januari 2025	00024 T/672838/2025	21-01-2025	74,390,757	25137130200133	22-01-2025	65,678,326	74,390,757	NIHIL	NIHIL
8	Pemeliharaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025	1 Paket	E-Purchasing	132,178,800	132,178,800	16-Jan-25	PL.02.01.3B.3B1.01.25.224	16-Jan-25	132,178,800	PT. ESCO UTAMA	0314.8171.5641.1000	Taman Tekno BSD Blok H8 No.1, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten			100	No.PL.02.01.3B.3B1.03.25.1250 Tgl 24 Maret 2025	No.PL.02.01.3B.3B1.03.25.1250 Tgl 24 Maret 2025	00103 T/672838/2025	27-03-2025	132,178,800	25137130201371	09-04-2025	116,698,400	132,178,800	NIHIL	NIHIL
9	Pengadaan Resepsionis Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	163,320,000	163,320,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.8012	31-Dec-24	163,320,000	PT. BAKRI KARYA SARANA	0032.6381.2421.5000	Jl. Diponegoro Ruko Global 22 No. 10, Buliang, Batu Aji,			100	No. PL.02.01.3B1.12.25.7546 Tgl 31 Dese	No. PL.02.01.3B1.12.25.7546 Tgl 31 Dese	00797 T/672838/2025	16-12-2025	163,320,000	25999132083696 9	18-12-2025	163,320,000	163,320,000	NIHIL	NIHIL

No	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
							No	Tanggal	Nilai	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												Kota Batam, Kepri				mber 2025	mber 2025									
10	Pengadaan Pemelihara Sarana dan Prasarana Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	244,980,000	244,980,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.80010	31-Dec-24	244,980,000	PT. BAKRI KARYA SARANA	0032.6381.2421.5000	Jl. Diponegoro Ruko Global 22 No. 10, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B 1.12.25.7550 Tgl 31 Desember 2025	No. PL.02.01.3B 1.12.25.7550 Tgl 31 Desember 2025	00798 T/672 838/2025	16-12-2025	244,980,000	25999 13208 36968	18-12-2025	244,980,000	244,980,000	NIHIL	NIHIL
11	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	315,000,000	315,000,000	26-Feb-25	PL.02.01.3B.3B1.02.25.834	26-Feb-25	315,000,000	PT DITEK JAYA	0013.1747.2703.8000	Jl. Panjang Kedoya Elok Plaza Blok DA/12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat			100	No. PL.02.01.3B. 3B1.03.25.1160 Tgl 18 Maret 2025	No. PL.02.01.3B. 3B1.03.25.1160 Tgl 18 Maret 2025	00100 T/672 838/2025	25-03-2025	315,000,000	25137 13030 00912	27-03-2025	279,527,028	315,000,000	NIHIL	NIHIL
12	Pengadaan Pengemudi Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	326,640,000	326,640,000	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.80008	31-Dec-24	326,640,000	PT. BAKRI KARYA SARANA	0032.6381.2421.5000	Jl. Diponegoro Ruko Global 22 No. 10, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B. 3B1.05.25.2227 Tgl 21 Mei 2025	No. PL.02.01.3B. 3B1.05.25.2227 Tgl 21 Mei 2025	00211 T/672 838/2025	26-05-2025	326,640,000	25137 13030 01685	28-05-2025	297,006,873	326,640,000	NIHIL	NIHIL
13	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025	1 Paket	E-Purchasing	334,698,100	334,698,100	27-Feb-25	PL.02.01.3B.3B1.02.25.886	27-Feb-25	334,698,100	PT. JIXIAN TECH CIPTA KARYA	0013.9328.8270.1700	Wisma Perkasa Jl HJ Tutty Alawiyah 21B No 6-7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan			100	No. PL.02.01.3B 1.12.25.7538 Tgl 31 Desember 2025	No. PL.02.01.3B 1.12.25.7538 Tgl 31 Desember 2025	00795 T/672 838/2025	16-12-2025	334,698,100	25999 13208 36971	18-12-2025	326,640,000	334,698,100	NIHIL	NIHIL

No	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
										Pelaksana																
							No	Tanggal	Nilai	Nama Pelaksana	NPWP	Alamat			%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	451,564,400	451,564,400	26-Feb-25	PL.02.01.3B.3B1.02.25.828	26-Feb-25	451,564,400	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA	0015.5420.3807.3000	Jl. Raden Saleh No. 45 G, Menteng, Jakarta Pusat			100	No. PL.02.01.3B.3B1.03.25.1108 Tgl 14 Maret 2025	No. PL.02.01.3B.3B1.03.25.1108 Tgl 14 Maret 2025	00096T/672838/2025	25-03-2025	451,564,400	25137130200 1304	27-03-2025	400,712,553	451,564,400	NIHIL	NIHIL
15	Pengadaan Satuan Pengamanan Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	496,827,648	496,827,648	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.8014	31-Dec-24	496,827,648	PT. BAKRI KARYA SARANA	0032.6381.2421.5000	Jl. Diponegoro Ruko Global 22 No. 10, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B1.12.25.7542 Tanggal Tgl 31 Desember 2025	No. PL.02.01.3B1.12.25.7542 Tanggal Tgl 31 Desember 2025	00796T/672838/2025	16-12-2025	496,827,648	25999132083 6970	18-12-2025	496,827,648	496,827,648	NIHIL	NIHIL
16	Pengadaan Tenaga Kebersihan Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	533,022,840	533,022,840	1-Jan-25	PL.02.01.3B1.12.24.8006	31-Dec-24	533,022,840	PT. BAKRI KARYA SARANA	0032.6381.2421.5000	Jl. Diponegoro Ruko Global 22 No. 10, Buliang, Batu Aji, Kota Batam, Kepri			100	No. PL.02.01.3B1.12.25.7534 Tanggal Tgl 31 Desember 2025	No. PL.02.01.3B1.12.25.7534 Tanggal Tgl 31 Desember 2025	00801T/672838/2025	16-12-2025	533,022,840	25999132083 9945	18-12-2025	533,022,840	533,022,840	NIHIL	NIHIL
17	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	1,211,005,600	1,211,005,600	26-Feb-25	PL.02.01.3B.3B1.02.25.830	26-Feb-25	1,211,005,600	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA	0015.5420.3807.3000	Jl. Raden Saleh No. 45 G, Menteng, Jakarta Pusat			100	No. PL.02.01.3B.3B1.03.25.1112 Tgl 14 Maret 2025	No. PL.02.01.3B.3B1.03.25.1112 Tgl 14 Maret 2025	00097T/672838/2025	25-03-2025	1,211,005,600	25137130200 1303	27-03-2025	1,074,631,095	1,211,005,600	NIHIL	NIHIL

No	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
							No	Tanggal	Nilai	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Batam TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	1,589,000,000	1,589,000,000	26-Feb-25	PL.02.01.3B.3B1.02.25.832	26-Feb-25	1,589,000,000	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	0013.7298.2707.3000	Jl. Abdul Muis No.62 Kel. Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat			100	No. PL.02.01.3B.3B1.05.25.2362 Tgl 26 Mei 2025	No. PL.02.01.3B.3B1.05.25.2362 Tgl 26 Mei 2025	00212T/672838/2025	26-05-2025	1,589,000,000	2513713020 02416	28-05-2025	1,410,058,560	1,589,000,000	NIHIL	NIHIL

Sumber Data: OMSPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (per 31 Desember 2025)

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35

Laporan Realisasi Anggaran

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	Rp4,918,795,000	Rp4,917,151,140	Rp11,232,562,000	Rp8,006,791,473	Rp4,238,151,000	Rp3,830,329,149	Rp20,389,508,000	Rp16,754,271,762
2	PNBP	Rp0	Rp0	Rp973,259,000	Rp411,538,267	Rp451,565,000	Rp451,564,400	Rp1,424,824,000	Rp863,102,667
	Total	**Rp4,918,795,000**	**Rp4,917,151,140**	**Rp12,205,821,000**	**Rp8,418,329,740**	**Rp4,689,716,000**	**Rp4,281,893,549**	**Rp21,814,332,000**	**Rp17,617,374,429**

Sumber Data: Laporan Keuangan Balai POM di Batam Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

Tabel 36

Laporan Penerimaan PNBP

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	**3**	**4**	**5 = 4/3 x 100%**
1	1,111,210,000	1,639,231,128	147.52

Sumber Data: Laporan Keuangan Balai POM di Batam Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

Tabel 37

Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	**Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI** NOTA DINAS INSPEKTUR UTAMA NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.304 Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai POM di Batam	87.5	86.64	99.02
2	**Nilai Hasil Evaluasi SAKIP** NOTA DINAS INSPEKTUR UTAMA NOMOR: PI.04.71.7.01.26.20 Hal: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	80.94	76.43	94.43
3	**Nilai Pengelolaan Kearsipan** KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.02.02.2.11.25.126 TENTANG NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	80	91.91	114.89
4	**Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa** NOTA DINAS KEPALA BIRO UMUM NOMOR: KP.09.01.25.01.26.49 Hal: Finalisasi Capaian Hasil Klarifikasi Direktif Penugasan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Direktif Penugasan Nilai Pengelolaan Barang/Jasa Tahun 2025	95	100	105.26
5	**Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara** NOTA DINAS KEPALA BIRO UMUM NOMOR: PL.03.01.25.01.26.12 Hal: Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025	82.75	100	120.85

Tabel 38

Data Produk Obat dan Makanan Beredar

Balai POM di Batam

Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Kepulauan Riau	Obat	3578
2	Kepulauan Riau	Obat Bahan Alam	997
3	Kepulauan Riau	Obat Kuasi	187
4	Kepulauan Riau	Suplemen Kesehatan	638
5	Kepulauan Riau	Kosmetik	6176
6	Kepulauan Riau	Pangan	4035

Sumber data: Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM RI